



PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BAPPEDA LITBANG
2018



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019 adalah dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Buleleng.

- (2) Sistematisa RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Semua Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah .
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - d. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 43 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH TAHUN
2019

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI	i
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULELENG.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.1.1 Aspek Geografi	13
2.1.1.2 Aspek Demografi	36
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	73
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	80
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	106
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	106
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	114
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	131
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	131
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	131
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	136
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	138
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Pendanaan ..	141
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	141
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..	141
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	150
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..	170

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 178

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 180

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... 187

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 205

5.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 205

5.2. Kapasitas Riil Keuangan Daerah 211

5.3. Kebijakan Alokasi Anggaran 212

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 217

BAB VII PENUTUP 231

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULELENG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagaimana Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional pertahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RKPD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA PD) yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan RENJA PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara bersama baik antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan tema **“Sinergitas Antar Sektor Guna Mendukung Pembangunan Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”**, tema ini merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019, selaras dengan program kerja Provinsi Bali, dan juga mengacu pada

pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Adapun konsistensi tema pembangunan Kabupaten Buleleng dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Rencana Kerja Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Perbandingan Tema RKPD



Sumber: Bappeda Kabupaten Buleleng, 2018

Kesimpulannya, RKPD tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang fokus pada sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. RKPD tahun 2019 merupakan RKPD tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Buleleng, sebagai bentuk analisa kondisi eksisting daerah serta menjaga kesinambungan rencana pembangunan provinsi dan nasional. RKPD 2019 juga memperhatikan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Selanjutnya RKPD akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah dan dipedomani dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

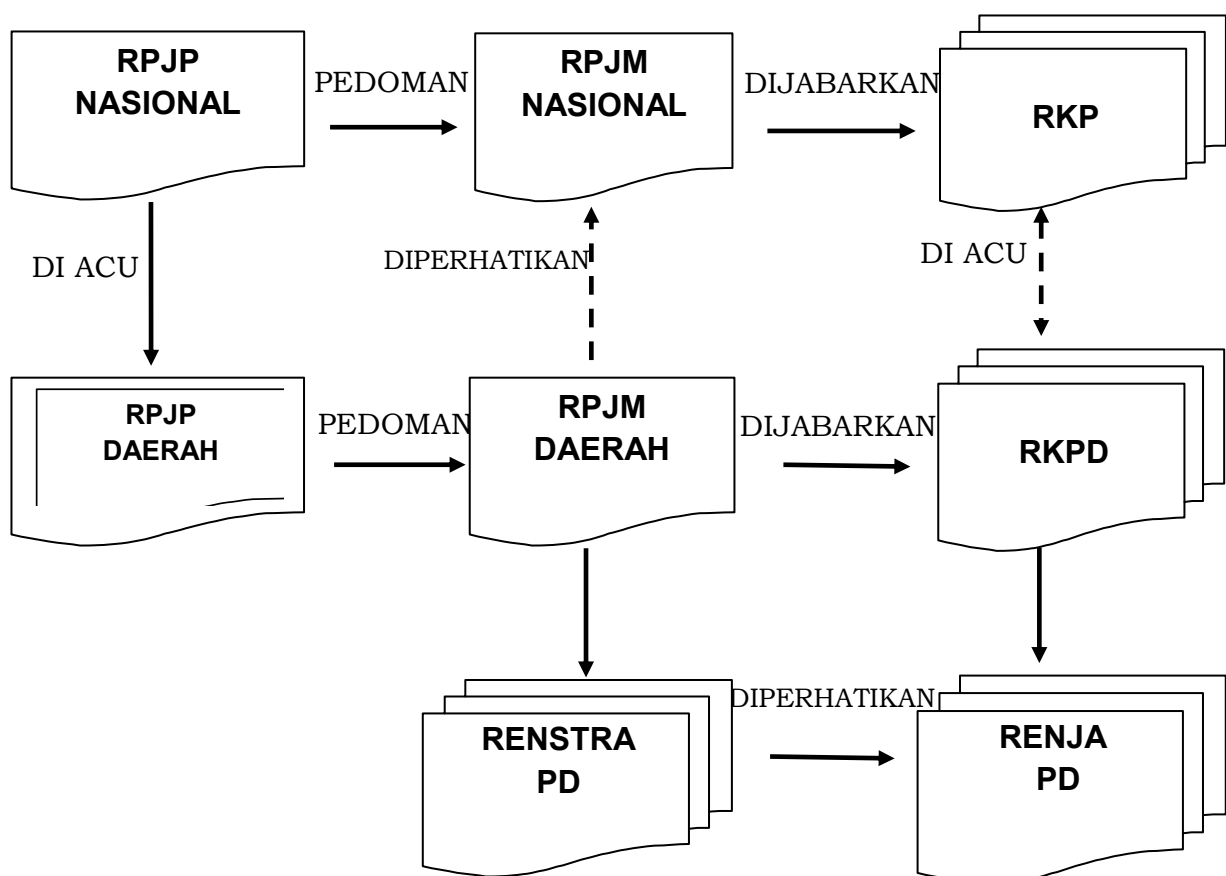
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

1.3 Hubungan antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka untuk menjamin keterkaitan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, maupun regional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019. Hubungan dokumen RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah



Dalam praktiknya, penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat Nasional dan Provinsi Bali. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional.

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Buleleng.

1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Bali

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 juga harus mengacu pada berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Bali. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Bali, RKPD provinsi Bali harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wilayah Kabupaten Buleleng yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Bali,

sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Buleleng.

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017–2022.

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 terkait perencanaan di tahun 2019. Sementara RPJMD dimaksud masih dalam proses penyusunan, maka dasar yang dipakai acuan dengan mempedomani visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diselaraskan dengan provinsi, prioritas nasional dan memperhatikan hasil musrenbang kabupaten. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah tahun 2019. Meskipun RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. RKPD Kabupaten Buleleng dan Renja Perangkat Daerah ini harus selaras bersinergi.

1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 mengacu kepada RTRW Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2013 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2019 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2019. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Buleleng.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA PD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan

digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

1.5 Sistematika

Dokumen RKPD Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2019.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Buleleng, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah sampai dengan Tahun berjalan

beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan tahun 2019, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk Tahun 2019.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan tahun 2019.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program prioritas tahun 2019.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografis

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, dan 169 Desa *Pakraman*. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km² atau 26,11% dari luas kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit terdapat di kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km² atau 3,44% dari luas kabupaten Buleleng. Pembagian daerah administrasi di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No.	Kecamatan	Administrasi				Desa Pakraman
		Desa	Kelurahan	Dusun/Banjar	Lingkungan	
1	Gerokgak	14	-	77	-	14
2	Seririt	20	1	80	5	25
3	Busungbiu	15	-	41	-	16
4	Banjar	17	-	74	-	17
5	Sukasada	14	1	63	5	21
6	Buleleng	12	17	41	53	21
7	Sawan	14	-	69	-	18
8	Kubutambahan	13	-	52	-	22
9	Tejakula	10	-	60	-	15
Jumlah		129	19	557	63	169

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8°03'40"- 8°23'00" LS dan 114°25'55"- 115°27'28" BT, berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai *Nyegara Gunung*, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (*ulun*) dan hilir (*teben*).

c. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng tersebar pada berbagai kelas lereng, mulai dari 0% s.d. > 40% (Tabel 2.2). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dari lahan yang datar hingga berlereng agak curam. Distribusi kemiringan lereng seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas dan Persebaran Kelas Lereng di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Kelas Lereng					Jumlah (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Gerokgak	11.249,81	8.330,92	9.295,31	9.856,67	853,43	39.856,14
2.	Seririt	1.761,58	2.517,65	4.057,80	3.700,74	0,00	12.037,77
3.	Busungbiu	0,00	2.412,26	8.750,52	2.843,69	0,00	14.006,47
4.	Banjar	886,90	825,07	9.275,13	2.598,86	105,34	13.691,30
5.	Sukasada	397,08	1.436,18	3.992,71	1.788,16	394,89	7.939,02
6.	Buleleng	3.731,07	885,96	0,00	0,00	0,00	4.617,03
7.	Sawan	2.419,17	2.363,84	2.297,56	1.355,89	364,22	8.800,68
8.	Kubutambahan	1.348,25	7.659,89	1.305,61	1.268,19	398,56	11.980,50
9.	Tejakula	0,00	7.290,26	708,44	1.780,59	0,00	9.779,29
Jumlah		21.793,86	33.722,03	39.613,08	25.192,79	2.116,44	122.438,20

Sumber: DEM SRTM (Citra Landsat) Kementerian Kehutanan RI

Data pada Tabel 2.2 maupun Gambar 2.1 menunjukkan bahwa secara kuantitatif, luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 15-25% mendominasi kondisi lahan di Buleleng, yaitu 32,35% dari total luas lahan. Sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng yang berupa perbukitan di bagian Selatan dan agak landai sampai ke pantai di bagian Utara

(*Nyegara Gunung*). Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola dengan baik karena menempatkan wilayah Buleleng sebagai daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang.

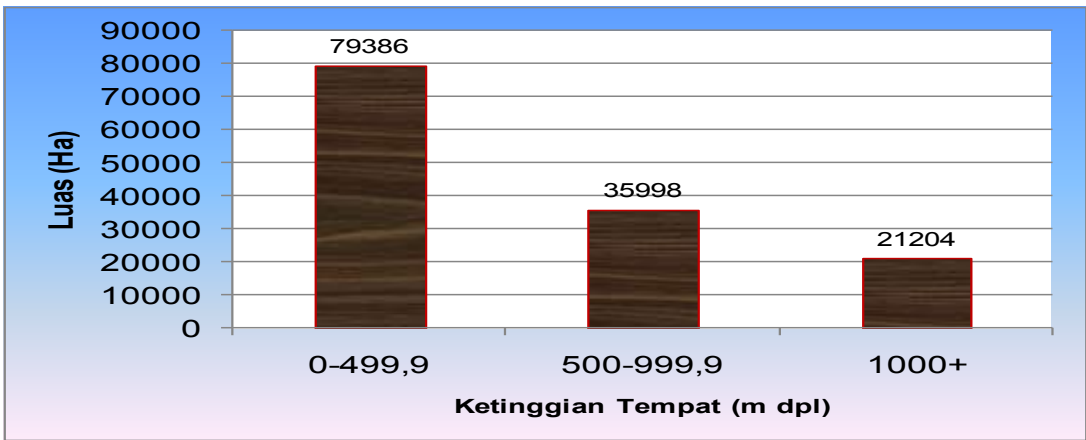


Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2011

Gambar 2.1
Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng

2) Ketinggian Tempat

Ditinjau dari ketinggian tempat, sebagian besar (58,12%) wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl. Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar 2.2.



Sumber : BPS Kabupaten Buleleng : Kab. Buleleng dalam Angka, 2017 (Diolah)

Gambar 2.2
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat

d. Geologi

1) Struktur dan Karakteristik Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh: (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (2) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (3) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

2) Potensi Geologi

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha (Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033). Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belum optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

e. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. DAS prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiaiyung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2), dan Oten Sungai (prioritas 2).

2) Sungai

a) Kuantitas Sungai

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 65 sungai (73,86%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 23 sungai atau 26,14% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 km. Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m³/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m³/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m³/tahun (Dinas PUPR Kab. Buleleng, 2016).

b) Kualitas Air Sungai

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng terpantau kualitasnya. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/Tukad Banyumala, Sungai/Tukad Saba dan Sungai/Tukad Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Fosfat* sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* melampaui baku mutu air minum Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016 (DLH Kab. Buleleng, 2016/Dinas Statistik Kab. Buleleng, 2016)

3) Air Danau/Waduk/Bendung/Embung

Terdapat 2 buah danau, 2 buah waduk, 24 bendung, dan 1 buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 134.203.500 m³. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.800.000 m³. Sedangkan, di danau

Tamblingan sekitar 27.050.000 m³. Danau Buyan dan danau Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya.

Dalam fungsinya sebagai penyedia air baku, fungsi Danau Buyan semakin menurun karena adanya sedimentasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada tahun 2015, volume sedimentasi mencapai 2.216,799 m³. Akibat dari sedimentasi tersebut menyebabkan penurunan kedalaman air selama 3 tahun terakhir sebesar 20 m serta volume air menurun dari 116,25 juta m³ menjadi 49,6 juta m³ (BWS Bali Penida, 2016). Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan kapung kili di danau.

Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak, waduk Titab di Kecamatan Busungbiu, dan Embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air Waduk Gerokgak rata-rata 3.750.000 m³ dan kondisinya berfluktuasi menurut musim. Secara teknis, waduk Titab memiliki luas genangan 68,83 Ha dengan volume tampungan efektif 10,60 juta m³ yang dimanfaatkan untuk irigasi dan juga akan dimanfaatkan untuk air minum dan pembangkit listrik.

Pemanfaatan sebagai irigasi mencakup daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1.915 Ha, daerah irigasi Lebah Semawa seluas 28 Ha, dan daerah irigasi Rawa seluas 23 Ha. Pemanfaatan sebagai air minum sebesar 350 liter per detik akan dikelola sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Desa-desa yang akan dilayani oleh SPAM Burana (Buleleng Jembrana) adalah:

- Kecamatan Seririt (Unggahan, Munduk Bestala, Bestala, Mayong, Rangdu, Ularan, Ringdikit, Joanyar, Kalianget, Tangguwisia, Sulanyah, Bubunan, Seririt, Pengastulan, Patemon, Lokapaksa, Umeanyar, Banjarasem, Kalisada dan Pangkung Paruk).
- Kecamatan Banjar (Tampekan, Banjar Tegeha, Banjar, Dencarik, Temukus, dan Kaliasem).
- Kecamatan Busungbiu (Telaga, Titab, Kekeran, dan Busungbiu).
- Kecamatan Gerokgak (semua desa).

4) Mata Air

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Ke depan, kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m³/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-lain.

f. Klimatologi

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi *Schmidth-Ferguson* bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q = 50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q = 170,73 - 244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar 26,9°C - 28,4°C; kelembaban udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara 1.913,6 - 2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai 66-77%, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Sanglah	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
1.	Temperatur (°C)				
	Maksimum	31,3	33,7	31,4	31,4
	Minimum	25,2	25,1	23,1	24,0
	Rata-rata	28,0	28,4	26,9	27,0
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Maksimum	89	88	90	93
	Minimum	71	69	71	76
	Rata-rata	80	78	81	84
3.	Tekanan Udara (mb)	1.009,5	1.008,6	1.012,1	1.009,5
4.	Kecepatan Angin (knot)	6	6	5	2
5.	Curah Hujan (mm)	2.489,0	2.812,6	1.913,6	2.498,0
6.	Penyinaran Matahari (%)	77	68	75	66

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

g. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Buleleng tahun 2016 didominasi oleh hutan (51.436,21 Ha atau 37,65%), diikuti lahan kering 36.513 Ha atau 26,73% dan perkebunan 31.834 Ha atau 23,31%.

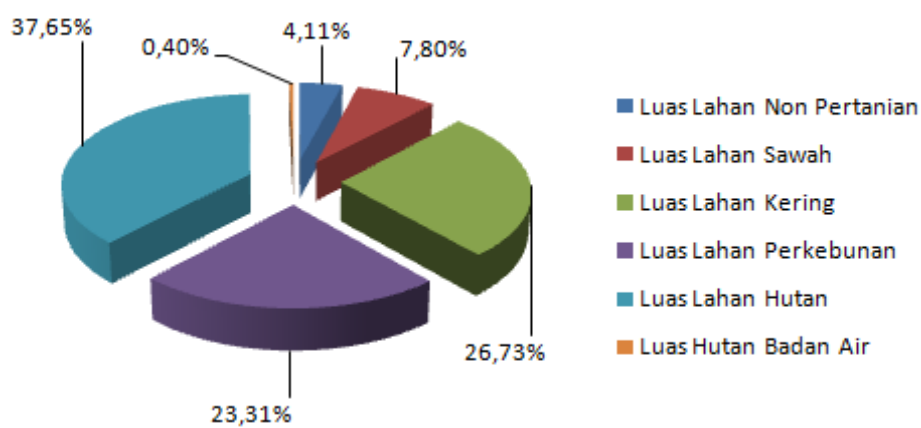
Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan*) (Ha)	Luas Lahan Badan Air**) (Ha)
1.	Gerokgak	570	631	6.259	1.374	34.566,23	29
2.	Seririt	566	1.676	5.328	1.356	4.265,77	0
3.	Busungbiu	320	725	5.444	5.313	2918	68
4.	Banjar	449	689	4.267	8.215	2300,79	0
5.	Sukasada	519	2.102	4.569	5.846	3061,82	482
6.	Buleleng	1.456	1.666	1.122	181	0	0
7.	Sawan	591	2.644	1.234	2.444	1709,5	0
8.	Kubutambahan	425	527	5.449	3.418	984,15	0
9.	Tejakula	670	0	2.841	3.687	1629,95	0,1
Jumlah		5.566	10.660	36.513	31.834	51.436,21	579,1

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Buleleng, 2016 (diolah)

Keterangan : *) Hutan Negara
**) Danau, Waduk dan Embung

Hutan negara di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 tercatat seluas 51.436,21 Ha atau 37,65% dari total luas wilayah kabupaten, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Luas hutan tersebut sudah memenuhi luasan ideal untuk optimalisasi manfaat fungsi lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18 ayat (2), yaitu minimal 30% dari luas pulau atau luas wilayah. Secara umum, kondisi biofisik hutan masih baik, namun kemungkinan adanya gangguan hutan perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan hutan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan penebangan liar.



Gambar 2.3
 Persentase Penggunaan Lahan Utama
 di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

h. Potensi pengembangan wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah kabupaten, meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha; meliputi hutan produksi terbatas seluas 3.207 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha.
2. Kawasan hutan rakyat, terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada kawasan berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya. Namun, sampai dengan tahun 2016,

luasan kawasan hutan rakyat belum dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan relatif kecil.

3. Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas sekitar 10.992 Ha, dengan jenis tanaman pangan yang banyak dikembangkan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau.

Jenis tanaman pangan yang paling banyak diusahakan adalah padi, dengan luas panen pada tahun 2016 mencapai 22.632 Ha dan total produksi sebanyak 135.270 ton gabah kering giling (GKG). Produktivitas lahan sawah mencapai 6,07 ton GKG. Selain padi, jenis tanaman pangan yang juga cukup banyak diusahakan adalah jagung dan kacang tanah, masing-masing dengan luas panen 6.166 ha dan 1.007 ha, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No.	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Padi Sawah	21.135	128.209
2.	Jagung	5.674	15.850
3.	Ubi Kayu	753.000	7.887
4.	Ubi Jalar	9.000	101.000
5.	Kacang Tanah	1.061	1.215
6.	Kedelai	18.000	29.000
7.	Kacang Hijau	134.000	82.000

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Buleleng selama ini dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain:

- 1) Perkembangan alih fungsi dari lahan pertanian produktif ke non pertanian tahun 2011-2015 sebesar 107 Ha. Sedangkan alih fungsi lahan tahun 2016 sebesar 15 Ha. Perkembangan alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2011-2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Alih Fungsi Lahan Pertanian
di Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2016

No	Jenis Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Perkembangan 2011 s/d 2015		Perkembangan 2015 s/d 2016	
		Ha	Ha	Ha	Ha	ha	ha	Ha	(%/th)	Ha	(%/th)
1	Total Lahan Sawah	10,992	11,039	10,904	10,789	10,789	10,660	-66.4	-0.6	-129	-1.2
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah										
	*Tegalan/kebun	37,422	36,990	37,028	37,056	36,991	37,069	-70.6	-0.19	78	0.21
	*Perkebunan	31,834	31,834	31,874	31,924	31,947	31,983	29.8	0.09	36	0.11
	Lahan Pertanian	80,248	79,863	79,806	79,769	79,727	79,712	-107.2	-0.13	-15	-0.02

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

2) Ketersediaan air irigasi semakin menurun yang mengakibatkan seringnya bencana kekeringan dialami oleh petani. Pada tahun 2016, terjadi bencana kekeringan sekitar 497 Ha (Dinas Pertanian Kab. Buleleng, 2017).

b) Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha.

Komoditi hortikultura yang potensial dan banyak dikembangkan adalah:

- Komoditas tanaman buah-buahan: mangga (Mangga Arumanis dan Lalijiwa/Madu) dan rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, dan Gerokgak. Tanaman pisang hampir ada di semua kecamatan. Durian, wani, dan manggis di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Busungbiu. Pembibitan tanaman buah-buahan di Desa Suwug, Sinabun dan Sudaji Kecamatan Sawan; Desa Bila Kecamatan Kubutambahan; dan Desa Les Kecamatan Tejakula. Selain jenis mangga dan wani yang sudah cukup dikenal, Kabupaten Buleleng juga memiliki beberapa jenis mangga lokal meskipun dengan populasi sangat terbatas, namun potensial untuk dikembangkan, antara lain mangga/poh Bikul di Desa Menyali, mangga Amplemsari di Desa Tejakula, dan wani ngumpen di Desa Bebetin.

- Komoditi sayur-sayuran dataran tinggi di Kecamatan Sukasada, dan sayuran dataran rendah di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Seririt.
- Tanaman hias banyak dikembangkan di Kecamatan Sukasada dan Banjar.
- Tanaman biofar banyak dikembangkan di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Banjar.

Komoditas hortikultura buah yang banyak dikembangkan Kabupaten Buleleng adalah mangga, pisang, jeruk, rambutan, anggur, dan durian. Jumlah tanaman dan produksi buah-buahan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No.	Komoditas	Jumlah Tanaman (pohon)	Produksi (ton)
1.	Mangga	673.188	24.562
2.	Rambutan	283.793	10.967
3.	Jeruk	520.197	3.236
4.	Durian	119.616	1.855
5.	Pisang	958.663	23.571
6.	Anggur	360.390	9.072

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

Sedangkan, komoditas sayur mayur yang banyak diusahakan, didominasi oleh kelompok tanaman dataran tinggi, seperti kubis, kentang, dan wortel. Jenis tanaman sayuran yang memiliki adaptasi cukup luas yang juga banyak dikembangkan adalah cabai, tomat, dan bawang merah. Luas areal panen dan produksi sayur-sayuran di Kabupaten Buleleng tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Luas Areal Panen dan Produksi Sayur-sayuran
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No.	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Bawang Merah	45	208
2.	Bawang Putih	0	0
3.	Bawang Daun	3	27
4.	Kentang	14	251
5.	Kubis	143	1.045
6.	Sawi	61	483
7.	Wortel	78	2.043
8.	Kacang Panjang	0	0

No.	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
9.	Cabe	51	700
10.	Tomat	35	2.826
11.	Terung	0	0
12.	Buncis	13	383
13.	Bayam	0	0
14.	Kangkung	12	51

Sumber: Dinas Statistik Kabupaten Buleleng, 2017

Kendala utama yang dihadapi petani hortikultura di Kabupaten Buleleng adalah belum adanya kepastian pasar dan harga sangat berfluktuasi. Umumnya harga buah-buahan, seperti mangga, rambutan dan anggur sangat rendah ketika musim panen raya sehingga sangat merugikan petani.

Selain potensi kawasan peruntukan sebagaimana tersebut di atas, kelembagaan tani yang telah terbangun selama ini perlu terus dikuatkan. Potensi kelembagaan tani yang ada meliputi: 1.215 kelompok tani dan subak, serta Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang tersebar di seluruh kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perkebunan

Menurut RTRW Kabupaten Buleleng kurang lebih luasnya 20.274 Ha, meliputi pengembangan:

- Komoditas kopi Robusta pada dataran sedang dan Arabika pada dataran tinggi di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, dan Kubutambahan.
- Komoditas kakao di kawasan perkebunan dataran sedang di setiap kecamatan.
- Komoditi cengkeh dan vanili di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, Kubutambahan, dan Tejakula.
- Komoditi tembakau Virginia di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Sawan.
- Komoditi kelapa dan jambu mete tersebar di dataran rendah dan sedang hampir di setiap kecamatan.

Komoditas yang diusahakan juga cukup beragam sesuai daerah adaptasi masing-masing jenis tanaman, yaitu kopi Robusta, cengkeh, vanili, dan kakao di dataran sedang; kopi Arabika di dataran tinggi; dan kelapa dalam, tembakau

Virginia dan jambu mente di dataran rendah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No.	Komoditas	Luas Areal (Ha)*	Produksi (ton)
1.	Kopi Robusta	10.745,91	6.023,857
2.	Kopi Arabika	2.834,00	884,95
3.	Kakao	1.254,83	817,99
4.	Cengkeh	7.746,00	2.353,384
5.	Vanili	0,00	0,00
6.	Tembakau Virginia	364,00	765,00
7.	Kelapa Dalam	8.861,81	8.584,06
8.	Jambu Mete	1.737,50	374,07
Jumlah		33.544,05	19803,311

Keterangan: *) Luas Areal Indikatif pada sistem tanam campuran (tumpang sari)
Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

Jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura, pasar komoditi perkebunan relatif lebih terbuka dan memiliki harga yang relatif stabil. Khusus untuk kopi Arabika, petani kopi Buleleng sudah mampu menghasilkan biji kopi organik dan mendapat sertifikat *rainforest*. Kendala utama daam pengembangan budidaya tanaman perkebunan adalah produksi tidak menentu akibat anomali iklim.

Pada Tabel 2.9 di atas terlihat bahwa total luas areal perkebunan mencapai 33.544,05 Ha. Jika dibandingkan dengan luas kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana diarahkan dalam RTRW yang hanya 20.274 Ha, maka terlihat terdapat selisih sebanyak 14.154 Ha. Hal ini disebabkan karena sistem pertanaman tanaman perkebunan yang ada adalah campuran atau tumpangsari, sehingga dalam suatu areal lahan terdapat lebih dari satu jenis tanaman. Pendataan yang dilakukan berdasarkan jumlah tegakan tanaman yang dikonversi ke dalam luasan, menyebabkan luas tanaman seolah-olah lebih banyak daripada potensinya. Di samping itu, lahan pertanian dan perkebunan juga ada yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata sehingga dihitung dalam kawasan pariwisata.

d) Kawasan peruntukan peternakan.

Potensi ternak yang ada dan sudah berkembang selama ini adalah:

- Ternak besar: sapi, babi, kambing dan kerbau.
- Ternak unggas: ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik.

Berikut disajikan data jumlah ternak di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016.

Tabel 2.10
Jumlah Ternak di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Ayam Buras	838.229
2	Ayam Ras	308.489
3	Sapi Potong	125.439
4	Babi Bali	107.265
5	Sedelback	46.131
6	Babi Landrace	33.127
7	Kambing PE	22.190
8	Kambing Kacang	5.900
9	Kerbau	108

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

4. Kawasan peruntukan perikanan

Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang ± 157,05 km yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Desa Sumberkelompok di Kecamatan Gerokgak sampai Desa Tembok di Kecamatan Tejakula. Di dalamnya terkandung berbagai jenis ikan baik ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang panaeid, lobster, cumi-cumi, ikan tongkol maupun ikan karang yang diperkirakan potensi lestarnya sebesar 20.119 ton per tahun. Luas lahan potensial untuk budidaya laut ± 1.000 Ha, dengan rincian yaitu budidaya Kerapu, Bandeng dan Kakap sebanyak 500 Ha, Rumput Laut sebanyak 250 Ha, dan Mutiara sebanyak 250 Ha (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016).

Potensi kawasan yang dapat dikembangkan untuk perikanan mencakup:

a) Perikanan Tangkap meliputi:

- Perikanan tangkap di perairan umum (danau, sungai dan waduk) yang telah dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Banjar dan Sukasada. Potensi perairan umum di Kabupaten Buleleng mencapai luas $\pm 4.060,1$ Ha yang terdiri dari dua buah danau dengan luas 627,1 Ha, perairan sungai dan irigasi 3.433 Ha. Produksi tangkapan di perairan umum mencapai 125,9 ton pada tahun 2016.
- Perikanan tangkap di perairan laut, selama ini telah dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula. Potensi lestari penangkapan ikan diperkirakan mencapai 20.119 ton/tahun. Berdasarkan data tahun 2016, produksi perikanan tangkap di laut baru mencapai 16.509,06 ton yang berarti pemanfaatannya baru 82,05% dari potensi lestari (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016).

b) Perikanan budidaya meliputi:

- Perikanan budidaya di danau Buyan dan Tamblingan berupa karamba jaring apung.
- Perikanan budidaya kolam permanen, semi permanen maupun kolam tanah. Jenis ikan yang telah dikembangkan dan potensial terus dikembangkan adalah lele, nila, gurami, udang galah, dan ikan lainnya dengan hasil produksi budidaya sebesar 68,2 ton pada tahun 2016.
- Perikanan budidaya tambak dengan jenis yang banyak dikembangkan adalah tambak udang dan bandeng. Luas potensi lahan untuk budidaya ikan dan udang di tambak adalah ± 500 Ha. Luas pemanfaatan budidaya tambak tahun 2016 adalah seluas 167,65 Ha dengan produksi sebesar 2.468,5 ton
- Perikanan budidaya laut meliputi budidaya rumput laut di wilayah kecamatan Gerokgak, Seririt, dan

Kubutambahan, budidaya karamba jaring apung di Kecamatan Gerokgak, budidaya mutiara di wilayah Kecamatan Gerokgak, dan kecamatan Kubutambahan. Potensi budidaya laut mencapai 1.000 Ha yang terdiri dari potensi budidaya Kerapu, Bandeng, Kakap, dan ikan lainnya sebesar 500 Ha dengan pemanfaatan baru mencapai 43,84 Ha (16,48%). Potensi budidaya Mutiara 250 Ha yang pemanfaatannya baru seluas 111 Ha (44,4%) dengan produksi sebanyak 4.062 butir mutiara, 213.600 ekor sepat, dan cakang mutiara sebanyak 5,5 ton. Sedangkan potensi budidaya rumput laut seluas 250 Ha dengan pemanfaatan 10 Ha dan produksi 7,2 ton.

- Pembenihan ikan air tawar maupun payau. Jumlah pembenihan swasta untuk komoditi induk bandeng sebanyak 36 pembudidaya dan 394 orang pembenihan skala rumah tangga dengan produksi nener sebesar 6.2229.550.000 ekor. Jika ada pemasaran optimal maka potensi produksi nener bisa mencapai 10.000.000.000 ekor per tahun. Pembenihan udang vaname di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh 20 orang pengusaha. Potensi produksi benih udang vaname per tahun mencapai 10.000.000 ekor dan sampai tahun 2016, produksi budidaya udang vaname ukuran konsumsi mencapai 2.468,5 ton.

c) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- Sentra-sentra industri kecil dan industri rumahan yang mengolah hasil-hasil perikanan terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.
- Kawasan industri perikanan tersebar di kawasan pelabuhan Sangsit kecamatan Sawan dan di Kecamatan Gerokgak.
- Sentra-sentra industri kecil kemaritiman terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.

- Sentra industri garam di Kecamatan Gerokgak dan Tejakula.
- Pasar ikan di Kecamatan Buleleng, Seririt, Sawan, dan Kubutambahan.

5. Kawasan peruntukan pariwisata

Luas kawasan peruntukan pariwisata adalah sekitar 36.824 Ha atau 26,95% dari luas wilayah kabupaten, terdiri dari:

a) Kawasan pariwisata, meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu:

- 1) Kalibukbuk/Lovina, mencakup: Desa Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga dan Pemaron di Kecamatan Buleleng, dan Desa Kaliasem, Temukus, Tigawasa di Kecamatan Banjar, dan Kayu Putih Melaka kecamatan Sukasada dipromosikan sebagai bagian dari kawasan pariwisata.
- 2) Kawasan pariwisata Batu Ampar meliputi: Desa Penyabangan, Banyupoh, Pemuteran, Sumberkima, dan Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak.
- 3) Kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi: Desa Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Bondalem, Tejakula, Julah, Sembiran, dan Pacung di Kecamatan Tejakula, dan Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.

b) Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK)

Meliputi: Desa Pancasari dan Wanagiri di Kecamatan Sukasada, Desa Munduk, Gesing dan Gobleg di Kecamatan Banjar, dan Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.

c) Daya Tarik Wisata (DTW)

Meliputi: DTW wisata alam (Air Panas Banyuwedang di desa Banyuwedang Gerokgak, Air Panas Banjar di Desa Banjar, Danau Tamblingan di desa Munduk, Danau Buyan di Desa Pancasari, Air Terjun Gitgit di Desa Wanagiri, Air Terjun Bertingkat dan Air Terjun Campuhan/*Twin Waterfall* di Desa Gitgit, Air Sanih di Desa Bukti, Air Terjun Sekumpul di Desa Sekumpul, Air Terjun Bengbengan, Air Terjun Fiji, Air Terjun Bukit Lalang, Air Terjun Yeh Mampeh, Air Terjun Ikut Sampi di Desa Lemukih, dan Air Terjun Les di Desa Les, dan Air Terjun Melanting di Desa Munduk). Sementara itu, DTW budaya meliputi Gedong Kirtya dan Museum Buleleng di Kelurahan

Paket Agung, dan Ex. Pelabuhan Buleleng di Kelurahan Kampung Bugis.

Data perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan setiap tahun, hal ini berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng, seperti pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Desa Wisata
DTW, dan Kunjungan Wisata di Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Desa Wisata	10	10	10	10	10
Daya Tarik Wisata	14	14	14	14	19
Kunjungan Wisatawan	562.895	638.147	663.826	702.944	805.458

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

6. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan skala kecil, meliputi:

- a) Lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di Kecamatan Gerokgak, Kubutambahan, Tejakula, Buleleng, dan Seririt;
- b) Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- c) Kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

7. Kawasan peruntukan industri

Kawasan perindustrian mencakup kawasan:

- a) Kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang meliputi: Desa Tukad Sumaga, Tinga-Tinga, Celukan Bawang, Pengulon, dan Patas di Kecamatan Gerokgak seluas sekitar 1762 Ha.
- b) Sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya yang lokasinya tersebar pada kawasan permukiman, seperti Desa

Kalianget, Desa Sinabun, Desa Sidatapa, Desa Tigawasa, dan Desa Sari Mekar.

- c) Pengembangan agroindustri di kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar, dan Pancasari.

8. Kawasan peruntukan pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman mencakup luasan sekitar 10.960,72 Ha atau 8,03% dari luas wilayah kabupaten, meliputi:

- a) Kawasan permukiman perkotaan

Meliputi:

- 1) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di perkotaan Singaraja;
- 2) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di perkotaan Seririt;
- 3) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PKK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sangsit, dan Tejakula.

- b) Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni.

9. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman

Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, meliputi: a) fasilitas perdagangan dan jasa, b) fasilitas perkantoran dan pemerintahan, c) fasilitas pendidikan, d) fasilitas kesehatan, e) fasilitas peribadatan, dan e) fasilitas rekreasi dan olahraga.

10. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:

a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

- Kodim 1609/Singaraja di Kecamatan Buleleng.
- Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten Buleleng.
- Yonif 900/Raider di Kecamatan Buleleng
- Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di kawasan Pulaki Kecamatan Gerokgak
- Secata, Rindam IX/Udayana di Kecamatan Buleleng.
- Kompi Bantuan di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.

b) Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang luasnya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PKW, 40% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PKL dan 50% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PPK.

c) Kawasan minapolitan;

d) Kawasan agropolitan, meliputi kawasan agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu, kawasan agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar, kawasan agropolitan Depeha di Kecamatan Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula serta di kawasan agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada.

e) Kawasan andalan, merupakan penegasan dari kawasan andalan nasional meliputi kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata.

i. Wilayah Rawan Bencana

Dalam sejarahnya, wilayah Kabupaten Buleleng memiliki potensi bencana tanah longsor dan pernah pula terkena musibah gempa bumi. Secara alamiah, wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan potensi gempa tinggi karena dalam sejarahnya pernah terjadi beberapa kali gempa dahsyat yang menimbulkan kehancuran fisik dan banyak korban jiwa. Pulau Bali, termasuk Kabupaten Buleleng merupakan kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Samudra Pasifik

dan India-Australia yang masing-masing bergerak ke Barat dan ke Utara relatif terhadap Eurasia. Posisi ini menyebabkan Kabupaten Buleleng rawan gempa tektonik. Selain itu, di Bali terdapat beberapa gunung merapi aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menyebabkan gempa vulkanik. Buleleng tergolong daerah rawan bencana tanah longsor karena topografi daerahnya yang berbukit, sebagian berlereng curam, disertai curah hujan yang tinggi, dan kondisi tanah yang tergolong labil.

Selain rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi, wilayah Kabupaten Buleleng juga rawan terjadi banjir bandang, kekeringan, badai ombak, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Data sebaran kerawanan bencana banjir dan kekeringan seperti tersaji pada Tabel 2.12 dan 2.13.

Tabel 2.12
Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng

Kecamatan		Kerawanan (Ha)		Jumlah (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Buleleng	3.654	-	3.654
2	Sukasada	2.477	-	2.477
3	Seririt	2.957	-	2.957
4	Busungbiu	732	-	732
5	Tejakula	2.439	-	2.439
6	Banjar	1.980	-	1.980
7	Kubutambahan	2.721	-	2.721
8	Gerokgak	13.141	-	13.141
9	Sawan	3.341	-	3.341
Jumlah (Ha)		33.442		33.442

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 33.442 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.



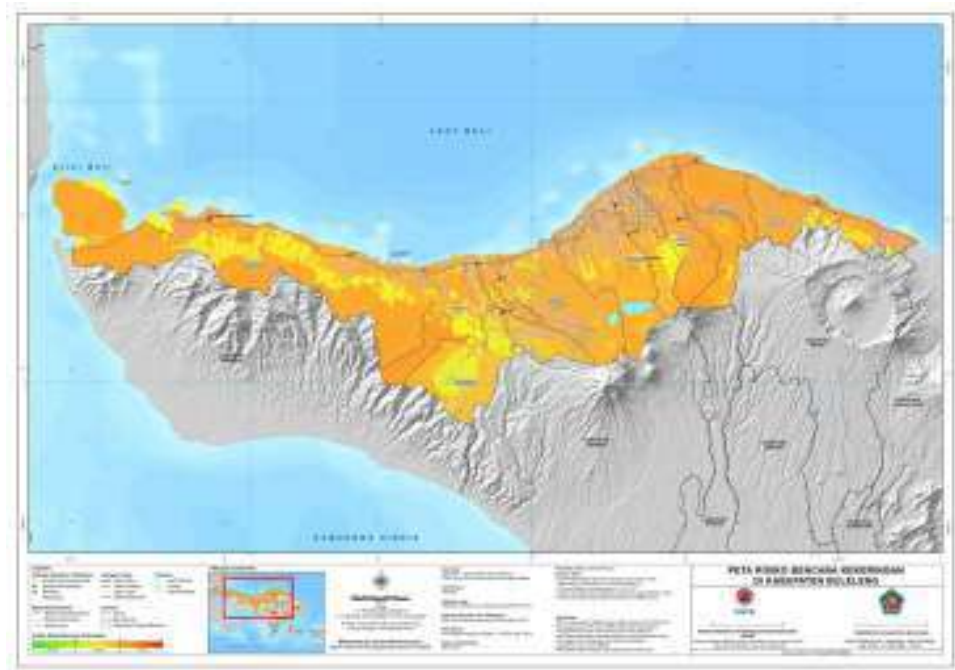
Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Buleleng

Selain bahaya banjir di musim hujan, di musim kemarau wilayah Buleleng juga memiliki potensi bencana kekeringan. Berdasarkan Tabel 2.13, terlihat secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 135.741 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Hal ini dapat digambarkan melalui sebaran bahaya kekeringan menurut kecamatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng

Kecamatan		Potensi (Ha)		Jumlah (ha)
		Rendah	Sedang	
(2)		(3)	(4)	(5)
1	Buleleng	-	4.653	4.653
2	Sukasada	-	16.809	16.809
3	Seririt	-	11.082	11.082
4	Busungbiu	-	19.650	19.650
5	Tejakula	-	9.769	9.769
6	Banjar	-	17.104	17.104
7	Kubutambahan	-	11.807	11.807
8	Gerokgak	-	35.634	35.634
9	Sawan	-	9.232	9.232
Jumlah (Ha)		-	135.741	135.741

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, 2016



Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Buleleng

j. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung Geologi meliputi :

- a) Kawasan cagar alam geologi mencakup kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti batu gamping di daerah Pulaki Kecamatan Gerokgak;
- b) Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi : kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan intrusi air laut.
- c) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air.

2.1.1.2. Aspek Demografi

a. Jumlah, Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Tahun 2020-2030 Indonesia diprediksi mendapat bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif (15-64 tahun) sangat besar yaitu mencapai 70 persen, sementara usia muda dan usia lanjut kecil, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah

satunya adalah angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 4 per 10 penduduk produktif. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.

Pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program keluarga berencana (KB). Sementara, upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2017 (hasil registrasi BPS Kabupaten Buleleng tahun 2016) berjumlah 650.12 ribu jiwa (Tabel 2.14). Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan berkisar 40.72 – 135.84 ribu jiwa, terbesar di Kecamatan Buleleng, yaitu 135.84 ribu jiwa atau 20,89%, dan terendah di Kecamatan Busungbiu (40.72 ribu jiwa atau 6,26%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 476 jiwa/km².

Tabel 2.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, KK, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah (ribu jiwa)		Jumlah (ribu jiwa)	KK	Kepada- tan Penduduk (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perem- puan			
1	Gerokgak	356,57	41.79	41.48	83.27	27.902	234
2	Seririt	111,78	35.44	36.75	72.19	23.949	646
3	Busungbiu	196,62	20.21	20.51	40.72	12.843	207
4	Banjar	172,60	35.59	36.30	71.89	22.292	417
5	Sukasada	172,93	38.06	38.45	76.49	21.906	442
6	Buleleng	46,94	67.59	68.25	135.84	37.751	2.894
7	Sawan	92,52	29.73	30.51	60.24	21.171	651
8	Kubutambahan	118,24	28.00	27.35	55.35	17.735	468
9	Tejakula	97,68	27.39	26.72	54.11	20.175	554
Jumlah		1.365,88	323.80	326.32	650.12	205.728	476

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Di samping membutuhkan lahan, setiap penduduk juga butuh air bersih. Kebutuhan air bersih yang diperlukan sekitar 60 - 100 l/orang/hari. Dengan jumlah penduduk 650.12 ribu jiwa, maka dibutuhkan air bersih sekitar 39.007,20 - 65.012,00 l/hari (39.007,20 - 65.012,00 m3/hari), ini belum terhitung untuk pertanian, peternakan, mencuci kendaraan, industri dan sebagainya.

Jika dicermati, perkembangan penduduk tingkat kabupaten cenderung meningkat selama kurun waktu 2012-2016. Namun pada tingkat kecamatan, jumlah penduduknya ada yang berfluktuasi, seperti di Kecamatan Banjar, Sukasada, Kubutambahan, dan Tejakula. Perbandingan antar waktu jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu Jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Gerokgak	80.52	81.22	81.94	82.64	83.27
2	Seririt	70.61	71.04	71.43	71.77	72.19
3	Busungbiu	40.11	40.27	40.45	40.53	40.72
4	Banjar	70.10	70.54	71.01	71.44	71.89
5	Sukasada	73.74	74.43	75.14	75.79	76.49
6	Buleleng	131.62	132.64	133.66	134.81	135.84
7	Sawan	59.24	59.54	59.79	60.03	60.24
8	Kubutambahan	54.43	54.64	54.87	55.12	55.35
9	Tejakula	53.93	53.98	54.01	54.07	54.11
Jumlah		634.3	638.3	642.3	646.2	650.12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Sebagai bahan perbandingan, jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil sensus penduduk juga mengalami peningkatan dari 321.821 jiwa pada tahun 1961 menjadi 624.125 jiwa pada tahun 2010, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.16. Jumlah penduduk tersebut lebih rendah dibanding jumlah penduduk hasil registrasi BPS Kabupaten Buleleng tahun 2010 yang mencapai 662.920 jiwa.

Tabel 2.16
Penduduk Kabupaten Buleleng
Hasil Sensus Penduduk Tahun 1961-2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk					
		1961	1971	1980	1990	2000	2010
1.	Gerokgak	29.057	42.585	53.511	60.642	67.159	78.825
2.	Seririt	38.276	48.982	57.764	62.137	62.874	69.572
3.	Busungbiu	25.096	31.544	37.173	37.637	37.372	39.719
4.	Banjar	38.158	47.357	55.380	59.867	61.443	68.960
5.	Sukasada	34.547	41.810	49.998	58.108	60.489	72.050
6.	Buleleng	61.094	74.372	94.914	109.302	110.772	128.899
7.	Sawan	39.190	43.860	50.888	54.984	54.483	58.578
8.	Kubutambahan	25.641	33.591	40.217	45.639	49.892	53.765
9.	Tejakula	30.762	39.193	47.117	51.783	53.697	53.757
Jumlah		321.821	403.294	486.962	540.099	558.181	624.125

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2012

Perkembangan penduduk tingkat kecamatan berfluktuasi karena laju pertumbuhan penduduk berfluktuasi baik berdasarkan data hasil registrasi penduduk yang dilakukan BPS Kabupaten Buleleng (Tabel 2.17), maupun hasil sensus penduduk (Tabel 2.16). Berdasarkan hasil registrasi, laju pertumbuhan penduduk pada tingkat kecamatan berkisar antara 0,06% di Kecamatan Tejakula hingga 0,92% di Kecamatan Sukasada (Tabel 2.19). Demikian halnya, hasil sensus penduduk juga bervariasi antara -0,09% (di Kecamatan Sawan hasil sensus tahun 1990-2000) hingga 3,93% (di Kecamatan Gerokgak hasil sensus penduduk tahun 1961-1970).

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2012 -2016

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)					
		2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	Rata- rata
1	Gerokgak	0,89	0,87	0,89	0,85	0,76	0,85
2	Seririt	0,56	0,61	0,55	0,48	0,59	0,56
3	Busungbiu	0,33	0,40	0,45	0,20	0,47	0,37
4	Banjar	0,69	0,63	0,67	0,61	0,63	0,64
5	Sukasada	1,02	0,94	0,95	0,87	0,92	0,94
6	Buleleng	0,87	0,78	0,77	0,86	0,76	0,81
7	Sawan	0,39	0,51	0,42	0,40	0,35	0,41
8	Kubutambahan	0,46	0,39	0,42	0,46	0,42	0,43
9	Tejakula	0,11	0,09	0,06	0,11	0,07	0,09
Buleleng		0,66	0,63	0,63	0,61	0,60	0,62

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2011-2016
(dikompilasi)

Tabel 2.18
 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng
 Hasil Sensus Penduduk Tahun 1961-2000

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk			
		1961-1970	1971-1980	1980-1990	1990-2000
1.	Gerokgak	3,93	2,55	1,29	1,06
2.	Seririt	2,50	1,83	0,73	0,12
3.	Busungbiu	2,33	1,82	0,12	-0,07
4.	Banjar	2,20	1,74	0,78	0,27
5.	Sukasada	1,94	1,99	1,51	0,42
6.	Buleleng	2,00	2,73	1,42	0,14
7.	Sawan	1,14	1,65	0,78	-0,09
8.	Kubutambahan	2,76	2,00	1,27	0,93
9.	Tejakula	2,47	2,05	0,91	0,38
Kabupaten Buleleng		2,28	2,10	1,04	0,33
Provinsi Bali		1,77	1,69	1,18	1,26
Indonesia		2,10	2,32	1,98	1,49

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng da lam Angka, 2012

Pada tingkat kabupaten, hasil registrasi BPS Kabupaten Buleleng menunjukkan laju pertumbuhan penduduk berfluktuasi antara 0,60% sampai dengan 0,63% atau rata-rata 0,62% (Tabel 2.17). Sedangkan berdasarkan hasil sensus, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng tampak cenderung menurun dari waktu ke waktu. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tingkat kabupaten lebih rendah dibanding pada tingkat provinsi maupun nasional (Tabel 2.18). Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk di Kabupaten Buleleng relatif dapat dikendalikan.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada Tahun 2012-2016, total jumlah kelahiran sebanyak 186.697 jiwa, jumlah kematian sebanyak 9,770 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 27.962 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 46.403 jiwa. Fluktuasi perubahan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi, sangat besar pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang, ditambah dengan penduduk pendatang di Kabupaten Buleleng. Besarnya penduduk yang datang ke Kabupaten Buleleng disebabkan daya tarik Kota Singaraja sebagai kota pendidikan, jasa, industri, dan perdagangan.

Tabel 2.19
Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Penduduk (Jiwa)			
		Lahir	Mati	Datang	Pindah
1.	2012	21.232	382	3.822	7.508
2.	2013	36.600	382	5.371	10.310
3.	2014	44.069	1.808	214	4.262
4.	2015	43.436	2.550	12.756	17.834
5.	2016	41.360	4.648	5.799	6.489
	Jumlah	186.697	9.770	27.962	46.403
	Rata – rata (%)	68,93	3,61	10,32	17,13

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk yang pindah ke Kabupaten Buleleng dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari penduduk yang datang dan penduduk yang mati. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kabupaten Buleleng disebabkan oleh penduduk yang lahir dengan proporsi rata-rata 68,93% per tahun lebih tinggi dibandingkan penduduk pindah, datang, dan penduduk mati.

Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2016 sebesar 0,62% maka diprediksi jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2022 mencapai 674.88 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 494 jiwa/km2, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Proyeksi Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Prediksi Jumlah Penduduk*) (jiwa)	Prediksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2017	1.365,88	654,18	479
2.	2018	1.365,88	658,27	482
3.	2019	1.365,88	662,38	485
4.	2020	1.365,88	666,52	488
5.	2021	1.365,88	670,69	491
6.	2022	1.365,88	674,88	494

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017

Keterangan : perhitungan berdasarkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Penduduk Tahun 2012-2016 sesuai data BPS Kabupaten Buleleng pada Tabel 2.17

b. Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja

Kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin dan bahkan mineral lainnya yang terkandung dalam kebutuhan pokok minimum seorang pekerja yang sesuai dengan KHL (kebutuhan hidup layak) dan syarat-syarat kesehatan yang harus dipenuhi, yang nilai pemenuhannya akan terus berubah dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat digambarkan kebutuhan hidup minimum pekerja lajang di Kabupaten Buleleng Rp. 1.047.200 pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.839.750 pada tahun 2016, sebagai standar UMK Kabupaten Buleleng. Untuk pekerja dengan tanggungan nilainya tentu akan berfluktuasi.

Di samping itu kesepakatan UMK oleh pemerintah ditetapkan selain didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja, juga memperhatikan faktor-faktor lain, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan perusahaan dan dunia usaha lainnya, dan tingkat pengupahan di daerah lain.

c. Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Mayoritas penduduk Kabupaten Buleleng bekerja pada sektor primer, terutama pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kondisi tersebut tampak konsisten hingga tahun 2016, walaupun dari sisi jumlah tampak berfluktuasi. Lapangan usaha yang juga menyerap angkatan kerja cukup banyak dan terus bertambah adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha secara lengkap tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Buleleng
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015

No.	Jenis Kegiatan	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, perikanan dan Peternakan	124.890	103.308	109.700	123.397
2.	Pertambangan dan Penggalan	-	1.630	1.644	1.459
3.	Industri pengolahan	30.327	31.098	33.209	32.293
4.	Listrik, gas dan air	344	375	357	1.394
5.	Bangunan	24.683	39.769	30.456	22.371
6.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	87.018	94.787	88.324	93.495

No.	Jenis Kegiatan	2012	2013	2014	2015
7.	Angkutan, komunikasi, dan perdagangan	10.699	7.284	5.133	8.396
8.	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan/tanah	9.618	10.889	9.514	11.408
9.	Jasa kemasyarakatan lainnya	60.965	56.283	55.257	51.113

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PRDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.22
 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan
 Usaha Tahun Dasar 2010 (%), 2011 - 2016

No	Sektor		Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.76	2.85	4.90	5.08	3.16
2	B	Pertambangan dan Penggalian	16.05	8.20	-0.23	-7.70	9.12
3	C	Industri Pengolahan	6.43	9.46	9.26	7.59	3.48
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.31	8.97	6.67	4.31	6.16
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.43	6.34	7.27	2.05	4.21
6	F	Konstruksi	19.62	6.77	1.75	4.91	6.65
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.20	9.89	7.29	7.62	3.65
8	H	Transportasi dan Pergudangan	5.53	7.59	9.33	1.87	2.04
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.36	7.91	6.78	6.14	9.17
10	J	Informasi dan Komunikasi	8.35	6.57	7.11	3	9.85
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.27	14.35	9.66	5.04	5.33
12	L	Real Estat	6.61	7.77	8.94	3.03	2.45
13	M,N	Jasa Perusahaan	2.27	10.05	7.63	6.96	6.44
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.26	0.67	10.89	6.57	6.24
15	P	Jasa Pendidikan	0.49	14.62	10.76	9.09	11.58
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.24	13.65	12.56	8.52	8.35
17	R,S, T,U	Jasa lainnya	5.14	4.93	7.84	7.61	8.28
		PDRB	6.78	7.15	6.96	6.12	6.01

Sumber: Badan Pusat Stastik, 2017

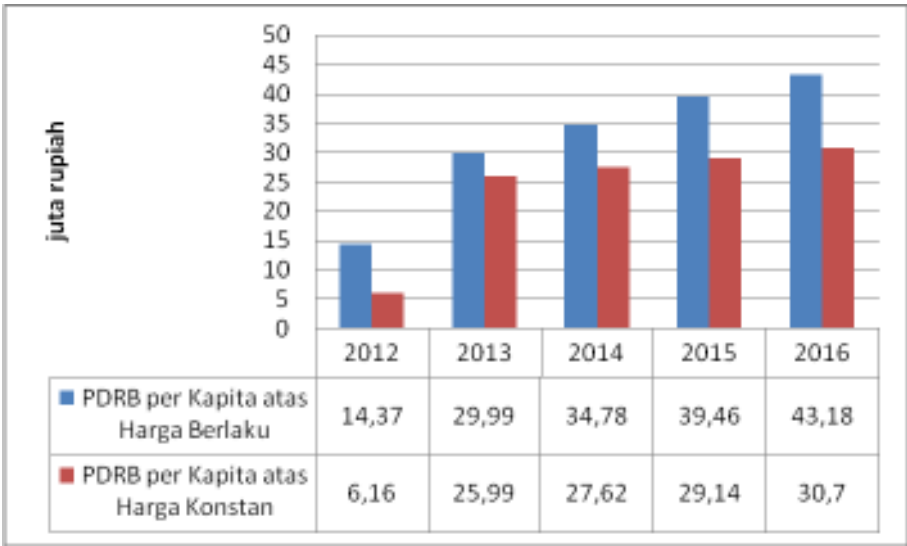
Secara fundamental, perekonomian Kabupaten Buleleng mampu melepaskan dari tekanan ekonomi global (krisis finansial) dengan penerapan strategi *Pro Growth*. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 6,56% rata-rata per tahun. Prestasi ini cukup membanggakan karena berada di atas pencapaian rata-rata Provinsi Bali dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh pertumbuhan masing-masing sektor yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tinggi, (ii) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sedang, dan (iii) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang rendah. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi, meliputi antara lain: sektor jasa pendidikan (11,51%), jasa kesehatan dan kegiatan social (10,77%), jasa keuangan dan asuransi (8,59%), informasi dan komunikasi (8,33%), jasa perusahaan (7,77%).

Sementara sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sedang adalah sektor penyediaan akomodasi (7,50%), industri pengolahan (7,45%), perdagangan besar dan eceran (7,11%), dan jasa lainnya (7,16%). Sektor tersebut disusul oleh sektor lainnya; pengadaan listrik dan gas (6,54%), dan administrasi pemerintahan (6,09%), dan sektor real estat (5,55%), serta transportasi dan pergudangan (5,20%). Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang lambat, antara lain: konstruksi (5,02%), pertanian (4,00%), dan yang paling rendah adalah pertambangan (2,35%).

b. PDRB per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir telah memposisikan Kabupaten Buleleng sebagai daerah penyumbang terbesar ketiga (*the biggest three*) setelah Badung dan Denpasar dalam pembentukan Produk Domestik Regional (PDRB) Bali, dimana sumbangan kontribusi Kabupaten Buleleng mencapai sekitar 14,8% (tahun 2016). Perkembangan ini memberikan indikasi yang sangat positif bagi terciptanya peluang masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih besar. Pada tahun

2012, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng yang didekati atas harga berlaku mencapai sekitar Rp. 14,37 juta meningkat menjadi sekitar Rp 43,18 juta pada tahun 2016. Sedangkan, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng yang didekati atas harga konstan pada tahun 2012 mencapai sekitar Rp. 6,16 juta meningkat menjadi sekitar Rp 30,70 juta pada tahun 2016. Walaupun secara absolut, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng masih berada di bawah rata-rata provinsi, akan tetapi mengalami peningkatan yang sangat tajam, kecuali pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan.



Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.6
PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

c. Struktur Ekonomi Daerah

Berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, struktur ekonomi Kabupaten Buleleng masih bertumpu pada peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan PDRB, di mana pada tahun 2016, sektor ini telah memberi kontribusi sebesar 22,68%, walaupun kontribusinya relatif dinamis. Dalam waktu sama, beberapa sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB antara lain; penyediaan akomodasi dan makanan minuman (18,32%), perdagangan besar dan eceran (11,02%), dan konstruksi (8,37%).

Sementara itu, sektor lain yang memberi sumbangan yang sedang antara lain; sektor jasa pendidikan (7,23%), industri pengolahan (5.88%), infomasi dan Komunikasi (5,32%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,14%), Real Estat (4,48%), Jasa Keuangan dan Asuransi (4,25%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,08%), Jasa Lainnya (1,77%), dan Pertambangan & penggalian (1,31%). Sedangkan sektor yang memberi kontribusi kecil di bawah 1,31%, meliputi: sektor transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, , dan jasa perusahaan.

Kondisi ini memberi indikasi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi pergesaran struktur ekonomi yang mengarah pada struktur ekonomi modern yang ditopang oleh pertanian yang tangguh.

Tabel 2.23
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Sektor		Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.28	22.74	22.04	22.87	22.68
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.44	1.45	1.40	1.21	1.31
3	C	Industri Pengolahan	5.78	5.79	5.87	5.97	5.88
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.08	0.10	0.12	0.14
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
6	F	Konstruksi	9.32	9.18	8.55	8.55	8.37
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.40	11.27	11.42	11.44	11.02
8	H	Transportasi dan Pergudangan	1.27	1.30	1.34	1.25	1.18
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.73	16.57	17.79	17.92	18.32
10	J	Informasi dan Komunikasi	5.74	5.38	5.17	5.21	5.32

No	Sektor		Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
			2012	2013	2014	2015	2016
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.33	4.59	4.62	4.36	4.25
12	L	Real Estat	5.21	5.19	5.17	4.78	4.48
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.63	0.63	0.63	0.63	0.66
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.97	5.37	5.39	5.11	5.14
15	P	Jasa Pendidikan	6.06	6.57	6.62	6.69	7.25
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.89	1.98	2.01	2.01	2.08
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1.72	1.74	1.74	1.74	1.77
		PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

d. Potensi Ekonomi Daerah

Dengan melihat pertumbuhan (*growth*) dan kontribusi (*share*) masing-masing sektor dalam perekonomian dapat diidentifikasi sektor potensial yang dapat diandalkan untuk menopang kehidupan dan penghidupan masyarakat Buleleng pada masa-masa yang datang. Dengan pendekatan ini, peran sektor dapat diklasifikasikan ke dalam:

- Sektor Sangat Potensial, yaitu sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa pendidikan, serta industri pengolahan.
- Sektor Cukup Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi, akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.
- Sektor Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan rendah akan tetapi memiliki kontribusi yang besar

terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor konstruksi.

- Sektor Kurang Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, real estat, transportasi dan pergudangan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalan.

Sejalan dengan itu, dengan menggunakan pendekatan *location quotient* (LQ) dapat teridentifikasi sektor unggulan daerah. Apabila nilai LQ suatu sektor lebih besar dari 1 (satu), maka sektor tersebut dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan. Dengan demikian, sektor unggulan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2016 adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Jasa Pendidikan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Lainnya, serta Pertambangan dan Penggalan.

e. Dampak Perkembangan Ekonomi

Momentum kebangkitan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir merupakan modal bagi pengembangan lebih lanjut. Tantangan yang dihadapi masa-masa yang akan datang adalah bagaimana mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan.

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
x = 0	Merata sempurna
0 < x < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < x < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
0,5 < x < 1	Tingkat ketimpangan tinggi
x = 1	Tidak merata sempurna (diklasifikasi secara satu pihak)

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna,

atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sementara Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang sempurna.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dapat dikatakan berkualitas karena pertumbuhan yang tinggi disertai dengan distribusi yang lebih merata, dimana pada tahun 2012 koefisien gini adalah sebesar 0,333 mengalami kenaikan sedikit menjadi 0,336 tahun 2016, masih berada pada tingkat ketimpangan yang rendah. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga mengalami perununan dari tahun ke tahun. Demikian pula, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan, di mana pada tahun 2012 mencapai 68,29 meningkat menjadi 70,65 pada tahun 2016. Secara lengkap koefisien gini rasio digambarkan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.24

Gini Rasio Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Gini Ratio Buleleng	0,3330	0,3755	0,3931	0,3373	0,3360

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

f. Laju Inflasi

Kemampuan daya beli masyarakat, terhadap konsumsi barang ekonomi, dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara sederhana, inflasi definisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama dalam periode waktu tertentu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama. Data inflasi jangka panjang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat jangka panjang di daerah. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata di Kota Singaraja, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25
 Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2014-2017

Kelompok Inflasi	Kelompok Inflasi Singaraja (Persen)			
	2014	2015	2016	2017
Bahan Makanan	8.09	4.74	9.98	-3.39
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	15	4.22	4.08	3.15
Perumahan	9.97	3.33	1.83	8.44
Sandang	6.25	7.73	8.47	6.53
Kesehatan	1.45	2.61	4.65	5.02
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	9.37	3.29	6.24	7.48
Transpor dan Komunikasi	13.36	-5.23	-3.48	5.85
Umum	10.32	2.97	4.57	3.38

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca masyarakat dapat mempengaruhi kecepatan masyarakat dalam memperoleh informasi, khususnya terkait dengan program-program pembangunan. Data menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kabupaten Buleleng umur 15 tahun ke atas, dengan menunjukkan melalui kemampuan membaca dan menulis huruf latin dengan tanpa memahami apa yang ditulis dan dibaca, mengalami perkembangan secara fluktuatif, dan jika dibandingkan dari tahun 2012, yaitu 98,81% mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99,36% dari jumlah penduduk seluruh Kabupaten Buleleng yang berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.26
 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Buleleng
 Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun	394.900	397.300	399.900	403.400	406.100
2	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	390.188	393.488	396.088	400.498	403.498

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
3	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulis	4.712	3.812	3.812	2.902	2.602
4	Angka Melek Huruf (%)	98,81	99,04	99,05	99,28	99,36

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Angka Melek Huruf dapat dipengaruhi oleh minat baca, selanjutnya minta baca masyarakat dapat dipengaruhi oleh jumlah bacaan menarik yang tersedia di Kabupaten Buleleng, baik melalui perpustakaan berbagai instansi sekolah, kantor, perguruan tinggi, maupun perpustakaan keliling. Data menunjukkan bahwa dari sisi jumlah bahan bacaan selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata persentase peningkatan mencapai 0,67% dihitung dari tahun 2012-2016, dan jumlah buku pada tahun 2016 adalah mencapai 21.103 buku, terdiri dari karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, kesenian, hiburan dan olah raga, kesusastraan, sejarah dan geografi, dengan jumlah perpustakaan 322 buah, terdiri dari 1 perpustakaan umum, 210 perpustakaan SD, 34 buah untuk di SMP, 20 buah perpustakaan untuk tingkat SMA, Desa/Kelurahan 52 buah dari 149 desa kelurahan, 6 buah perpustakaan perguruan tinggi dari 60 perguruan tinggi. Dilihat dari jumlah perpustakaan dengan kantor layanan perpustakaan masih belum mencukupi, dari 753 kantor yang perlu dilayani, baru tersedia perpustakaan 322 buah atau sekitar 42,76% (Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Buleleng, 2017).

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal dapat dilihat dari kualitas dan angka harapan lama sekolah, semakin tinggi maka makin tinggi usia sekolah yang dicapai oleh penduduk. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Data menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten

Buleleng mengalami kenaikan dari tahun 2012, yaitu 11,75 tahun menjadi 12,61 tahun pada tahun 2016. Dengan demikian, usia sekolah penduduk meningkat, demikian juga jika dilihat dari rata-rata Lama Sekolah (RLS), dari 6,51 tahun pada tahun 2012 menjadi 6,85 pada tahun 2016, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali, yaitu 8,36, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	HLS dan RLS	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Harapan Sekolah	11,75	11,84	12,01	12,37	12,61
2	Rata-rata Lama Sekolah	6,51	6,63	6,66	6,77	6,85

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 33/05/51/Th.II, 5 Mei 2017

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan budaya di Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari perkembangan dan peradaban budaya Hindu, di mana hal ini disebabkan bahwa mayoritas penduduk beragama Hindu yaitu 89,37% dari jumlah penduduk atau sekitar 650.100 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk tahun 2016. Dengan demikian, porsi pelaksanaan adat istiadat di masyarakat Buleleng, terutama yang beragama Hindu berpengaruh pada beberapa isu strategis di Buleleng, yaitu Seni Budaya. Di bidang kesenian, dari 9 (sembilan) kecamatan terdapat 51 jenis kesenian dan jumlah kelompok kesenian mencapai 2.457 kelompok, yang tersebar di Kabupaten Buleleng (Disbudpar, Buleleng Dalam Angka, 2017), memerlukan pembinaan secara kontinu dan harus disediakan anggaran yang memadai baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku kesenian. Dalam mendukung pengembangan dan pemertahanan budaya Kabupaten Buleleng juga memiliki 169 Desa Adat (*Pakraman*), yang dapat secara konsisten mempertahankan seni dan Kebudayaan di Kabupaten Buleleng. Perkembangan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Buleleng dari 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun
2012-2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	2.232	2.232	2.235	2.452	2.457
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	130	134	136	138	138
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	147	152	161	178	198
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	72	89	89	89	89

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Dilihat persebaran di wilayah kecamatan, tentang perkembangan seni, budaya dan olah raga pada data tahun 2016, kepemilikan atas seni, budaya dan olah raga ini sangat bervariasi, dan tidak tersebar secara merata. Pada jumlah group kesenian per 1000 penduduk Kecamatan Sawan memiliki paling banyak (341 group) dan paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Tejakula yaitu 169 group kesenian. Sedangkan klub olah raga yang paling banyak ada di Kecamatan Buleleng mencapai 53 klub dan paling sedikit Kecamatan Busungbiu yaitu 14 klub. Keberadaan gedung dan sarana kesenian dan olah raga juga sangat berpengaruh pada perkembangan seni dan kegiatan olah raga penduduk. Gedung kesenian paling banyak berada di Kecamatan Buleleng, paling sedikit di Kecamatan Gerokgak. Sedangkan, gedung olah raga paling banyak ada di Kecamatan Seririt, dan dua kecamatan tidak memiliki gedung olah raga, yaitu Kecamatan Gerokgak dan Busungbiu, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Gerokgak	298	8	22	10
2	Seririt	308	21	20	8
3	Busungbiu	215	16	14	8
4	Banjar	262	17	19	8
5	Sukasada	296	19	18	6
6	Buleleng	297	24	53	24
7	Sawan	341	10	18	9
8	Kubutambahan	271	13	16	9
9	Tejakula	169	10	18	7
	Jumlah	2457	138	198	89

Sumber: BPS (diolah)

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	80.581	74.365	69.370	70.581	70.228
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	82.210	75.700	69.370	70.950	70.410
1.3.	APS SD/MI	98,02%	98,24%	100%	99,48%	99,74%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	31.934	31.105	34.146	38.267	35.853
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	33.240	32.750	36.100	39.350	37.190
2.3.	APS SMP/MTs	96,07%	94,98%	94,59%	97,25%	96,40%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Buleleng, persentase pencapaian APS SD/MI menunjukkan mengalami peningkatan, dimana tahun 2012 sebesar 98,02% dan pada tahun 2016 mencapai 99,74%. Demikian juga untuk kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dimana persentase pencapaian APS SMP/MTs tahun 2012 sebesar 96,07% dan pada tahun 2016 mencapai 99,40%.

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kecamatan
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk kelompok umur usia 7-12 tahun	APS SD/MI (%)	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk kelompok umur usia 13-15 tahun	APS SMP/MTs (%)
1	Gerokgak	8.363	9.389	89,07	3.644	4.654	78,30
2	Seririt	7.538	7.932	95,03	3.530	4.096	86,18
3	Busungbiu	4.851	4.053	119,69	2.409	2.172	110,91
4	Banjar	6.620	7.566	87,50	4.466	3.805	117,37
5	Sukasada	8.127	8.551	95,04	3.226	4.470	72,17
6	Buleleng	14.426	13.937	103,51	8.790	7.913	111,08
7	Sawan	6.991	6.673	104,77	3.336	3.521	94,75
8	Kubutambahan	7.024	6.358	110,47	3.322	3.357	98,96
9	Tejakula	6.288	5.951	105,66	3.130	3.202	97,72
	Jumlah	70.228	70.410	99,74	35.853	37.190	96,40

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Jika dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) per kecamatan di Kabupaten Buleleng, maka dapat disampaikan bahwa angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD/MI, Kecamatan Banjar mencapai APS yang paling rendah yaitu 87,50%, sedangkan yang paling tinggi dicapai oleh Kecamatan Busungbiu dengan APS mencapai 119,69%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APS yang paling rendah adalah Kecamatan Sukasada, yaitu 72,17% dan APS tertinggi dicapai oleh Kecamatan Banjar, yaitu mencapai 117,37%.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/MI atau SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk

usia dasar (7-12 tahun) dan Umur 13-15 Tahun (SMP/MTs) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan bersangkutan. Tabel rasio ketersediaan sekolah disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.32
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	504	503	504	503	503
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	82.210	75.700	69.370	70.950	70.410
1.3.	Rasio (%)	61,31	66,45	72,65	70,89	71,44
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	84	84	84	84	85
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	33.240	32.750	36.100	39.350	37.190
2.3.	Rasio (%)	25,27	25,65	23,27	21,35	22,86

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Dari data yang ada untuk tingkat umur 7-12 tahun daya tampung sekolah terhadap murid sudah memadai dengan rasio 61,31% sampai dengan 72,65%, dan berada di atas rasio ideal (52) per 10.000 penduduk usia 7-12. Sedangkan untuk tingkat umur 13-15 tahun mengalami perubahan secara fluktuatif berkisar rasio 21,35% sampai dengan 25,65% dan masih berada di bawah rasio ideal 52 atau tersedia 52 SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15, artinya ketersediaan gedung sekolah belum memadai. Sementara itu, distribusi ketersediaan sekolah dan penduduk usia menurut kecamatan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah per Kecamatan
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 13-15 tahun	Rasio
1	Gerokgak	57	9.388	60,72	12	4.652	25,80
2	Seririt	54	7.932	68,08	9	4.095	21,98
3	Busungbiu	46	4.053	113,50	7	2.171	32,24
4	Banjar	60	7.566	79,30	7	3.804	18,40
5	Sukasada	62	8.551	72,51	9	4.470	20,13

No	Kecamatan	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 13-15 tahun	Rasio
6	Buleleng	83	13.937	59,55	20	7.913	25,27
7	Sawan	48	6.673	71,93	6	3.521	17,04
8	Kubutambahan	46	6.358	72,35	8	3.357	23,83
9	Tejakula	47	5.952	78,97	7	3.207	21,83
	Jumlah	503	70.410	71,44	85	37.190	22,86

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk sekolah untuk kelompok usia 7-12, rasio paling rendah dicapai oleh Kecamatan Buleleng yaitu 59,55 dan rasio tertinggi dicapai oleh Kecamatan Busungbiu, yaitu 113,50. Sedangkan untuk tingkat usia 13-15 tahun rasio berkisar 18,40-32,24 (Disdikpora Kabupaten Buleleng, 2017).

c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid dapat berpengaruh pada kualitas pelaksanaan belajar mengajar yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hasil pendidikan sekolah. Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	4.429	5.884	5.420	4.656	4.359
1.2.	Jumlah Murid	74.896	71.451	72.155	68.681	68.558
1.3.	Rasio	1 : 17	1 : 12	1 : 13	1 : 15	1 : 16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.003	2.190	1.998	1.280	1.893
2.2.	Jumlah Murid	30.064	31.550	29.599	34.107	33.654
2.3.	Rasio	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 27	1 : 18

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2012 hingga 2016 tampak berfluktuasi pada kisaran 1: 12 sampai dengan 1: 17. Sementara itu, data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan

SMP/MTs tampak lebih tinggi, yaitu antara 1: 14 sampai 1: 27. Hal ini menunjukkan rasio guru dan murid di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi harapan, yaitu 1: 20 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan 1: 36 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs.

Sementara itu, jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar per kecamatan di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio	Jumlah Guru SMP/MTs	Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio
1	Gerokgak	387	7.926	1 : 20	162	3.410	1 : 21
2	Seririt	476	7.243	1 : 15	168	3.237	1 : 19
3	Busungbiu	368	4.215	1 : 11	122	2.241	1 : 18
4	Banjar	500	7.522	1 : 15	232	4.351	1 : 19
5	Sukasada	548	7.925	1 : 14	186	2.793	1 : 15
6	Buleleng	902	14.311	1 : 16	513	8.542	1 : 17
7	Sawan	433	6.700	1 : 15	193	3.087	1 : 16
8	Kubutambahan	386	6.596	1 : 17	190	3.162	1 : 17
9	Tejakula	359	6.120	1 : 17	127	2.831	1 : 22
	Jumlah	4.359	68.558	1 : 16	1.893	33.654	1 : 18

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Dilihat dari distribusi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, masih merata jika dibandingkan dengan jumlah rasio minimal ideal adalah 1:20, rata-rata rasio perbandingan guru dan murid masih di bawah rasio ideal, artinya jumlah guru sudah memadai namun masih perlu didistribusikan secara merata.

2) Kesehatan

Di bidang kesehatan juga merupakan indikator penting dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih baik. Dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Buleleng mengalami kemajuan setiap tahun. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). Tingkat pencapaian IPM Buleleng yaitu 70,65 pada 2016 ini masuk dalam kategori IPM tinggi, namun masih berada di bawah IPM Provinsi Bali, yaitu 73,65.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kabupaten Buleleng ada beberapa indikator yang dapat dilihat, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian IBU (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), sanitasi kesehatan, pelayanan air bersih dan Perilaku yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS). AHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses dibidang pelayanan kesehatan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 mencapai 70,97 namun masih berada di bawah AHH Provinsi Bali.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2017 (diolah)

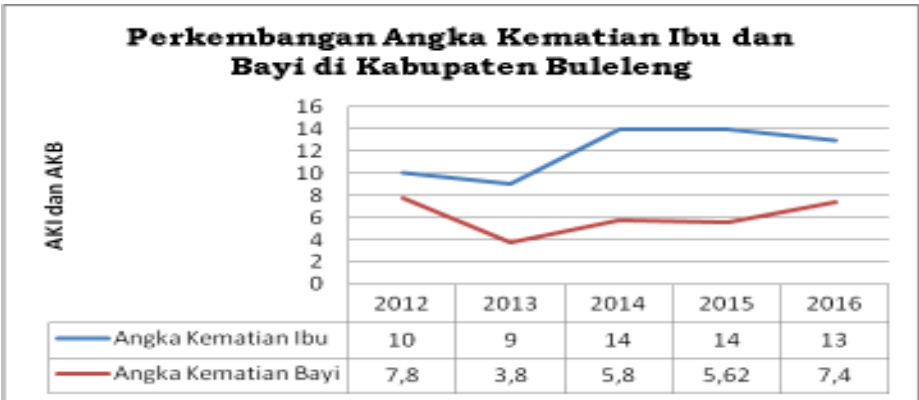
Gambar 2.7
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Angka Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2012-2016

b. Angka Kematian Ibu, Anak dan Balita

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator kesehatan yang cukup penting, dengan ini dapat diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. AKI merefleksikan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan, yang dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi

pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan prenatal dan obstetric. Dilihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, AKI di Kabupaten Buleleng berkembang secara bervariasi dan cenderung menurun dari tahun 2013-2016, artinya keselamatan dan kesehatan Ibu melahirkan makin baik. Angka kematian ibu pada tahun 2016, adalah 115/100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng).

Demikian juga angka kematian bayi selalu diupayakan agar dapat diturunkan, dimana Angka Kematian Bayi laki-laki 8,1 per 1000 KH dan perempuan sebesar 6,7 per 100 KH, sehingga angka kematian bayi menjadi 7,4 per 1000 KH. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA), merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Jumlah Kelahiran hidup tahun 2016 adalah 11.287 dan 62 orang balita yang meninggal, jika dibandingkan dengan standar MDGs, maka kematian balita di Kabupaten Buleleng dalam kategori sedang (20-70), dengan demikian masih perlu adanya tindakan nyata agar bisa mencapai kategori rendah (<20). Berikut grafik tentang AKI dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Buleleng.

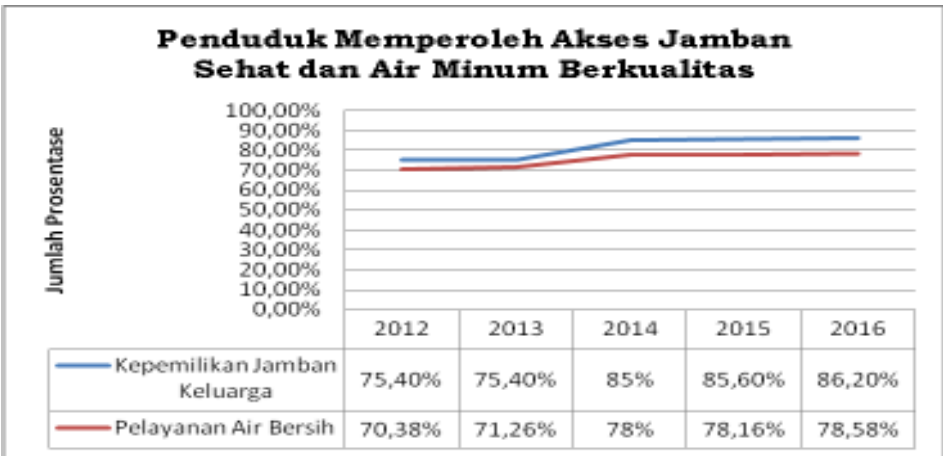


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Gambar 2.8
Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi
di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

c. Sanitasi, Air Bersih dan PHBS

Salah satu Indikator kesehatan adalah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Kedua kriteria ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR, 2017

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Memperoleh Akses Jamban Sehat dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Indikator kesehatan berikutnya adalah Penduduk yang berperilaku hidup sehat (PHBS). Rumah tangga dikatakan berPHBS adalah RT yang memiliki beberapa kriteria PHBS, meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menggunakan air bersih, jamban sehat, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan lain-lain di mana di Kabupaten Buleleng persentasenya telah mencapai 74% tahun 2016.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Kondisi Jalan

Prasarana infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi empat sesuai dengan status kewenangannya, yaitu jalan nasional/jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan non status. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 620/845/HK/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan

sebagai Jalan Kabupaten adalah sepanjang 1.119,94 km pada Tahun 2017. Panjang ini bertambah dari jumlah panjang jalan pada tahun 2016 sebesar 999,950 km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 620/809/HK/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Persentase kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 69,71% atau sepanjang 780,73 km mantap. Jumlah ini berkurang dari persentase tahun 2016 sebesar 76,61% atau sepanjang 766,088 km serta persentase pada Tahun 2015 sebesar sebesar 74,47% atau sepanjang 744,63 km. Penurunan persentase mantap sebagai akibat dari usia ketahanan struktur jalan yang sudah menurun dan juga bertambahnya jumlah panjang jalan kabupaten pada tahun 2017 dimana kondisi pada jalan yang bertambah tersebut belum mantap. Perkembangan panjang jalan dan kondisi jalan pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten
Buleleng Tahun 2012-2016

	Kondisi Jalan Kabupaten	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi baik (km)	257,974	317,786	461,757	517,280	644,965
	Persentase (%)	29,38	36,17	52,59	51,73	64,50
2	Kondisi sedang (km)	289,182	277,070	221,445	227,35	121,123
	Persentase (%)	32,93	31,55	25,22	22,74	12,11
3	Kondisi Rusak Ringan (km)	216,356	158,966	114,414	133,562	172,876
	Persentase (%)	24,64	18,10	13,03	13,36	17,29
4	Kondisi Rusak Berat (km)	114,680	124,371	80,576	121,758	60,986
	Persentase (%)	13,06	14,16	9,18	12,18	6,10
5	Kondisi mantap (km)	547,156	594,856	683,202	744,63	766,088
	Persentase (%)	62,30	67,74	77,80	74,47	76,61
Total Panjang Jalan (km)		878,192	878,192	878,192	878,192	999,950

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017

b) Kondisi Jembatan

Prasarana infrastruktur jembatan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi tiga yaitu jembatan nasional, jembatan provinsi dan jembatan kabupaten. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jembatan kabupaten yang berjumlah 122 buah, dengan total panjang jembatan sebesar 1.224,85 m pada Tahun 2016 namun pada Tahun 2017 panjang jembatan bertambah sepanjang 7 m dari panjang jembatan yang sebelumnya sebagai

akibat dari penggantian jembatan Tukad Mendaum di Kecamatan Banjar dari 27 m menjadi 34 m sehingga panjang jembatan pada Tahun 2017 menjadi 1.231,85 m.

Persentase kondisi jembatan Kabupaten Buleleng sampai dengan akhir tahun 2016 adalah 73,86% atau sepanjang 904,65 m kondisi mantap, menurun dari kondisi mantap 4 tahun sebelumnya. Sedangkan persentase kondisi jembatan Kabupaten Buleleng sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 78,44% atau sepanjang 966,25 m kondisi mantap. Lebih jelasnya kondisi jembatan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

	Kondisi Jembatan Kabupaten	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi baik (m)	442,50	456,50	456,50	471,80	454,80
	Persentase (%)	36,83	37,27	37,27	38,52	37,13
2	Kondisi sedang (m)	747,85	757,35	757,35	742,05	449,85
	Persentase (%)	62,25	61,83	61,83	60,58	36,73
3	Kondisi Rusak Ringan (m)	5,00	5,00	5,00	5,00	320,20
	Persentase (%)	0,41	0,41	0,41	0,41	26,14
4	Kondisi Rusak Berat (m)	6,00	6,00	6,00	6,00	-
	Persentase (%)	0,49	0,49	0,49	0,49	-
5	Kondisi mantap (m)	1.190,35	1.213,85	1.213,85	1.213,85	904,65
	Persentase (%)	99,08	99,10	99,10	99,10	73,86
Total Panjang Jembatan (m)		1.201,35	1.224,85	1.224,85	1.224,85	1.224,85

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017

c) Kondisi Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Sistem PDAM dan Sistem Swakelola Masyarakat dalam bentuk lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) di tingkat desa/kelompok. Dari jumlah 148 desa/kelurahan, 67 desa/kelurahan sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM dan sisanya 81 desa melalui UPS/KPS di tingkat desa/kelompok. Dari 81 desa yang dilayani melalui UPS/KPS terdapat sekitar 25 Kelurahan/Desa di samping dilayani oleh PDAM juga dilayani melalui UPS/KPS.

Layanan air minum di Kabupaten Buleleng yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Buleleng adalah PDAM Kabupaten Buleleng, Cabang Celukan Bawang, Cabang Seririt, Unit Sambirenteng, Cabang Air Sanih, Cabang Busungbiu, Cabang

Pancasari. Rendahnya cakupan pelayanan PDAM Buleleng diakibatkan karena faktor topografi wilayah yang berbukit dan permukiman penduduk yang menyebar membuat PDAM Buleleng belum mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Buleleng.

Pelayanan air minum perpipaan Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng meningkat menjadi 78,58% dari persentase 4 tahun sebelumnya, dengan tingkat pelayanan air minum yang dikelola PDAM sebesar 32,61% dan PAM Desa sebesar 45,97% dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng

Persentase pelayanan air minum non perpipaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mengalami penurunan dari 4 tahun sebelumnya menjadi 21,42%, hal ini terjadi karena sudah ada peralihan penggunaan air minum dari sistem non perpipaan ke sistem perpipaan.

Hingga akhir Tahun 2017 pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan mencapai 82,97%. Sedangkan persentase pelayanan air minum non perpipaan di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan menjadi 17,03%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
 Pelayanan Air Minum
 di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Pelayanan Air Minum	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perpipaan (jiwa)	466.569	481.395	499.088	499.377	504.490
	Persentase (%)	70,38	71,26	78,00	78,16	78,58
	a. PDAM	188.081	178.529	204.733	204.733	209.245
	Persentase (%)	28,37	26,43	31,94	31,94	32,61
	b. PAM Desa	278.488	302.866	294.355	294.355	295.245
	Persentase (%)	42,01	44,83	46,06	46,20	45,97
2	Non Perpipaan (jiwa)	196.351	194.118	146.540	140.695	137.550
	Persentase (%)	29,62	28,74	22,00	21,84	21,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buleleng

d) Irigasi

Jaringan irigasi yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng melayani 132 buah Daerah Irigasi (DI) dengan berbagai kondisi.

Kondisi jaringan irigasi baik pada tahun 2016 adalah sebesar 69,32% dimana angka ini meningkat dari kondisi tahun 2015

sebesar 66,19%. Sedangkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sebesar 71,20%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Kondisi Jaringan Irigasi
di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Kondisi Jaringan Irigasi	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kondisi Baik (%)	65,83	67,54	65,64	66,19	69,32
Kondisi Rusak Ringan (%)	24,61	24,58	25,85	25,35	21,46
Kondisi Rusak Berat (%)	9,56	7,88	8,51	8,46	9,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buleleng

e) Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Buleleng berada pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) jalan nasional, rumija jalan provinsi dan rumija jalan kabupaten dengan total panjang pada tahun 2016 adalah 1.210.932 meter. Dari data saluran drainase tersebut diketahui bahwa kewenangan penanganan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) sekitar 311.500 m, kewenangan pemerintah provinsi sebesar 211.760 m dan kewenangan pemerintah kabupaten adalah 687.672 m. Dari kewenangan Kabupaten sepanjang 687.672 m meter, yang berada dalam kondisi baik sebesar 19,62%, dalam kondisi sedang sebesar 27,77% dan kondisi buruk sebesar 52,60%. Sedangkan pada Tahun 2017 total panjang saluran drainase bertambah menjadi 1.214.106 meter dengan kewenangan penanganan oleh B2PJN sekitar 25,66%, kewenangan pemerintah provinsi 17,52% dan kewenangan pemerintah kabupaten 56,82%. Pada tahun 2017 infrastruktur saluran drainase dalam kondisi baik hanya 19,83%, sedangkan kinerja pelayanan penanganan banjir oleh tenaga rutin Dinas PUPR sudah diatas 75% titik banjir yang dapat ditangani.

Data panjang dan kondisi saluran drainase di Kabupaten Buleleng dari tahun 2012 s/d 2016 tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.40
 Panjang dan Kondisi Drainase
 di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Kondisi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%
A	Saluran Drainase (total terbuka dan tertutup)										
1	Baik	237.616	19,62%	237.616	19,62%	237.616	19,62%	237.616	19,62%	237.616	19,62%
2	Sedang	336.299	27,77%	336.299	27,77%	336.299	27,77%	336.299	27,77%	336.299	27,77%
3	Buruk	637.017	52,61%	637.017	52,61%	637.017	52,61%	637.017	52,61%	637.017	52,61%
		1.210.932	100,00%	1.210.932	100,00%	1.210.932	100,00%	1.210.932	100,00%	1.210.932	100,00%
B	Saluran Drainase Kewenangan Kabupaten										
1	Baik	134.952	19,62%	134.952	19,62%	134.952	19,62%	134.952	19,62%	134.952	19,62%
2	Sedang	190.990	27,77%	190.990	27,77%	190.990	27,77%	190.990	27,77%	190.990	27,77%
3	Buruk	361.730	52,60%	361.730	52,60%	361.730	52,60%	361.730	52,60%	361.730	52,60%
		687.672	100,00%	687.672	100,00%	687.672	100,00%	687.672	100,00%	687.672	100,00%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017
 (diolah)

4) Kemiskinan

Persoalan kemiskinan, masih menjadi isu utama dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. Penanganan permasalahan kemiskinan memerlukan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas yang harus ditangani secara terintegrasi yang menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, serta memfasilitasinya agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat, guna mengurangi penduduk miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk itu penduduk miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan garis

kemiskinan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1.	2012	634.3	277.458	32.96	5,19	0,62	0,11
2.	2013	638.3	295.912	40.32	6,31	0,85	0,17
3.	2014	634.3	306.221	43.70	6,79	0,85	10,17
4.	2015	646.2	327.357	43.43	6,74	0,73	0,14
5.	2016	650.1	350.902	37.55	5,79	0,75	0,15

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah)

Pada tabel di atas terlihat, bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung fluktuatif dan menurun secara bertahap. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng relatif tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Buleleng hampir 15% dari jumlah penduduk Provinsi Bali. Demikian pula tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng, penurunannya relatif membaik dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Bali, berada di bawah Tingkat Kemiskinan Nasional sebesar 10,7 %, namun masih diatas tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 4,25% pada tahun 2016. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam tahun tertentu, sebagian besar disebabkan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Bali, kebijakan pengurangan subsidi energi/bahan bakar minyak serta kenaikan harga pokok yang berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat kurang mampu.

Garis kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 sebesar Rp.277.458,00 per kapita/bulan. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.350.902,00 per kapita/bulan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan di bawah nilai tersebut. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Buleleng relatif meningkat yang menunjukkan bahwa berbagai intervensi program-program penanggulangan kemiskinan dan membaiknya kondisi

perekonomian cukup signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Indeks Kedalamam Kemiskinan Tahun 2016 sebesar 0,75, menurun dibandingkan Tahun 2013 sebesar 0,85, demikian pula Indeks keparahan Kemiskinan Tahun 2016 sebesar 0,15 menurun dibandingkan Tahun 2013 sebesar 0,17. Kondisi tersebut menggambarkan semakin meningkatnya pendapatan atau kesejahteraan penduduk miskin atau bergerak mendekati garis kemiskinan serta semakin menurunnya kesenjangan (disparitas) pendapatan antara penduduk miskin.

Dalam rangka optimalisasi penetapan sasaran kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka Tahun 2011 Pemerintah Pusat melalui TNP2K telah menerbitkan Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan Sosial (PPLS) Kabupaten Buleleng tercatat sejumlah 29.903 RTS (Desil I hingga Desil III). Selanjutnya guna perluasan sasaran program perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pada tahun 2015 Kementrian Sosial RI telah menerbitkan Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Fakir Miskin (PPFM) tahun 2015. Jumlah rumah tangga sasaran Kabupaten Buleleng tercatat sejumlah 61.994 Rumah Tangga.

Sesuai BDT PPFM Tahun 2015 tersebut, maka jumlah rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Buleleng tahun 2015 dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Di Kabupaten Buleleng Tahun 2015

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sasaran (RTS)					Jumlah RT	Persentase RTS terhadap RT (%)
		Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	Jumlah		
1.	Gerokgak	1.801	3.049	2.645	2.449	9.944	27.902	35,64
2.	Seririt	1.816	2.656	2.548	2.498	9.518	23.949	39,74
3.	Busungbiu	465	998	1.041	1.560	4.064	12.843	31,64
4.	Banjar	1.355	1.950	1.831	1.858	6.994	22.292	31,37
5.	Sukasada	1.259	1.702	1.511	1.425	5.897	21.906	26,92
6.	Buleleng	860	2.014	2.213	2.967	8.054	37.751	21,33
7.	Sawan	950	1.560	1.484	1.517	5.511	21.171	26,03
8.	Kubutambahan	1.511	2.063	1.663	1.555	6.792	17.735	38,30

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sasaran (RTS)					Jumlah RT	Persentase RTS terhadap RT (%)
		Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	Jumlah		
9.	Tejakula	998	1.457	1.411	1.354	5.220	20.175	25,87
	Jumlah	11.015	17.449	16.347	17.183	61.994	205.728	30,14

Sumber: Kementerian Sosial RI Tahun 2016

Data pada tabel di atas menunjukkan, jumlah Rumah Tangga sesuai status kesejahteraan terendah yakni Desil I sampai dengan Desil IV di Kabupaten Buleleng tahun 2015 sebanyak 61.994 RTS. Rumah Tangga Sasaran tersebut merupakan rumah tangga miskin atau rentan miskin yang menjadi prioritas pogram Penanggulangan Kemiskinan.

Ditinjau dari persentase RTS terhadap jumlah RT, tertinggi terdapat di Kecamatan Seririt sebesar 39,74%, Kecamatan Kubutambahan sebesar 38,30%, Kecamatan Gerokgak sebesar 35,64% disusul kecamatan-kecamatan lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa program-program percepatan penanggulangan kemiskinan agar dapat diprioritaskan pada kecamatan atau desa kantong kemiskinan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buleleng akan tetap konsisten merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Perkembangan Investasi

Investasi adalah nilai kekayaan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sumber investasi dapat berasal dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Investasi pemerintah berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan, investasi dunia usaha dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Peranan investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp. 4.676 miliar rata-rata per tahun. Secara absolut, perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 total investasi mencapai sekitar Rp. 4,288 miliar meningkat menjadi Rp. 4.431 miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp. 5.301 miliar pada tahun 2016.

Akan tetapi secara relatif, pertumbuhan investasi cukup berfluktuatif. Pertumbuhan investasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,6%. Sedangkan, pertumbuhan investasi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,02%. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan investasi mencapai sekitar 6,1% rata-rata per tahun.

Tabel 2.43
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

Tahun	INVESTASI		
	Nilai	Pertumbuhan	Kontribusi
	(miliar Rp)	(%)	(%)
2012	4,288.31	8.53	27.70
2013	4,431.22	3.33	26.71
2014	4,564.97	3.02	25.73
2015	4,793.94	5.02	25.46
2016	5,301.96	10.60	26.56
Rata-Rata	4,676.08	6.10	26.43

Pada sisi lain, kontribusi investasi dalam perekonomian daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai sekitar 26,43% rata-rata per tahun. Akan tetapi kontribusinya cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 kontribusi investasi dalam ekonomi mencapai sekitar 27,70% menurun menjadi sekitar 26,56% pada tahun 2016.

Jumlah investasi yang besar adalah penting, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas investasi itu sendiri. Kualitas investasi dapat diukur dengan melihat tingkat *Incremental Capital*

Output Ratio (ICOR), yaitu; rasio antara tambahan nilai ekonomi dibandingkan dengan jumlah investasi yang dibutuhkan. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien suatu perekonomian atau investasi semakin berkualitas. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR menunjukkan semakin tidak efisien suatu perekonomian atau investasi semakin tidak berkualitas.

Tabel 2.44
 Perkembangan Tingkat Efisiensi Investasi
 Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Tahun	Tambahan PDRB	Investasi	ICOR
	(miliar Rp)	(miliar Rp)	
2012	982.84	4,288.31	4.36
2013	1,106.98	4,431.22	4.00
2014	1,106.98	4,564.97	4.12
2015	1,086.34	4,793.94	4.41
2016	1,131.84	5,301.96	4.68
Rata-Rata	1,083.00	4,676.08	4.32

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai ICOR Kabupaten Buleleng mencapai 4,32%. Tantangan ke depan adalah bahwa bagaimana dapat diupayakan nilai *ICOR* ini dapat secara gradual diturunkan sehingga iklim invetasi semakin kondusif.

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting, dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan di daerah. Dari data yang ada, pemerintah daerah sudah dapat mendorong tumbuhnya investasi dalam negeri, dengan jumlah investor bervariasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 investor mencapai 156 investor dengan realisasi anggaran mencapai 1,042 trilyun dan mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 10,042 trilyun dengan 157 investor.

Tabel 2.45
 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Buleleng
 Tahun 2012-2016

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2012	181	144.316.359.250	181	144.316.359.250
2013	40	75.505.000.000	40	75.505.000.000
2014	157	255.000.478.000	157	255.000.478.000
2015	158	10.042.866.236.716	158	10.042.866.236.716
2016	156	1.042.070.243.000	156	1.042.070.243.000

Jumlah investor yang berkontribusi di Kabupaten Buleleng dalam menanamkan modalnya juga mengalami perkembangan secara fluktuatif dari 40 sampai 181 investor, dengan jumlah investasi yang terserap berkembang secara fluktuatif. Berkaitan dengan jumlah investor dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Buleleng
 Tahun 2012-2016

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2012	Jumlah Investor	181	0	181
2013	Jumlah Investor	40	0	40
2014	Jumlah Investor	156	0	156
2015	Jumlah Investor	157	0	157
2016	Jumlah Investor	156	0	156

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk mengalami perubahan cenderung meningkat dari Rp. 593.627/bulan,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 772.561,/bulan pada tahun 2016. Dengan demikian, upaya untuk pencapaian hidup layak dapat terus meningkat setiap tahun, seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

N o	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata-Rata Konsumsi Perkapita Sebulan (Makanan)	291.180	354.022	417.052	352.138	372.395
2.	Rata-Rata Konsumsi Perkapita Sebulan (Non Makanan)	302.447	388.892	452.890	380.777	400.166
3	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (1+2)	593.627	742.914	869.942	732.915	772.561

Sumber: Badan Statistik Provinsi Bali, 2017

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Buleleng untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka pendapatan rata-rata perkapita penduduk harus meningkat, hal ini akan mempengaruhi pengeluaran perkapita yang dapat meningkat setiap tahunnya. Grafik perkembangan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016 digambarkan seperti di bawah ini.



Sumber: Badan Statistik Provinsi Bali, 2017 (diolah)

Gambar 2.10
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah masih mengalami kendala, dimana data menunjukkan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pada akhir tahun 2016 pelanggaran mengalami kenaikan secara signifikan, mencapai 98 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 65,31% dari tahun sebelumnya. Secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Jumlah Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	42	37	22	34	98

Sumber: Dinas PUPR Kab. Buleleng, 2017

b. Luas RTH Kawasan Perkotaan Singaraja

Luas RTH perkotaan diharapkan minimal 30% dari total luas wilayah, meliputi RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%. Pada tahun 2016, luas RTH perkotaan Singaraja jika termasuk lahan sawah sudah memenuhi ketentuan karena telah mencapai 1.383,2 Ha atau sebesar 33,21% dari luas wilayah perkotaan seluas

4.163,89 Ha. Meskipun demikian, luas RTH publik belum memenuhi harapan karena baru mencapai 19,04 Ha atau 0,46% dari luas perkotaan Singaraja. Sedangkan, RTH privat sudah memenuhi ketentuan, yaitu sebesar 1.364,16 Ha atau sebesar 32,76%.

c. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif lahan pertanian di Kabupaten Buleleng terus berkurang setiap tahun akibat adanya alih fungsi tanah, maupun faktor lain seperti menjadi lahan kritis, dan akibat bencana. Data menjelaskan bahwa rata-rata lahan sawah (sawah irigasi dan non irigasi) mengalami penurunan mencapai 0,60% periode 2011-2016 dari luas 10.992 ha tahun 2011 menjadi 10.660 ha, sedangkan untuk ditanami padi pada areal sawah produktif juga mengalami penurunan setiap tahun dengan rata-rata 0,91%. Sedangkan lahan pertanian non sawah kurun waktu 2011-2016 mengalami rata-rata kenaikan 0,03% dari luas 70.426 Ha tahun 2011 menjadi 70.543 Ha tahun 2016. Dan selanjutnya, lahan non pertanian yang digunakan Pemukiman, Perkantoran, Jalan dan lain-lain mengalami kenaikan rata-rata 0,08% dari luas 55.170 Ha tahun 2011 menjadi 55.385 Ha tahun 2016.

Tabel 2.49
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Jenis Lahan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Perkembangan		Perkembangan	
							2011 s/d 2016		2015 s/d 2016	
							(rata-rata Pertahun)			
							(ha)	(%/th)	(ha)	(%/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Lahan Sawah										
a. Sawah Irigasi	10,891	10,953	10,818	10,694	10,707	10,577	-62,80	-0,58	-130	-1,21
- Ditanami Padi	10,859	10,947	10,811	10,683	10,546	10,348	-102,20	-0,94	-198	-1,88
-Tidak ditanami Padi (Ditanami Tanaman) Lain	32	6	2	3	93	221	37,80	118,13	128	137,63
-Tidak ditanami tanaman apapun	-	-	5	8	68	8	1,60		-60	88,24
b. Sawah non irigasi	101	86	86	95	82	83	-3,60	-3,56	1	1,22
-Ditanami Padi	68	69	69	79	65	82	2,80	4,12	17	26,15
-Tidak ditanami Padi (Ditanami Tanaman) Lain	33	17	17	16	17	1	-6,40	-19,39	-16	94,12
-Tidak ditanami tanaman apapun	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
c. Total Lahan Sawah (a+b)	10,992	11,039	10,904	10,789	10,789	10,660	66,40	-0,60	-129	-1,20
-Ditanami Padi	10,927	11,016	10,880	10,762	10,611	10,430	-99,40	-0,91	-181	1,71

Jenis Lahan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Perkembangan		Perkembangan	
							2011 s/d 2016		2015 s/d 2016	
							(rata-rata Pertahun)			
							(ha)	(%/th)	(ha)	(%/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-Tidak ditanami Padi (Ditanami Tanaman) Lain	65	23	19	19	110	222	31,40	48,31	112	101,82
-Tidak ditanami tanaman apapun	-	-	5	8	68	8	1,60		-60	-88,24
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	70,426	70,343	70,392	70,465	70,430	70,543	23,40	0,03	113	0,16
a. Tegall/kebun	37,834	36,990	37,028	37,056	36,991	37,069	-70,60	0,19	78	0,21
b.Ladang/huma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
c.Perkebunan	31,834	31,834	31,874	31,924	31,947	31,963	29,80	0,09	36	0,11
d.Ditanami pohon hutan rakyat	775	1,132	1,133	1,133	1,133	1,133	71,60	9,24	0	0
e.Padang pengembalaan/pada ng rumput	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
f.Sementara tidak diusahakan*)	85	77	47	42	49	48	7,40	8,71	1	2,04
g.lainnya (tmbak, kolam, empang, hutan negara	310	310	310	310	310	310	0	0	0	0
3. Lahan Bukan Pertanian (Pemukiman, Perkantoran, Jalan dll)	55,170	55,206	55,292	55,334	55,369	55,385	43,00	0,08	16	0,03
Total Luas Kabupaten/Kota	136,588	136,588	136,588	136,588	136,588	136,588	0	0	0	0

Sumber: Badan Statistik Provinsi Bali, 2017

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Data ini dapat memberikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Buleleng. Data menunjukkan angka kriminalitas mengalami perubahan secara fluktuatif dan cenderung menurun.

Tabel 2.50
Angka Kriminalitas Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2012-2016

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus narkoba	19	5	16	24	47
2.	Jumlah kasus pembunuhan	3	-	1	-	-
3.	Jumlah kejahatan seksual	7	12	12	11	8
4.	Jumlah kasus penganiayaan	154	106	87	79	89
5.	Jumlah kasus pencurian	174	125	103	69	112
6.	Jumlah kasus penipuan	8	8	11	8	18
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	2	-	-	1	-
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun		367	256	230	192	274
Angka kriminalitas		0,0006	0,0004	0,0004	0,0003	0,0004

Sumber: Polres Kabupaten Buleleng, 2017

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa berbagai kejahatan terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang dapat menghambat tingkat kepercayaan investor dalam berkontribusi pada pembangunan daya saing daerah Buleleng. Kejahatan yang menduduki frekwensi paling tinggi adalah kasus pencurian berkisar berkisar 69-174 kasus dan kasus penganiayaan pada urutan kedua mencapai 79-154. Tindak kejahatan ini sedapat mungkin diturunkan melalui upaya-upaya pendekatan baik secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, sehingga dapat menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan daerah.

b. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas sering menjadi indikator, yang dapat mendorong perkembangan investasi di daerah adalah adanya kesetabilan ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. Seringnya terjadi demonstrasi atau unjuk rasa menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah. Data menunjukkan di Kabupaten Buleleng periode tahu 2012-2016, masih terjadi demonstrasi, namun masih dalam frekwensi rendah dan dapat diatasi, sebagian besar demo dilakukan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi di bidang ekonomi dan politik.

Tabel 2.51
Jumlah Demo Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bidang politik	1	9	2	-	4
2	Ekonomi	6	5	3	7	5
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah unjuk rasa	7	14	5	7	9

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017

Dari data di atas frekwensi unjuk rasa terjadi secara fluktuatif namun meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2016. Meskipun jumlah demonstrasi dapat dikatakan sedikit, tetapi tetap harus diupayakan agar demonstrasi tidak meningkat bahkan ditekan, terutama yang sifatnya destruktif.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga daerah dapat ditopang melalui tingkat pendidikan yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Buleleng. Melihat dari komposisi persentase penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah, di mana penduduk Buleleng masih sebagian besar SMP ke bawah atau sekitar 72, 69%, tingkat SMA mencapai 22,41%, D1, D2, D3 mencapai 1,35% dan D4/S1-S3 mencapai 3,55% dari total jumlah penduduk pada tahun 2016. Dengan demikian, pengisian ketenagakerjaan masih sebagian besar tingkat SMA ke bawah, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas
di Kabupaten Buleleng Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Tahun 2012-2016

No	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak Punya Ijazah	24,87	26,63	17,23	25,68	27,31
2	Tamat SD	30,79	30,91	28,23	31,99	29,51
3	SLTP Sederajat	16,23	19,41	18,35	15,3	15,87
4	SLTA Sederajat	21,42	19,1	21,4	21,61	22,41
5	D1-D2/D3	2,54	1,4	1,23	1,35	1,35
6	D4/S1-S3	4,15	2,55	3,55	4,07	3,55
		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng (hasil Susenas) Buleleng dalam Angka, 2017

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun). Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Data menunjukkan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Buleleng berkisar 0,51 sampai 0,53 artinya setiap satu orang penduduk produktif menanggung 0,53 orang penduduk yang belum dan tidak produktif.

Tabel 2.53
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	171,9	171,5	17,1	170,2	170,98
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	45,5	46,8	48,0	48,4	53,54
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	217,4	218,3	219,1	218,6	224,52
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	416,9	420,3	423,2	427,6	424,59
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,52	0,52	0,52	0,51	0,53

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017 (diolah).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah daerah dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi :

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Buleleng

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 2.54
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buleleng

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah						
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) (%)	6,20	6,01	6,20	5,70	6,30	6,40
1.2	Kebutuhan Investasi (triliun)	5,667	4,648	5,667	4,909	5,769	6,229
1.3.	Laju inflasi (%)	3,38	4,57	3,38	3,38	3,50	3,50
1.4.	PDRB Perkapita (Juta)	47,724	43,180	47,724	47,238	53,220	56,387
1.5.	Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)	0,339	0,336	0,339	0,336	0,320	0,316
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Pendidikan						
1.1.	Persentase sekolah yang menyertakan pendidikan karakter dan penggalan potensi	5,70	5,00	5,70	5,70	35,00	100,00
1.2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	351	349	351	351	353	355

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1.3.	Angka Melek Huruf (%)	99,41	91,99	99,41	92,44	99,46	99,51
1.4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,90	6,83	6,90	6,90	6,96	7,03
1.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104,46	104,46	104,46	104,46	100,00	100,00
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,09	96,09	96,09	96,09	96,47	96,85
1.7.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
1.8.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97,20	98,92	97,20	97,20	99,02	99,12
1.10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs	104,23	98,93	104,23	104,23	100,00	100,00
1.11.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs	94,60	88,62	94,60	94,60	95,08	95,56
1.12.	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
1.13.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14.	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92,66	92,66	92,66	92,66	93,10	93,63
2.	Kesehatan						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
2.1.	Persentase RT ber PHBS (%)	78,50	76,33	78,50	78,50	80,00	83,00
2.2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,06	71,20	71,06	71,31	71,15	71,24
2.3.	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran	4,90	4,70	4,90	4,10	4,88	4,86
2.4.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,060	0,070	0,060	0,000	0,050	0,005
3.	Ketenagakerjaan						
3.1.	Menurunnya angka pengangguran (%)	2,00	2,05	2,00	2,00	1,95	1,89
3.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,29	73,79	74,29	74,29	74,74	75,29
	Pelayanan Umum						
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Dasar (SD)						
1.1.1	Persentase sekolah yang telah memenuhi SPM	40,00	30,00	40,00	40,00	50,00	60,00
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	99,74	100,00	99,74	100,00	99,81	99,88
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk SD/MI	68,00	71,44	68,00	71,64	68,71	68,91
1.1.4	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1 : 15	1 : 18	1 : 15	1 : 18	1 : 20	1 : 20

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1.1.5	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata (Guru/Kls/10.000 Pddk)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,22	1,29
1.2	Pendidikan Dasar (SMP)						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	96,40	96,40	96,40	96,40	97,70	99,75
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah menengah (Sek/ 10.000 Pddk)	23,86	22,86	23,86	23,86	24,86	25,86
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 32	1 : 32
1.2.4.	Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (%)	99,41	99,41	99,41	99,41	99,53	99,64
1.3	Fasilitas Pendidikan						
1.3.1	Persentase lembaga pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM	40,00	40,00	40,00	40,00	45,00	50,00
1.3.2	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	35,87	35,87	35,87	35,87	36,67	37,47
1.4	Pendidikan Usia Dini						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1.4.1	APK Pendidikan Usia Dini (%)	75,32	72,30	75,32	72,30	75,62	75,92
1.5	Angka Putus Sekolah						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
1.6.	Angka Kelulusan						
1.6.1	Angka kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.2	Angka kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.3	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97,20	97,20	97,20	97,20	99,02	99,12
1.6.4	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92,66	92,66	92,66	92,66	93,10	93,63
1.6.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV (%)	91,01	91,01	91,01	91,01	91,03	91,05
2	Kesehatan						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
2.1	Tingkat akreditasi pelayanan BRSUD Buleleng	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi madya	5	5	5	5	5	7
2.3	Rasio Posyandu per Satuan Balita (Bh/10000)	1,12	1,39	1,12	1,405	1,13	1,14
2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,150	0,132	0,150	0,128	0,151	0,152
2.5	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,00120	0,00920	0,00120	0,00120	0,00920	0,00122
2.6	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Bh/10000)	13,70	13,70	13,70	13,70	13,72	13,74
2.7	Rasio Perawat per Satuan Penduduk (Bh/10000)	115,70	115,70	115,70	115,70	115,72	115,74
2.8	Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4(%)	91,70	91,73	91,70	92,50	95,00	95,50

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
2.9	Cakupan pertolongan persalinaan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96,68	96,74	96,68	97,24	96,80	97,50
2.10	Cakupan desa kelurahan UCI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.14	Cakupan kunjungan bayi(%)	105,40	96,95	105,40	103,67	100,00	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Pekerjaan Umum						
3.1.	penduduk berakses air minum (%)	82,97	78,58	82,97	82,97	85,00	90,00
3.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	19,83	19,62	19,83	19,83	25,00%	36,00%

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
	Penataan Ruang						
3.1	Pelayanan Informasi tata ruang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Perumahan						
4.1	Rumah tidak layak huni	87,79%	40,70%	87,79%	85,30%	70,23%	52,67%
4.2	Pelayanan pengelolaan air limbah	87,98%	88,00 %	87,98%	88,01 %	88,02%	90,00%
4.3	Rasio rumah layak huni	0,185	0,1833	0,1851	0,147	0,188	0,190
4.4	Rasio permukiman layak huni	22,70	22,35	22,70	22,39	22,70	32,70
4.5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,71	92,82	93,71	93,53	94,97	96,23
4.6	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	83,53	81,21	83,53	83,06	86,82	90,12
4.7	Persentase permukiman yang tertata	22,70	22,35	22,70	22,39	22,70	32,70
4.8	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,069	0,069	0,069	0,068	0,060	0,046
4.9	Persentase penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14,29	11,12	14,29	13,23	35,71	50,00
4.10	Persentase areal kawasan kumuh	0,069	0,069	0,069	0,068	0,060	0,046

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
4.11	Persentase pengelolaan RTH publik di kawasan perkotaan	76,72	72,22	76,72	76,44	83,39	92,11
5	Perencanaan						
5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ya	Ya	ya	ya	ya	ya
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ya	Ya	ya	ya	ya	ya
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ya	Ya	ya	ya	ya	ya
5.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perhubungan						
6.1	Pemasangan rambu	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%	72,90%	77,60%
6.2	Perolehan penghargaan WTN (buah)	1	1	1	1	1	1
6.3	rasio Ijin trayek (unit)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
6.4	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00
6.5	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5
6.6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan umum	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7	Kependudukan dan Catatan Sipil						
7.1	Persentase perekaman KTP elektronik	96,27	96,27	96,27	96,27	97,30	98,30
7.2	Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	92,91	92,91	92,91	92,91	94,00	96,00
7.3	cakupan penerbitan akte kematian	66,43	66,43	66,43	66,43	68,50	70,50
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,60	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,20	2,25	2,20	2,20	2,15	2,14

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
8.3	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal , non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	45	44	45	45	46	47
8.4	Rasio akseptor KB	85,38	84,58	85,38	85,38	86,02	86,39
8.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	85,38	84,58	85,38	85,38	86,02	86,39
8.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)	3179	3258	3179	3179	3110	3091
8.7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5,8	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6
8.8	Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	37,00	36,00	37,00	37,00	38,00	39,00
8.9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	74,33	74,23	74,33	74,33	74,43	74,53
8.10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	53,51	53,41	53,51	53,51	53,61	53,71

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	37,86	36,86	37,86	37,86	37,96	47,86
8.12	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	975	840	975	975	1100	1210
8.13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	134	134	134	134	134	134
8.14	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70,00	69,00	70,00	70,00	71,00	72,00
8.15	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
8.16	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	82,19	81,19	82,19	82,19	83,19	84,19
8.17	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48
8.18	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21	21	21	22	22
8.19	Cakupan peserta KB aktif (%)	85,38	84,66	85,38	85,38	86,02	86,39
8.20	Jumlah masyarakat yang mendapatkan konseling KB (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
9	Sosial						
9.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memberikan pelayanan sosisal (buah)	18 buah	18 buah	18 buah	18 buah	9 buah	9 buah
9.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial(%)	4,28	3,50	4,28	4,28	12,80	15,40

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
9.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial(%)	20,00	2,75	20,00	20,00	3,40	4,00
10	Kepemudaan dan Olahraga						
10.1	Jumlah Organisasi Pemuda (Buah)	25	25	25	25	27	29
10.2	Jumlah Organisasi olah raga (buah)	34	34	34	34	35	36
10.3	Jumlah Kegiatan kepemudaan (Kali)	20	20	20	20	20	21
10.4	Jumlah Kegiatan olah raga (Kali)	54	54	54	54	56	59
10.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah / penduduk)	165	165	165	165	166	167
11	Kesatuan bangsa Politik Dalam Negeri						
11.1	Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel (orang)	5074	5074	5074	5074	5174	5274
12	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
12.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	68	68	68	68	69	70
12.2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.3	Nilai IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
13	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
13.1	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,6	1,6	1,6	1,6	4,4	6,2
13.2	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	57,70	57,00	57,70	57,70	60,75	63,60
13.3	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	85,00	83,00	85,00	85,00	87,00	90,00
14	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
14.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	70,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00
14.2	Prosentase penegakan Perda	65,00	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
15	Tenaga Kerja						
15.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	32,00	31,00	32,00	32,00	42,00	62,00
15.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	40,00	35,00	40,00	40,00	46,15	66,00
15.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	54,00	49,00	54,00	54,00	64,00	80,00
15.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja setahun (%)	9,88	10,00	9,88	9,88	18,75	17,50
15.5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	78,00	70,00	78,00	78,00	80,00	85,70
16	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
16.1	Cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	47,62	45,35	47,62	47,62	50,39	54,26

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
16.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	12,16
16.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
16.4	Persentase PKK aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5	Persentase Posyandu Aktif	62,57	61,34	62,57	62,57	63,97	65,36
17	Statistik						
17.1	Buku “Kabupaten dalam angka” (dokumen)	1	1	1	1	1	1
17.2	Buku “PDRB Kabupaten” (dokumen)	0	0	0	0	1	1
18	Kearsipan						
18.1	Lembaga/SKPD yang mengelola arsip sesuai standar	30	30	30	30	30	50
18.2	Peningkatan SDM pengelola	300	300	300	300	350	365
	Kearsipan (orang)						
19	Informasi dan Komunikasi						
19.1	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	6	6	6	6	6	6

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
19.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	12	12	12	12	12	24
19.3	Pameran/Expo (kali)	2	2	2	2	2	2
20	Perpustakaan						
20.1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang)	104	104	104	104	104	219
21	Perindustrian						
21.1	Persentase Pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	4,50	4,50	4,50	4,50	5,20	5,90
22	Perdagangan						
22.1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	2,40	3,65	2,40	3,70	3,30	3,60
23	UMKM						
23.1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,00	98,015	98,00	98,01	97,50	97,00
24	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
24.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,50	40,50	44,50	44,50	46,00	47,50
24.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,46	44,00	44,46	44,46	44,67	45,10

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
24.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,068	0,070	0,068	0,068	0,066	0,064
24.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,169	0,154	0,169	0,169	0,183	0,189
24.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu	90,00	85,50	90,00	90,00	90,50	91,00
24.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	51,79	51,74	51,79	51,79	51,84	51,89
24.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75,00	74,00	75,00	75,00	76,00	77,00

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
24.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	75,00	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00
24.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00
24.11	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	16,85	16,77	16,85	16,85	17,01	17,25
25	Pertanahan						
25.1.	Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat	65,30	64,00	65,30	65,30	71,00	77,00
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (rupiah)	782.000	782.000	782.000	782.000	797.000	812.000
1.2	Persentase desa berstatus swasembada	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	19,38
1.3	Rasio ketergantungan (%)	50,15	50,15	50,15	50,15	49,57	49,09
	Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur						
1.	Lingkungan Hidup						
2.1	Indeks pertanaman padi (IP Padi)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2.2.	Persentase penanganan sampah (%)	75,00	75,00	75,00	75,00	76,00	77,00
2.3.	Jumlah pengukuran pencemaran status mutu air	8	8	8	8	9	10
2.4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	79,00	79,00	79,00	79,00	80,00	81,00
2.5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	82,00	84,00

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
2.6.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/ 1000 pddk)	57	55	57	60	62	67
2.7.	Penegakan hukum lingkungan (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	82,00	83,00
2.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,18	63,18	63,18	64,60	64,20	65,00
3.	Fasilitas Wilayah						
3.1	Proporsi Jalan kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	69,71	76,61	69,71	69,71	71,00	73,00
3.2.	jembatan kondisi mantap (%)	78,44	73,86	78,44	78,44	79,00	81,00
3.3	Irigasi kabupaten dalam kondisi mantap (%)	71,20	69,32	71,20	71,20	72,96	74,72
4.	Lembaga Keuangan						
4.1	Koperasi aktif (%)	84,5	84,5	84,5	84,5	85,0	85,5
4.2	Jenis dan jumlah bank dan cabang (buah)	38	38	38	38	38	39
4.3	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (buah)	8	8	8	8	8	8
	Urusan Pilihan						
1.	Pertanian						

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
1.1.	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem organik	465	465	465	465	511	562
1.2.	Produktivitas padi (ton/ hektar)	5,65	5,65	5,65	5,65	5,66	5,68
1.3.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	22,40	22,40	22,40	22,40	22,00	21,80
1.4	Cakupan bina kelompok petani (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00
2.	Kelautan dan Perikanan						
2.1.	Produksi perikanan (ton)	19,494	19,494	19,494	19,494	20,003	20,056
2.2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36,38	36,38	36,38	36,38	36,89	37,40
2.3.	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (%)	54,34	54,34	54,34	54,34	60,50	66,70
3.	Ketahanan Pangan						
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	114	114	114	114	122	124
4.	Pariwisata						
4.1	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun	1	1	1	1	1	1
4.2	Jumlah kunjungan wisata	873.000	873.000	873.000	873.000	918.650	962.482

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Tahun 2016	Target dan Capaian Kinerja 2017		Target Tahun 2018	Target Tahun 2019
				Target	Capaian		
4.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	18,42	18,42	18,42	18,42	18,49	18,60
4.4.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	195	195	195	195	196	200
4.5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	436	436	436	436	442	449

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan dan tantangan tersebut dapat diklasifikasi menjadi beberapa bidang/sektor sebagai berikut:

2.3.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Adanya konflik kepentingan pemanfaatan air;
2. Adanya kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif (lahan sawah yang selama ini cukup mendapat air);
3. Penurunan kondisi daerah tangkapan air Buyan dan Tamblingan;
4. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buleleng berada pada kategori kurang.

2.3.1.2. Kependudukan dan Demografi

1. Sebaran penduduk cenderung padat di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Seririt dan Buleleng terutama akibat tingginya migrasi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk akan memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan infrastruktur;
2. Kecenderungan angkatan kerja lebih memilih pekerjaan formal dibandingkan dengan sektor informal sehingga peluang yang ada pada sektor informal dimanfaatkan oleh penduduk pendatang.

2.3.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Investasi, Industri, dan Perdagangan
 - a) Daya tarik investasi Buleleng masih relatif rendah karena akses pendukung belum memadai;

- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang;
 - c) Kurang terintegrasinya UMKM dengan sektor primer atau sumber bahan baku yang digunakan hanya sebagian kecil dari bahan baku lokal;
 - d) Daya saing UMKM masih relatif lemah;
 - e) Adopsi teknologi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) masih kurang;
 - f) Pertumbuhan toko modern dan supermarket berjangkauan dapat mengancam keberadaan pasar tradisional dan warung-warung milik masyarakat;
 - g) Serapan hotel dan restoran terhadap produk lokal sangat terbatas;
 - h) Intervensi kebijakan pemerintah terhadap proses produksi, distribusi, dan pemasaran belum optimal;
2. Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan)
- a) Belum ada kebijakan yang efektif untuk menekan alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian produktif;
 - b) Produktivitas pertanian semakin menurun karena alih fungsi lahan pertanian produktif, harga produk tidak menentu, dan sulitnya pemasaran hasil pertanian pada musim panen raya;
 - c) Skala usaha pertanian yang dikelola masyarakat adalah skala kecil sehingga dari sisi bisnis sulit digarap agar memberikan keuntungan yang wajar;
 - d) Ancaman kekeringan setiap tahun meningkat yang berdampak pada sulitnya memenuhi target tanam dan panen;
 - e) Kelembagaan petani belum maksimal untuk mampu memberikan pendapatan yang wajar kepada petani kecil;
 - f) Persaingan pemanfaatan sumber-sumber air, antara kebutuhan air irigasi dan air minum semakin

meningkat sehingga pasokan air untuk kebutuhan pertanian menjadi semakin mengecil;

- g) Pengolahan hasil pertanian belum optimal dan aktivitas pertanian cenderung terfokus pada sektor hulu;
- h) Produksi pertanian belum optimal sebagai akibat hama/ penyakit yang belum ditemukan teknologi pengendaliannya, pasar dikuasai tengkulak, dan lain-lain;
- i) Masih minimnya infrastruktur pertanian, khususnya menyangkut jaringan irigasi, jalan, dan industri pengolahan hasil-hasilnya;
- j) Masih terbatasnya kemampuan petani dalam akses teknologi dan modal;
- k) Ancaman melemahnya daya saing produk pertanian akibat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan perdagangan bebas lainnya;
- l) Integrasi sektor pertanian belum optimal;
- m) Sumber daya perikanan belum mampu dikembangkan menjadi produk unggulan daerah;
- n) Ketergantungan petani pada pupuk, pestisida/herbisida sintetik, benih/bibit masih sangat tinggi;
- o) Praktek pertanian dalam arti luas yang baik belum sepenuhnya dapat dilakukan;

3. Pariwisata

- a) Pengembangan destinasi pariwisata belum optimal;
- b) Kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan masih rendah;
- c) Aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih belum optimal;
- d) Penerapan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan belum terintegrasi;

- e) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata;
- f) Pengelolaan obyek wisata yang melibatkan masyarakat lokal belum dilakukan secara profesional.

2.3.1.4. Sosial dan Budaya

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- a) Masih tingginya prevalensi kasus penyakit menular dan tidak menular;
- b) Sumber daya manusia kesehatan masih terbatas, yaitu ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Umum;
- c) Belum memadainya ketersediaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
- d) Belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- e) Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan;
- f) Masih berjangkitnya berbagai penyakit yang berpotensi wabah seperti penyakit malaria, DBD, dan adanya pengaruh iklim global terhadap wabah penyakit dan ketersediaan pangan.

2. Pendidikan

- a) Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerataan akses terhadap pendidikan terutama pada jenjang pendidikan PAUD/TK perlu didorong, termasuk penanaman nilai-nilai agama, sopan santun, toleransi, dan disiplin sudah dimulai sejak usia dini;

- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 6,85 pada tahun 2016, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 8,36;
 - c) Ketersediaan gedung sekolah untuk tingkat SMP/MTs masih di bawah rasio ideal;
 - d) Belum berimbangnya orientasi pendidikan, antara akademis dan karakter pada semua jenjang pendidikan sehingga dikhawatirkan pendidikan hanya menghasilkan anak pintar tanpa budipekerti;
 - e) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti ketersediaan perpustakaan, UKS, laboratorium, sarana teknologi informasi (IT), toilet, dan air bersih;
3. Perpustakaan
- a) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah, sekolah dan perpustakaan keliling;
 - b) Kurangnya iklim sekolah dan lingkungan sosial yang mendorong anak suka membaca;
 - c) Rendahnya budaya baca masyarakat.
4. Pemuda dan Olahraga
- a) Belum optimalnya pendidikan kepemudaan dalam pengembangan karakter;
 - b) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah;
 - c) Prasarana dan sarana olahraga relatif terbatas;
 - d) Belum optimalnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
5. Adat dan Budaya
- a) Adanya kecenderungan menurunnya minat generasi muda dalam memelihara dan mengembangkan seni dan budaya lokal;

- b) Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan budaya;
- c) Meningkatnya infiltrasi dan intervensi budaya asing.

6. Kesejahteraan Sosial

- a) Masih adanya kecenderungan KDRT;
- b) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal;
- c) Angka kemiskinan masih di atas rata-rata provinsi Bali (5,25%) dan menyisakan penduduk miskin dengan tingkat kategori kronis (*hardcore poverty*);
- d) Akses masyarakat miskin mendapatkan pendidikan ketrampilan masih terbatas;
- e) Sinergi program penanggulangan kemiskinan belum terjalin dengan baik;
- f) Program kemiskinan yang bersifat umum tidak mampu menanggulangi/mengurangi penduduk miskin, dibutuhkan penanganan *by name by address* dan *by problem*;
- g) Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari kondisinya saat ini masih relatif rendah sehingga bantuan pemerintah cenderung memanjakan mereka.

2.3.1.5. Pemerintahan dan Hukum

1. Pemerintahan Daerah

- a) Analisis jabatan sebagai salah satu syarat penting tidak menjadi panduan dalam mengukur kebutuhan jabatan dan penyusunan formasi jabatan mengacu pola maksimal yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Kompetensi, profesionalisme, sikap, dan mental aparatur yang lemah sehingga kinerja organisasi cenderung stagnan dari tahun ke tahun;
- c) Pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan kecepatan, ketepatan, transparansi, dan

konsistensi tata kelola pemerintahan belum optimal;

- d) Beban belanja aparatur masih sangat berat sehingga kemampuan menyediakan sarana-prasarana gedung dan kesejahteraan bagi aparatur belum mendapat perhatian yang memadai;
- e) Implementasi *good governance* belum dilakukan secara optimal.

2. Hukum

- a) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- b) Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- c) Penegakan supremasi hukum, termasuk penerapan Perda belum optimal.

2.3.1.6. Keamanan dan Ketertiban

- 1. Sulitnya pendataan jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Kabupaten Buleleng;
- 2. Permasalahan lampu penerangan jalan belum merata sehingga daerah-daerah yang belum maksimal mendapat penerangan jalan, rawan terjadi tindak kriminal;
- 3. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima dan gepeng dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

2.3.1.7. Prasarana Wilayah

1. Prasarana Transportasi

- a) Dukungan jalan desa, jalan usaha tani dan jalan produksi dalam mendukung lancarnya distribusi hasil pertanian masih sangat kurang;
- b) Persentase rambu-rambu lalu lintas terpasang dengan yang diharapkan masih rendah;
- c) Jalan nasional yang melintasi Buleleng yang menghubungkan daerah Bali Selatan dan Bali Utara

melalui jalur Mengwitani-Gitgit kondisinya masih rawan terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga dibutuhkan pembangunan *short cut*;

- d) Lemahnya pelayanan angkutan umum antar kecamatan dan antar desa, serta kurang berfungsinya terminal sebagai simpul layanan angkutan.

2. Sumberdaya Air

- a) Meningkatnya konversi lahan menjadi lahan terbangun berpotensi mengurangi daerah resapan air;
- b) Perlindungan sumber mata air belum optimal;

3. Tata Ruang

- a) Belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
- b) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis Kabupaten;
- c) Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d) Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pendidikan

- a) Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana guna menunjang aksesibilitas pendidikan serta belum optimalnya kualitas layanan pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
- b) Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar.

b. Urusan Kesehatan

- a) masih perlunya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. rendahnya pelayanan ini disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, jaminan pembiayaan kesehatan, serta luasnya cakupan pelayanan dengan topografi yang berbukit-bukit.
- b) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah yang antara lain tercermin dari masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
- c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta masih tingginya kasus penyakit menular seperti : DBD, Penderita TB Paru BTA (+) dan HIV/ AIDS, serta penyakit berbahaya lainnya .
- d) Masih lemahnya koordinasi dan kemitraan

dengan instansi/lembaga dan stakeholder terkait dalam mengatasi masalah kesehatan.

- e) Masih kurangnya sarana prasarana dalam memenuhi persyaratan rumah sakit tipe B yang pada akhirnya mempengaruhi capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Sarana prasarana yang belum memenuhi persyaratan Rumah Sakit kelas B antara lain IGD, rawat inap, patologi klinik, radiologi, rehab medik, dan penunjang lainnya. Tahun 2017, kegiatan investasi seperti alat kesehatan dan fisik bangunan hanya bersumber dari dana BLUD, dan APBN
 - f) Kualifikasi pendidikan SDM khususnya dokter spesialis dan sub spesialis yang masih kurang dalam memenuhi persyaratan rumah sakit tipe B. Beberapa dokter spesialis dan sub spesialis yang belum tersedia seperti dokter spesialis gigi dan mulut, serta subspesialis lainnya.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Terjadinya erupsi Gunung Agung pada akhir tahun 2017 mengakibatkan langkanya material bahan bangunan sehingga di beberapa penyelesaian pekerjaan fisik menjadi terhambat.
 - b) Terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng menyebabkan kerusakan pada beberapa Jaringan Irigasi, sehingga mempengaruhi pola tanam pertanian lahan basah di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng dan berakibat di beberapa wilayah lahan pertaniannya terancam kekeringan.
 - c) Berubahnya desain dari Shortcut 5 & 6 ruas jalan Nasional Mengwitani – Singaraja oleh Balai Pelaksana Jalan nasional Wilayah VIII

mengakibatkan tertundanya proses pengadaan tanah yang sedianya diselesaikan pada akhir tahun 2017.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di Kab Buleleng adalah masih terdapat Rumah Tidak layak Huni sebanyak 9237 pada tahun 2017. Selain itu masih terdapat Kawasan kumuh terutama di Kawasan perkotaan singaraja yang secara bertahap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif.

Secara berkala pemeliharaan RTH eksisting perlu tetap diselenggarakan untuk menunjang terwujudnya permukiman yang layak dan berkelanjutan. Selain itu untuk memenuhi kewajiban penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% maka Pemerintah Daerah perlu merencanakan pengadaan lahan untuk RTH public.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan daerah guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Masih belum optimalnya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban
- c) Masih belum memadainya sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan keamanan dan ketertiban umum

f. Urusan Sosial

- a) Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersebar di Kabupaten Buleleng
- b) Rendahnya aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar
- c) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng akibat rendahnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin
- d) Rendahnya kualitas kesejahteraan sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

a. Urusan Tenaga Kerja

- a) Masih relatif tingginya pertumbuhan angkatan kerja dengan keterampilan yang rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memiliki daya saing yang rendah
- b) Masih rendahnya kualitas dan produktivitas pencari kerja
- c) Masih terjadinya perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah dalam bidang ekonomi
- b) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
- c) Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akta kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman

c. Urusan Pangan

- a) Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi.
- b) Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar antar daerah, dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu masuk sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut
- c) Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di tingkat konsumen
- d) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan
- e) Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- f) Masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- g) Masih adanya orang/masyarakat yang menambahkan penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimal pada pangan segar untuk keuntungan dirinya sendiri.

d. Urusan Pertanahan

- a) Permasalahannya yang terjadi adalah Instansi yang memerlukan tanah belum memahami apa tujuan dibentuknya Bidang Pertanahan, dan solusinya adalah mensosialisasikan kepada seluruh Instansi bentuk fasilitasi Bidang Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- b) Pada SKPD yang menangani Urusan pertanahan, belum memiliki staf teknis pertanahan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan
 - c) Beberapa hal teknis terkait pertanahan seperti penggunaan dana ADD untuk pengadaan lahan masih membutuhkan koordinasi dengan beberapa Kementerian terkait sehingga penyelenggaraan pertanahan di kabupaten menjadi lebih jelas .
- e. Urusan Lingkungan Hidup
 - a) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga belum maksimal.
 - b) Titik-titik pantau pada kawasan permukiman, sekolah belum melaksanakan pengolahan sampah secara maksimal (daur ulang sampah belum dilaksanakan).
 - c) Masih banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum menerapkan himbauan pemerintah untuk mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan.
 - d) Masih terbatasnya anggaran yang dialokasi dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sehingga pengadaan sarana prasarana pengangkutan sampah khususnya pengadaan truck angkutan sampah belum bisa ditambah.
 - e) Pembangunan TPST dipedesaan belum dapat dilaksanakan dalam upaya pengelolaan sampah sedekat mungkin dari sumbernya.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam menunjang Fungsi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b) Masih relative rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil

- c) Tingkat validitas data base kependudukan masih belum memadai

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- b) Belum Optimalnya kapasitas aparat pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola manajemen administrasi dan keuangan desa
- c) Masih lemahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan di desa serta rendahnya partisipasi masyarakat
- d) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
- e) belum berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan kurangnya peran serta lembaga keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

- a) Menurunnya persentase PUS yang memakai kontrasepsi modern (CPR) dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi karena alasan ekonomi
- b) Menurunnya angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang
- c) Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

i. Urusan Perhubungan

- a) Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga beban jalan menjadi semakin tinggi.
- b) Berdasarkan hasil pemantuan dan pendataan perbengkelan kendaraan bermotor, masih rendahnya masyarakat di dalam pengurusan ijin berdasarkan data 12,25% dari total 253

bengkel yang ada di 9 (sembilan) Kecamatan di Kab.Buleleng yang tidak memiliki ijin.

- c) tidak seimbang pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebesar 0,54% dibandingkan dengan pertumbuhan Panjang jalan yang hanya sebesar 0,1 % (tahun 2012-2015) menyebabkan tingkat pelayanan jalan semakin menurun. Hal ini ditandai dengan muncunya tundaan bahkan kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan/ pada jam-jam sibuk.
- d) Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang memerlukan pemasangan sarana keselamatan lalu lintas seperti APILL, rambu, Marka, Guardrail, Deliniator, cermin tikungan serta pagar pengaman jalan pejalan kaki

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Belum semua SKPD menggunakan sistem informasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat ataupun dalam aktivitas administrasi. Hal ini disebabkan karena belum semua Kantor SKPD memiliki jaringan lokalnya (LAN) sendiri, sehingga komputer-komputer yang digunakan masih berdiri sendiri (stand alone). Selain itu juga belum semua SKPD mempunyai sistem informasinya sendiri dalam memberikan pelayanan publik.
- b) Masih banyak kantor desa yang belum bisa terhubung internet/ koneksi internet sangat lambat. Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang berbukit menyebabkan tidak semua desa dapat mengakses jaringan fiber optik maupun wireless sehingga desa-desa tersebut kesulitan untuk dapat mengakses internet.
- c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang TIK, khususnya aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena minimnya pegawai dengan latar belakang pendidikan TIK serta kurangnya pelatihan aparatur di bidang TIK.
- d) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi milik Pemkab Buleleng, baik yang dibuat sendiri oleh instansi Pemkab Buleleng, maupun yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini

disebabkan karena pembuatan dan pengembangan aplikasi belum terkoordinasi dengan baik, selain itu juga

- e) Karena banyaknya aplikasi yang merupakan program pusat yang digunakan dan memiliki platform yang berbeda satu sama lain.
- f) Belum optimalnya instansi lingkup Pemkab Buleleng dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sehingga informasi pembangunan yang telah dilaksanakan belum dapat tersosialisasikan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya penyebaran informasi publik kepada masyarakat, masih kurangnya kemampuan aparat pemerintah dalam menyampaikan informasi dengan baik dan benar, serta masih adanya daerah di Kabupaten Buleleng yang belum dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan membutuhkan media khusus untuk mendapatkan informasi.
- g) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh informasi yang benar dari sumber-sumber informasi yang terpercaya. Hal ini disebabkan karena lebih mudahnya masyarakat untuk menerima informasi negatif daripada mendapatkan informasi yang benar, kurangnya responsifitas pemerintah daerah dalam menanggapi informasi/ isu yang berkembang di masyarakat.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Rendahnya permodalann Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b) Lemahnya Akses Teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- c) Lemahnya Akses Pasar .
- d) Lemahnya analisa kualitas produk yang di pameran berpengaruh terhadap harga.

1. Urusan Penanaman Modal

- a) Penetapan Anggaran perubahan yang melalui jalur prosedur yang panjang menyebabkan pelaksanaan beberapa program yang mengalami perubahan menjadi terhambat.
- b) Masih adanya tumpang tindih terkait tupoksi dengan instansi/SKPD lain mengingat perubahan dari Badan ke Dinas dengan penambahan wewenang di bidang penanaman modal, pengawasan lapangan untuk izin prinsip masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih tupoksi, sehingga timbul permasalahan terkait dengan penerbitan izin.
- c) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik saja yang realisasinya keuangannya 77,50%, hal ini dikarenakan realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan tiap bulannya yang tidak bisa diprediksi. Pada anggaran induk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dalam rencana kerja dibuat satuan ukuran untuk ketiga komponen tersebut adalah 3 (tiga) jenis yaitu Air, Listrik dan Telepon. Namun pada anggaran perubahan adanya penambahan belanja paket indihome dan tambah daya listrik setelah adanya rehabilitasi gedung baru.
- d) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor tidak bisa terealisasi pada tahun 2017 karena adanya gagal lelang pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) sehingga presentase realisasi menjadi 0%;
- e) Program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng masih terkendala oleh keterbatasan personil baik di bidang teknis maupun administrasi dan keuangan. Kapasitas staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2017 berjumlah 34 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 12 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 53 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 89 orang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya keterlibatan pemuda secara aktif dalam kegiatan kepemudaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan
- b) Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga

n. Urusan Statistik

- a) Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Statistik sebagian besar adalah pegawai dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang sudah dibubarkan, tidak ada sumber daya manusia yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;

o. Urusan Persandian

Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara negatif, kurangnya sarana dan prasarana pengamanan data dan informasi yang dimiliki, dan keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah, khususnya bidang persandian

p. Urusan Kebudayaan

- a) Melemahnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih terhadap penguasaan aksara Bali;
- b) Pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang;
- c) Terbatasnya ruang bagi para seniman untuk menampilkan hasil karyanya;

q. Urusan Perpustakaan

- a) Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka yang dimiliki disemua jenis perpustakaan.
- b) Tidak adanya petugas khusus yang menangani/mengelola perpustakaan sekolah dasar maupun perpustakaan masyarakat.
- c) Kurangnya sarana mobil keliling dibandingkan luas wilayah yang dilayani.

r. Urusan Kearsipan

masih rendahnya minat dan terbatasnya tenaga di bidang arsiparis,

C. URUSAN PILIHAN

a. Urusan Pariwisata

- a) Masih banyaknya Daya Tarik Wisata yang belum tertata, dikelola dan terpelihara secara optimal;
- b) Promosi kepariwisataan belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kepariwisataan, baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata;

- c) Kualitas Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata masih kurang dan belum memadai;
- d) Aksesibilitas ke Buleleng melalui ruas jalan Mengwitani-Singaraja yang berkelok-kelok mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Buleleng.

b. Urusan Pertanian

- a) Masih adanya gangguan penyakit baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun pada ternak. Pengalaman menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini kondisi iklim sulit diprediksi. Anomali iklim (beberapa banjir/kekeringan) sulit diramalkan dengan tepat (baik kapan terjadi maupun intensitasnya). Gangguan anomali iklim erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit ternak yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara tuntas;
- b) Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi. Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga;
- c) Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal. Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima;

c. Urusan Perdagangan

- a) Masih minimnya jaringan pasar yang terbentuk;
- b) Masih banyaknya pasar desa yang memerlukan pembenahan sebagai upaya peningkatan perekonomian perdesaan;

- c) Masih lemahnya interaksi antar golongan pedagang, yang menyebabkan pedagang golongan ekonomi lemah sulit mengembangkan usahanya;
- d) Kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada di Pasar;

d. Urusan Perindustrian

- a) Keterampilan Sumber Daya Manusia masih rendah (SDM Pengerajin);
- b) Sarana Produksi belum memadai;
- c) Mutu Produk belum Optimal;
- d) Pengenalan Produk Unggulan belum merata.

D. URUSAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

a. Perencanaan

- a) Belum optimalnya dokumen perencanaan yang dihasilkan terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja, dimana keselarasan antar dokumen perencanaan perlu ditingkatkan;
- b) Belum optimalnya partisipasi/peran bidang sektoral dalam mengawal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Sektoral pada masing-masing Sektor Bidang.

b. Keuangan

- a) Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan akuntansi;
- b) Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;

- c) Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
- c. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- a) Masih terdapat ketimpangan antara jumlah jabatan struktural dengan jumlah pegawai yang memiliki golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan
 - b) Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal
 - c) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja
- d. Penelitian dan Pengembangan
- a) Belum optimalnya fungsi kelitbangan daerah, karena belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, seperti untuk tenaga fungsional peneliti di Kabupaten Buleleng belum memiliki;
 - b) Atensi dari pimpinan daerah tentang Urusan Litbang ini dirasa masih belum maksimal, dimana masih banyak kebijakan pembangunan daerah yang diambil belum melalui kajian atau pun penelitian terlebih dahulu;
 - c) Fungsi kelitbangan ternyata masih banyak dilakukan oleh SKPD yang tidak mempunyai fungsi kelitbangan, karena sosialisasi tentang fungsi kelitbangan masih minim dilakukan.
- e. Pengawasan
- a) Masih adanya obrik yang belum paham dalam menindaklanjuti rekomendasi/hasil temuan;
 - b) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik tidak pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi.

f. Sekretariat Daerah

- a) Kurangnya Sarana dan Prasarana berupa Sekretariat UKS Kecamatan sebagai penunjang sarana kegiatan.
- b) Beralihnya SMA ke Provinsi Bali sehingga tidak bisa mewujudkan pelaksanaan Jambore maupun Monev terhadap SMA /SMK karena belum adanya Regulasi yang mengatur.

g. Sekretariat DPRD

- a) Jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang cukup padat;
- b) Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD sering tidak sesuai dengan anggaran kas, sehingga ketersediaan dana untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sering kurang dan mengganggu ketersediaan dana kegiatan lainnya

h. Kewilayahan

- a) Kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan
- b) Pelaporan hasil Musrenbang di beberapa desa tidak tepat waktu karena pelaksanaan Musrenbangdes kurang optimal dan kurang
- c) mendapat perhatian lembaga yang ada di desa serta kurang didukung kualitas SDM di Desa yang bersangkutan.
- d) Sinyal Internet terbatas sehingga sebagian besar Desa tidak bisa mengakses / tidak bisa menginput Profil Desa
- e) Masyarakat Kurang memahami masalah Peraturan-peraturan Daerah karena masih rendahnya Sumber Daya Manusia di beberapa desa dan kurangnya sarana/prasarana dan Sumber Daya Manusia personil dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- f) Pelaksanaan kegiatan UKS di Kecamatan Sawan belum maksimal karena kurangnya fasilitas pendukung .

- g) Pengelolaan sampah dan Pelayanan PATEN yang belum maksimal karena kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat serta kurangnya sarana/ prasarana pendukung.
- h) Sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan saat ini merupakan hal yang baru bagi pengelolaan keuangan di kantor Camat Sawan sehingga masih banyak belajar baik pihak PPK. Bendahara maupun PPTK;
- i) Dalam hal pengamprahan dana. masih belum jelas dan masih belum ada aturan/tata cara yang pasti dan kelengkapan administrasi yang benar sehingga pengelola anggaran harus sering bolak-balik ke Kabupaten untuk memperbaiki dokumen amprahan. dimana hal ini sangat banyak menghabiskan waktu dan kegiatan yang akan dilaksanakan. tidak dapat berjalan lancar.

i. Urusan Kesatuan Bangsa

- a) Masih perlu ditingkatkannya wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa di kalangan masyarakat
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
- c) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik, kedewasaan perilaku berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dalam empat tahun terakhir cenderung menurun. Pada rentang waktu 2013-2016 laju pertumbuhannya melambat dari 7,15% pada tahun 2013 menjadi 6,96% pada tahun 2014, menurun kembali menjadi 6,11% pada tahun 2015 serta mengalami perlambatan kembali menjadi 6,01% pada tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Buleleng Tahun 2016 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 6,24%. Sedangkan indikator ekonomi Buleleng tahun berjalan diperkirakan lebih baik seiring dengan membaiknya perekonomian Bali, berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional pada tahun 2017, mengindikasikan perkembangan positif, maka laju pertumbuhan ekonomi Buleleng diperkirakan tumbuh sebesar 6,20%. (Gambar 3.1).

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang ke arah positif ini mengindikasikan semakin mantapnya kinerja sektor-sektor/lapangan usaha yang berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.



Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2017

*) Angka sementara

**) Angka perkiraan sementara

Gambar 3.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Periode Tahun 2013-2017

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Walaupun pertumbuhan ekonomi secara agregat mengalami perlambatan namun nilai nominal PDRB Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja kegiatan ekonomi, namun peningkatannya tidak secepat pada tahun sebelumnya.

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2013 PDRB Harga Berlaku mencapai Rp19.144.313.060.000.-, di tahun 2014 PDRB Harga Berlaku meningkat menjadi Rp22.354.955.400.000,-. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp25.496.855.340.000. pada Tahun 2016 PDRB Harga Berlaku menjadi Rp28.068.539.860.000,- sedangkan pada tahun berjalan diperkirakan mencapai Rp31.192.568.369.000,-.

Sejalan dengan perkembangan PDRB Harga Berlaku, menurut harga konstan pada tahun 2013 PDRB Harga Konstan mencapai sebesar Rp16.587.190.980.000.- Sedangkan di tahun 2014 PDRB Harga Konstan mencapai sebesar Rp17.741.753.460.000,-. Pada 2015 diperkirakan meningkat menjadi Rp18.828.093.020.000. Pada Tahun 2016 PDRB Harga Konstan menjadi Rp19.959.929.540.000*) dan pada Tahun berjalan diperkirakan mencapai Rp21.197.445.171.000,-**).

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun terakhir secara rinci disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. : Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2013-2017

No	Tahun	PDRB Harga Berlaku (Rp)	PDRB Harga Konstan (Rp)
1	2013	19.144.313.060.000	16.587.190.980.000
2	2014	22.354.955.400.000	17.741.753.460.000
3	2015	25.496.855.340.000	18.828.093.020.000
4	2016*	28.068.539.860.000	19.959.929.540.000
5	2017**	31.192.568.369.000	21.197.445.171.000

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2017

*) Angka sementara

**) Angka perkiraan sementara

3. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat berimplikasi pada perkembangan pendapatan perkapita penduduk Buleleng dimana dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB Perkapita mencapai sebesar Rp29.990.000,- di tahun 2014 mencapai sebesar Rp34.780.000,-. Pada Tahun 2015 menjadi Rp39.448.773,-. Pada tahun 2016 mencapai Rp43.175.730,- serta pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp47.724.250,- Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng secara rinci tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 : Data Perkembangan PDRB Perkapita Kab. Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017

NO.	TAHUN	PDRB HARGA BERLAKU (Rp)	PDRB PER KAPITA (Rp)
1	2013	19.144.313.060.000	29.990.000
2	2014	22.354.955.400.000	34.780.000
3	2015	25.496.855.340.000	39.448.773
4	2016*	28.068.539.860.000	43.175.730
5	2017**	31.192.568.369.000	47.724.250

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2017 (data diolah)

*) Angka sementara

**) Angka perkiraan sementara

4. Struktur Perekonomian

Struktur Perekonomian Buleleng memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kontribusi sektor perekonomian Provinsi Bali. Perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor non pertanian, khususnya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan Indikator Struktur perekonomian Buleleng rentang waktu tahun 2014-2016 tidak banyak mengalami pergeseran kategori dan masih di dominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kondisi ini terlihat dari sumbangannya yang paling besar dalam pembentukan PDRB berdasarkan atas dasar Harga Berlaku. Tahun 2014-2016, berturut-turut kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 22,04%; 22,87%; dan 22,68%, kemudian kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi sebesar 17,79%; 17,92% dan 18,32% disusul kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,42%; 11,44% dan 11,02%, konstruksi sebesar 8,55%; 8,55% dan 8,37%, Jasa Pendidikan sebesar 6,62%; 6,69% dan 7,25%, sedangkan kategori lainnya memberikan kontribusi dibawah 5%. Perkembangan Kategori-kategori pembentuk PDRB lainnya rentang tahun 2014-2016 tersaji pada tabel .3.4.

Tabel 3.4: Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB Kab.Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	PDRB Harga Berlaku 2014	PDRB Harga Berlaku 2015*	PDRB Harga Berlaku 2016**	PDRB Harga Konstan 2014	PDRB Harga Konstan 2015*	PDRB Harga Konstan 2016**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,04	22,87	22,68	21,72	21,50	20,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1,40	1,21	1,31	1,38	1,20	1,24
C	Industri Pengolahan	5,87	5,97	5,88	5,89	5,97	5,83

No	Tahun	PDRB Harga Berlaku 2014	PDRB Harga Berlaku 2015*	PDRB Harga Berlaku 2016**	PDRB Harga Konstan 2014	PDRB Harga Konstan 2015*	PDRB Harga Konstan 2016**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,12	0,14	0,13	0,13	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,13	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	8,55	8,55	8,37	8,57	8,47	8,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,42	11,44	11,02	11,69	11,85	11,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1,34	1,25	1,18	1,38	1,32	1,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,79	17,92	18,32	15,14	15,14	15,59
J	Informasi dan Komunikasi	5,17	5,21	5,32	6,24	6,46	6,69
K	Jasa keuangan dan Asuransi	4,62	4,36	4,25	4,49	4,45	4,41
L	Real Estat	5,17	4,78	4,48	5,54	5,38	5,20
M, N	Jasa Perusahaan	0,63	0,63	0,66	0,66	0,67	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,11	5,14	6,22	6,25	6,25
P	Jasa Pendidikan	6,62	6,69	7,25	6,91	7,11	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	2,01	2,08	2,13	2,18	2,22
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	1,74	1,74	1,77	1,74	1,76	1,79
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2017

*) Angka sementara

**) Angka perkiraan sementara

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

1. Tantangan Perekonomian Daerah

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja periode 2017-2022, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya, dapat dirumuskan beberapa tantangan ataupun permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut.

1. Meskipun total penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) selama ini telah melampaui target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Hal ini antara lain disebabkan oleh :
 - a) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam pemungutan pendapatan daerah karena sering berbenturan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
 - b) Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
 - c) Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan Iptek terutama dalam bidang pelayanan.
2. Selama ini rasio kemandirian keuangan daerah terus mengalami peningkatan, namun nilainya rata-rata masih di bawah 11%. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah belumlah memadai. Setidaknya nilai rasio tersebut adalah 20%, sehingga ketergantungan pembiayaan daerah terhadap sumber-sumber pendanaan lainnya semakin berkurang.
3. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Bidang Investasi yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Buleleng pada umumnya masih belum begitu banyak, karena masih kurangnya promosi potensi investasi yang ada. Hal ini dikarenakan kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas. kondisi infrastruktur yang

memadai merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah;

5. Perspektif investor bahwa prosedur perizinan dipandang perlu dipermudah dengan tidak mengesampingkan regulasi yang berlaku;
6. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal;
7. Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas;
8. Terbatasnya investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran dan tidak merusak lingkungan.
9. Pelayanan perizinan belum optimal;
10. Iklim investasi belum sepenuhnya kondusif;
11. Sarana dan prasarana penunjang investasi seperti listrik, air bersih dan infrastruktur jalan masih terbatas;
12. Kualitas SDM yang mengelola investasi daerah masih relatif rendah;
13. Kondisi stabilitas politik yang belum sepenuhnya menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi;

2. Prospek Perekonomian Daerah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perekonomian Kabupaten Buleleng belakangan ini perkembangannya cukup positif, baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi, PDRB maupun kinerja pendapatan daerah, khususnya PAD yang terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi dimaksud dan mencermati dinamika perekonomian regional maupun nasional, maka dapat diprediksi prospek perekonomian Kabupaten Buleleng akan semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan investasi di kabupaten Buleleng, pembangunan infrastruktur penunjang investasi serta pengelolaan anggaran (APBD) yang berbasis kinerja serta didukung oleh sumberdaya manusia yang semakin berkualitas.

Demikian juga pemerintah selalu berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah yang dapat ditawarkan kepada investor, sehingga investasi semakin meningkat dan tercipta lapangan kerja yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian daerah.

Sejalan dengan upaya-upaya dimaksud maka pada tahun 2019 :

- a. Pertumbuhan ekonomi Buleleng sesuai diproyeksikan mencapai 6,40%
- b. PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan mencapai sebesar Rp37,249 trilyun lebih;
- c. PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan mencapai sebesar Rp23,974 trilyun lebih;
- d. PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan mencapai sebesar Rp56.387.650;
- e. PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan mencapai sebesar Rp36.292.747;
- f. Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai sebesar Rp2,204 trilyun lebih;
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai sebesar Rp382,692 milyar lebih;

3.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan daerah. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, kinerja keuangan daerah betul-betul menjadi indikator kemampuan pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah (OTDA). Berdasarkan indikator tersebut, Penyelenggara Pemerintahan secara bertahap dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah, baik yang bersumber dari dana perimbangan/Pemerintah atasan maupun yang bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri/PAD.

Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp1.572,3 milyar lebih pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp2.124,6 milyar lebih pada tahun 2018 (Tabel 3.6). Demikian juga Pendapatan Asli Daerah terus dipacu peningkatannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi yang didukung penyusunan perangkat lunaknya (Perda), sehingga apa yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum dan mendapat dukungan dari semua unsur masyarakat.

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 s.d. 2018
Kabupaten Buleleng

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2014	1.572.302.259.520,91	1.543.584.630.668,08	98,17%
2	2015	1.905.924.725.893,46	1.937.771.344.639,04	101,67%
3	2016	2.216.158.179.471,89	2.066.173.156.296,41	93,23%
4	2017	2.250.602.146.718,29	2.200.113.190.033,97	97,76%
5	2018	2.124.617.361.710,82	1.018.330.014.468,57	47,93
	Jumlah	10.069.604.673.318,40	8.765.972.336.110,67	87,05
	Rata-Rata	2.013.920.934.663,07	1.753.194.467.221,21	87,05

Sumber : LKPJ Bupati Buleleng 2017

Dalam 4 (empat) tahun terakhir persentase capaian realisasi Pendapatan Daerah tergolong baik, berada pada kisaran 93,23%-101,67% (Tabel 3.5), dengan pertumbuhan rata-rata 87,05%

(Tabel 3.7). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 84,79%. Realisasi PAD baru sebesar Rp. 104,96% pada tahun 2014, mengalami peningkatan menjadi 110,74% pada tahun 2015 sebesar 89,41 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 96,44% pada tahun 2017. Dana transfer ataupun dana perimbangan juga secara berkesinambungan mengalami fluktuasi dan mendominasi pendapatan daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 99,85%. Pada tahun 2014 realisasi Dana Perimbangan sebesar 99,31% terus mengalami fluktuasi hingga mencapai 98,95% pada tahun 2015 mencapai 90,04 pada tahun 2016 dan mencapai 97,36 pada tahun 2017. Sementara pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah setiap tahun tampak berfluktuasi antara 92,06% s.d. 106,17%. Capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu 92,06%.

Tabel 3.6
 Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
 Tahun 2014 - 2018

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Daerah	104,96	110,74	89,41	96,44	42,50
4.2	Pendapatan Transfer	99,31	98,95	90,04	97,36	54,66
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	92,06	102,13	106,18	100,44	33,95
	Realisasi Pendapatan (%)	98,78	103,94	95,21	98,08	43,70

Sumber : LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2017

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada Tabel 3.6. Rasio masing-masing jenis pendapatan tersebut terhadap total pendapatan selama kurun waktu 2014-2018 dapat dicermati pada Tabel 3.6.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah Kabupaten Buleleng tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sesuai dengan proyeksi pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022, maka pendapatan dan belanja Kabupaten Buleleng untuk tahun 2019 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.204.623.209.700,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 382.692.905.000,00
- Dana Perimbangan	Rp 1.270.128.889.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 551.801.415.700,00
b. Belanja Daerah	Rp 2.192.065.766.616,00
- Belanja Tidak Langsung	Rp 1.199.844.221.300,00
- Belanja Langsung	Rp 992.221.545.316,00

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rencana pendapatan daerah yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur serta penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
3. Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2018.
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan

Adapun realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target pendapatan Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH			REALISASI TAHUN (2018) (Realisasi Per Juni 2018)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (2019)
		REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN (2016)	REALISASI TAHUN (2017)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	293.038.467.018,40	282.113.899.551,44	455.195.426.086,89	157.835.381.459,32	382.692.905.000,00
1.1.1	Pajak daerah	110.723.083.169,49	102.239.172.922,72	124.234.062.680,88	50.693.378.151,40	159.650.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	19.944.242.025,00	15.129.372.042,00	17.076.083.898,00	9.432.600.778,00	22.650.000.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.657.529.373,69	15.030.436.696,73	14.141.579.593,58	10.421.798.122,84	15.750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	149.713.612.450,22	149.714.917.889,99	299.743.699.914,43	87.287.604.407,08	184.642.905.000,00
1.2	Dana Perimbangan	983.333.688.183,00	1.305.606.678.444,00	1.313.915.837.606,00	694.257.861.929,00	1.270.128.889.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26.264.579.183,00	29.020.239.685,00	27.927.638.138,00	13.614.151.000,00	33.962.198.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	868.511.959.000,00	982.698.080.000,00	965.435.235.000,00	563.170.531.000,00	965.435.235.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH			REALISASI TAHUN (2018) (Realisasi Per Juni 2018)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (2019)
		REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN (2016)	REALISASI TAHUN (2017)		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	88.557.150.000,00	293.888.358.759,00	320.552.964.468,00	117.473.179.929,00	270.731.456.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	661.399.189.437,64	478.452.578.300,97	431.001.926.341,08	166.236.771.080,25	551.801.415.700,00
1.3.1	Hibah	1.958.000.000,00	158.657.453.052,87	19.098.000.000,00	16.891.763.548,24	88.801.600.000,00
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	194.472.619.721,17	204.521.694.024,66	163.566.162.328,59	31.073.541.332,01	147.675.200.700,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	463.880.845.761,47	246.211.290.706,31	161.193.237.000,00	81.598.866.200,00	141.632.607.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya **)	777.661.500,00	27.611.028.570,00	87.017.797.012,49	36.669.900.000,00	173.692.008.000,00
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	310.062.455,00	108.565.000,00	126.730.000,00	5.700.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.937.771.344.639,04	2.066.173.156.296,41	2.200.113.190.033,97	1.018.330.014.468,57	2.204.623.209.700,00

1). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang Sah.

- a. Pajak Daerah yaitu Pajak hotel, Pajak Restoran Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- b. Retribusi Daerah terdiri Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2019, meliputi:

- a. Optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan pendapatan dua tahun terakhir serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada potensi masing-masing kabupaten.
- c. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah ,

penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah serta retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

- d. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2). Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana

perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut :

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019. Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industry, pembinaan lingkungan social.
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019

Arah kebijakan dana perimbangan tahun 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun

Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai lokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan..
- c. DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.

3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah.
- b. Bagi Hasil dari Pengisian Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Bagi Hasil Retribusi

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2019, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
- b. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019.
- c. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.
- d. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
- b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi

apabila terjadi pelanggaran.

- d. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
- e. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
- f. Optimalisasi pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
- g. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- h. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki

manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban serta rasionalitas.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam

Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan

formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari

APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Kebijakan belanja langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 2) Belanja Pegawai
 - a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).
 - b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan

rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan

kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH			REALISASI TAHUN (2018) (Realisasi Per Juni 2018)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (2019)
		REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN (2016)	REALISASI TAHUN (2017)		
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.121.044.572.791,02	1.274.346.715.664,15	1.165.260.446.524,54	495.761.318.281,67	1.199.844.221.300,00
2.1.1	Belanja Pegawai	911.423.651.844,00	961.075.607.179	799.949.286.565,60	374.260.376.615,00	852.925.450.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	34.159.907.500,00	81.808.234.000	87.731.850.000,00	16.464.575.000,00	75.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00	0	595.390.000,00	-	28.454.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	9.880.037.627,90	15.347.391.380	16.400.000.000,00	4.324.349.225,00	18.250.000.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	160.890.164.524,02	214.928.828.057	255.766.876.712,94	100.712.017.441,67	220.214.771.300,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	190.811.295,10	1.186.655.048	4.817.043.246,00	-	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	744.951.982.556,59	925.858.835.807,17	956.861.411.466,67	255.541.593.104,14	992.221.545.316,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.865.996.555.347,61	2.200.205.551.471,32	2.122.121.857.991,21	751.302.911.385,81	2.192.065.766.616,00

3.2.2.3. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Bagi pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan

terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. RPJMD; c. RKPD; d. salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota; e. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; f. kerangka acuan kegiatan; g. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; i. Rancangan APBD tahun berkenaan; j. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan k. rencana keuangan pinjaman. Untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Sedangkan, untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dapat dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 2) Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 4) Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada

BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu

pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lainlain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 9) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

	URAIAN	JUMLAH				PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN (2019)
		REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN (2016)	REALISASI TAHUN (2017)	REALISASI TAHUN (2018) ((Realisasi Per Juni 2018)	
1	2	5	6	7	8	9
3.1	Penerimaan Pembiayaan	93.312.054.667,91	162.604.812.175,26	77.991.332.042,76	93.851.603.757,16	-
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	93.312.054.667,91	162.704.812.175,26	15.860.271.714,40	93.851.603.757,16	-
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.058.000.000,00	100.000.000,00	10.698.000.000,00	16.500.000.000,00	12.557.443.084,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.058.000.000,00	100.000.000,00	10.698.000.000,00	16.500.000.000,00	12.557.443.084,00
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	91.254.054.667,91	162.604.812.175,26	15.860.271.714,40	77.351.603.757,16	12.557.443.084,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng telah ditetapkan sesuai Bupati terpilih di tahun 2017, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2019.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 yang disampaikan kepada rakyat Buleleng pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Jadi visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi pilihan rakyat Buleleng. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng terpilih tahun 2017-2022 juga merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012-2017. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2012-2017.

4.1.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022 yang menjadi visi RPJMD adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG
YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING
BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA*

Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. Mandiri mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sejahtera mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. Berdaya Saing mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. Berlandaskan *Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;

5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti Tabel 4.1.

Tabel 4.1

keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3		4	5	6
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	% Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	1.236.414.246.708	1% (1.261.266.173.000)
					Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	30,85%	32,70%
		Menurunnya gini ratio	2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/ produktif	% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)	74,29% 2,00%	75,29% 1,89%
		%menurunnya tingkat kemiskinan	3	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	% PMKS yang tertangani % PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	2,75% 4,28%	4,00% 15,40%

Misi 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;

TUJUAN		INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET
							2019
1		2	3		4	5	6
1	Berkem- bangny a produk unggula n daerah	Nilai perdaga ngan produk unggula n daerah	1	Meningkatny a nilai produk pertanian	%peningkatan produksi pertanian	2,30%	2,50%
			2	Berkembang- nya industri berbasis komoditas unggulan daerah	% pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	4,50%	5,90%
					% pertum-buhan sektor pariwisata pada PDRB	6,30%	6,78%
			3	Meningkatny a jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	% usaha mikro dan kecil	95,00%	94,60%
					% koperasi aktif	84,50%	85,50%
					% kelompok binaan yang berhasil	70,00%	76,00%

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3		4	5	7
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	% APS SD (7 - 12 tahun)	99,74%	99,88%
					% APS SMP (13 - 15 tahun)	96,40%	99,75%
					%jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar terakreditasi A	45,72%	63,05%
			2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	% Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	50,00%	60,00%
					Jumlah atlet berprestasi	546	590
		Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)	3	Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,90	4,86
					Angka Kematian Ibu (AKI) Per- 100.000 KH	115	108
					% Balita gizi buruk	0,060%	0,045%
					Prosentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	25%	35%
					Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Pari- purna	Pari- purna
					% Capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah	76,29%	79,00%
			4	Terkendalnya laju	Terkendalnya	0,60	0,58

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3		4	5	7
				pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	laju pertumbuhan penduduk (LPP)		
					Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,20	2,14
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,068	0,064
					% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih di unit layanan terpadu	90	91
		Indeks Reformasi Birokrasi	6	Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintahan	% Pejabat Struktural dan Fungsional memiliki Kompetensi sesuai Standar	85	87
					Nilai Hasil Evaluasi AKIP Daerah	67,65	75
			7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase SKPD dengan nilai IKM Baik	80	83

Misi 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3	4	5	7
1	Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Indeks partisipasi masyarakat	1 Meningkatkan partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% Meningkatnya swadaya murni masyarakat	3,00%	4,50%
				% Indeks Perkembangan Desa Swasembada	17,05%	19,38%
				% Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu	54,43%	≥ 55,0%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	% Partisipasi angkatan kerja perempuan	16,7	18,3
				% Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	44,48 %	46,30 %

Misi 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3		4	5	7
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	IKM terhadap pelayanan infrastruktur publik	1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Prosentase Infrastruktur Transportasi Terpadu	72,04%	77,20%
					Prosentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	47,70%	54,00%

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2019
1		2	3		4	5	6
1	Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	Indeks budaya lokal	1	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	% Lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	21,10%	29,30%
					% Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	32,61%	67,39%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurun	Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	90,00%	92,00%
					Indeks kualitas lingkungan hidup	63,18	65,91

4.2 Prioritas Pembangunan

Visi, misi dan sasaran pokok tersebut menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan sasaran Propinsi Bali, pencapaian MDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 adalah : “SINERGITAS ANTAR SEKTOR GUNA Mendukung Pembangunan Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2019 sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

1.1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

- a) Program Pendidikan Non Formal
- b) Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan
- c) Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas PAUD
- d) Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI
- e) Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS
- f) Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

2. Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- j) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- k) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- l) Program Kesehatan Tradisional
- m) Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

- n) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- o) Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- p) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- q) Program Pelayanan Kesehatan Dasar
- r) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
- s) Upaya Kesehatan Keluarga

2.2. Rumah Sakit Umum Daerah

- a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan
- b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- d) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- g) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- i) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- j) Program Pembangunan Fasilitas Umum
- k) Program Perencanaan Tata Ruang
- l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- m) Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

- n) Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
 - o) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- 4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Perumahan
 - 4.1. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
 - a) Program Pengembangan Perumahan
 - b) Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - c) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
 - d) Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 - e) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- 5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - 5.1. Dinas Pemadam Kebakaran
 - a) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - b) Program Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - c) Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran
 - 5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a) Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana
 - b) Program Kedaruratan Bencana
 - c) Program Pemulihan Pasca Bencana
- 6. Sosial
 - 6.1. Dinas Sosial
 - a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c) Program pembinaan anak terlantar
- d) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- e) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- g) Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
- h) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- i) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

1.1. Dinas Tenaga Kerja

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d) Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan

3. Pangan

3.1 Dinas Ketahanan Pangan

- a) Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
- b) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- c) Program Pengembangan Keamanan Pangan
- d) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

4. Pertanahan

4.1 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

- a) Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- c) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

5.1 Dinas Lingkungan Hidup

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
- g) Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- h) Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
- b) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- c) Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
- d) Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- c) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e) Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- f) Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- g) Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan
- h) Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a) Program Keluarga Berencana
- b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c) Program pelayanan kontrasepsi
- d) Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- e) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- f) Program Pengembangan Data dan Informasi
- g) Program Pengendalian Penduduk

9. Perhubungan

9.1. Dinas Perhubungan

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- c) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- d) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

10. Komunikasi dan Informatika

10.1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

- a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d) Program kerjasama informasi dan media massa
- e) Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- f) Program Pengelolaan Layanan e-Government

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c) Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- d) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- e) Program Pengembangan Usaha Koperasi
- f) Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

12. Penanaman Modal

12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b) Program Perencanaan Dan Peningkatan Realisasi Investasi
- c) Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan
- d) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A
- e) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B

13. Kepemudaan dan Olahraga

13.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- b) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- d) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- e) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- 14. Statistik
 - 14.1. Dinas Statistik
 - a) Program pengembangan data/informasi /statistik daerah
 - b) Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah
- 15. Persandian
 - 15.1. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
 - a) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 16. Kebudayaan
 - 16.1. Dinas Kebudayaan
 - a) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 17. Perpustakaan
 - 17.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - b) Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan
 - c) Program Peningkatan SDM dan Pengembangan Perpustakaan
 - d) Program Pembinaan dan Otomasi
- 18. Kearsipan
 - 18.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - c) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

- d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

1.1. Dinas Perikanan

- a) Program pengembangan budidaya perikanan
- b) Program pengembangan perikanan tangkap
- c) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
- e) Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2. Pariwisata

2.1. Dinas Pariwisata

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c) Program Pengembangan Kemitraan
- d) Program Pengembangan Industri Pariwisata

3. Pertanian

3.1. Dinas Pertanian

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- g) Program peningkatan produksi hasil peternakan
- h) Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

- i) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- j) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- k) Program Peningkatan Produksi Hortikultura
- l) Program Peningkatan Produksi Perkebunan

4. Perdagangan

4.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- c) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
- e) Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan

5. Perindustrian

5.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- c) Program Penataan Struktur Industri
- d) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

6. Transmigrasi

6.1 Dinas Tenaga Kerja

- a) Program Transmigrasi Regional

D. PENUNJANG URUSAN

1. Perencanaan

1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

- a) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- e) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

2. Keuangan

2.1. Badan Keuangan Daerah

- a) Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan
- b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c) Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah
- d) Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah
- e) Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- f) Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset
- g) Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset
- h) Program Pendataan dan Pengembangan PAD
- i) Program Peningkatan dan Pelayanan PAD

3. Kepegawaian

3.1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur
- b) Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN
- c) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- d) Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur

4. Penelitian dan Pengembangan

- a) Program Penelitian dan Pengembangan

E. PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

- a) Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan
- b) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- c) Program Pembakuan Nama Rupabumi
- d) Program Penegasan Batas Daerah
- e) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- f) Program Pembinaan dan Fasilitasi Peraturan Desa
- g) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur
- h) Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan
- i) Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- j) Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan
- k) Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- l) Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan
- m) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

2. Sekretariat DPRD

- a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b) Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan

3. Inspektorat

- a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- c) Program Penguatan Maturitas SPIP

4. Kewilayahan

4.1. Kecamatan Tejakula

- a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
- b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
- c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan
- d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
- e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan

4.2. Kecamatan Kubutambahan

- a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
- b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
- c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan
- d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib

e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Peningkatan
------------------------------------------------------------------------------	-------------

4.3. Kecamatan Sawan

a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Peningkatan
b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan	Pemerintah
c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Peningkatan
d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Linmas Trantib	Peningkatan
e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Peningkatan

4.4. Kecamatan Sukasada

a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Peningkatan
b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan	Pemerintah
c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Peningkatan
d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Linmas Trantib	Peningkatan
e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Peningkatan

4.5. Kecamatan Buleleng

a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Peningkatan
b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan	Pemerintah
c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Peningkatan
d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Linmas Trantib	Peningkatan

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan | Peningkatan |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|

4.6. Kecamatan Banjar

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum | Peningkatan |
| b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan | Pemerintah |
| c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan | Peningkatan |
| d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib | |
| e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan | Peningkatan |

4.7. Kecamatan Seririt

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum | Peningkatan |
| b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan | Pemerintah |
| c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan | Peningkatan |
| d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib | |
| e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan | Peningkatan |

4.8 Kecamatan Gerokgak

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum | Peningkatan |
| b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan | Pemerintah |
| c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan | Peningkatan |
| d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib | |

- e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan

4.9 Kecamatan Busungbiu

- a) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
- b) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
- c) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan
- d) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
- e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan

5. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- d. Program koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan

5.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program pendidikan politik masyarakat

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan ini disusun untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, dipandang perlu untuk menyusun proyeksi pendapatan secara realistis dengan memperhatikan peluang dan keterbatasan yang ada.

5.1.1. Proyeksi Pendapatan

Perencanaan pembangunan menyangkut kondisi masa depan yang belum pasti. Untuk keperluan penyusunan program pembangunan yang baik dan terukur, maka masa depan yang belum pasti tersebut perlu diperkirakan kondisinya agar strategi dan kebijakan dapat ditentukan secara lebih tepat dan terarah. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi atau prediksi pendapatan untuk tahun ke depan menjadi sangat penting.

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan analisa kecenderungan sederhana, yang didasarkan pada pemikiran bahwa perkiraan masa datang sangat ditentukan oleh kenyataan di masa yang lalu. Bila perkembangan di masa lalu menunjukkan perkembangan yang pesat, maka prediksi perkembangan di masa yang akan datang juga menunjukkan fenomena yang sama, dengan asumsi tidak terjadi perubahan yang fundamental terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

Tabel 5.1
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2019

Periode	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan
Tahun Awal 2017	351.807.706.438,55	1.338.584.136.000,00	466.998.965.496,54	2.157.390.807.935,09
2018	371.366.874.000,00	1.270.128.889.000,00	483.121.598.710,82	2.124.617.361.710,82
2019	412,098.900.000,00	1.334.905.500.000,00	486.132.500.000,00	2.233.136.900.000,00
2020	457.361.200.000,00	1.402.985.600.000,00	511.956.100.000,00	2.372.303.000.000,00
2021	507.345.900.000,00	1.474.537.900.000,00	541.647.100.000,00	2.523.530.900.000,00
Tahun Akhir 2022	562.087.400.000,00	1.549.739.300.000,00	573.731.700.000,00	2.685.558.500.000,00
Pertumbuhan (%)	10,27	4,40	3,75	5,28

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan metode proyeksi tersebut, dapat diperkirakan ketersediaan pendanaan pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun ke depan mengalami peningkatan secara moderat, yaitu; sebesar 5,28% rata-rata per tahun, sehingga pada akhir periode perencanaan total pendapatan Kabupaten Buleleng akan mencapai sebesar Rp. 2.685,6 miliar lebih.

Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa PAD diperkirakan akan mengalami peningkatan secara moderat, yaitu: sebesar 10,27% rata-rata per tahun, sehingga pada akhir periode perencanaan jumlah PAD yang tersedia sebesar Rp. 562,1 miliar lebih. Sementara itu, Dana Perimbangan diperkirakan juga akan mengalami peningkatan secara minimal, yaitu: sebesar 4,40% rata-rata per tahun, sehingga pada akhir periode perencanaan jumlah Dana Perimbangan yang tersedia sebesar Rp. 1.549,7 miliar lebih. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan akan mengalami peningkatan secara moderat, yaitu: sebesar 3,75% rata-rata per tahun, sehingga pada akhir periode perencanaan jumlah pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai sebesar Rp. 573,7 miliar lebih.

Adapun proyeksi PAD dengan masing-masing komponennya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.2
 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Dearah Lainnya yang Sah	Total Pendapatan Asli Daerah
Tahun Awal 2017	143.297.958.095,53	20.486.873.430,00	15.029.631.799,22	172.993.243.113,80	351.807.706.438,55
2018	151.462.856.000,00	21.511.113.000,00	15.750.000.000,00	182.642.905.000,00	371.366.874.000,00
2019	168.075.500.000,00	23.870.500.000,00	17.477.500.000,00	202.675.400.000,00	412.098.900.000,00
2020	186.535.900.000,00	26.492.300.000,00	19.397.100.000,00	224.936.000.000,00	457.361.200.000,00
2021	206.922.200.000,00	29.387.600.000,00	21.517.000.000,00	249.519.100.000,00	507.345.900.000,00
Tahun Akhir 2022	229.248.700.000,00	32.558.400.000,00	23.838.600.000,00	276.441.700.000,00	562.087.400.000,00

Sumber : Hasil Analisa

Sementara, proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan beserta bagian-bagiannya dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 5.3
 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Dana Bagi Hasil (Pajak/Bukan Pajak)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Perimbangan
Tahun Awal 2017	35.522.652.000,00	982.698.080.000,00	320.363.404.000,00	1.338.584.136.000,00
2018	33.962.198.000,00	965.435.235.000,00	270.731.456.000,00	1.270.128.889.000,00
2019	35.694.300.000,00	1.014.672.400.000,00	284.538.800.000,00	1.334.905.500.000,00
2020	37.514.700.000,00	1.066.420.700.000,00	299.050.200.000,00	1.402.985.600.000,00
2021	39.427.900.000,00	1.120.808.200.000,00	314.301.800.000,00	1.474.537.900.000,00
Tahun Akhir 2022	41.438.800.000,00	1.177.969.400.000,00	330.331.200.000,00	1.549.739.300.000,00

Sumber : Hasil Analisa

Sedangkan, komponen ketiga dari pendapatan daerah, yaitu: proyeksi lain-lain penerimaan yang sah selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
 Proyeksi Lain-Lain Penerimaan Yang Sah Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Bagi Hasil Pajak Provinsi	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya*)	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Awal 2017	199.809.020.496,54	249.994.837.000,00	17.195.108.000,00	466.998.965.496,54
2018	148.675.383.710,82	141.632.607.000,00	192.813.608.000,00	483.121.598.710,82
2019	149.602.000.000,00	142.515.300.000,00	194.015.300.000,00	486.132.500.000,00
2020	157.548.900.000,00	150.085.800.000,00	204.321.400.000,00	511.956.100.000,00
2021	166.686.000.000,00	158.790.000.000,00	216.171.100.000,00	541.647.100.000,00
Tahun Akhir 2022	176.559.700.000,00	168.196.000.000,00	228.976.100.000,00	573.731.700.000,00

Keterangan: *) termasuk pendapatan hibah
 Sumber: Hasil Analisa

Dari target dan proyeksi pendapatan tersebut, maka diharapkan kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan semakin meningkat. Sebaliknya ketergantungan pendanaan dari pusat semakin menurun.

Tabel 5.5
 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Penerimaan yang Sah	Total Pendapatan
Tahun Awal 2017	16,31	62,05	21,65	100,00
2018	17,48	59,78	22,74	100,00
2019	18,45	59,78	21,77	100,00
2020	19,28	59,14	21,58	100,00
2021	20,10	58,43	21,46	100,00
Tahun Akhir 2022	20,93	57,71	21,36	100,00

Sumber : Hasil Analisa

Target tersebut di atas memberi indikasi bahwa tingkat kemandiraan daerah semakin lebih baik, dimana porsi PAD pada akhir periode mencapai sekitar 20,93% dari total pendapatan. Pada sisi yang lain, ketergatangan daerah terhadap pemerintah pusat semakin menurun, dari 62,05% pada awal periode menjadi 57,71% pada akhir periode. Sementara itu, kontribusi lain-lain pendapatan yang sah relatif tetap, yaitu; sebesar 21,36% dari seluruh pendapatan.

5.1.2. Proyeksi Belanja

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompleks sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat, demi mewujudkan masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, maka rancangan belanja Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun ke depan bersifat ekspansif tetapi moderat. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi inklusif dan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

Tabel 5.6
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung		Total Belanja
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)
Tahun Awal 2017	1.176.666.558.130,83	54,84	969.124.249.804,26	45,16	2.145.790.807.935,09
2018	1.164.553.107.390,83	53,92	995.366.940.163,79	46,08	2.159.920.047.554,62
2019	1.257.005.200.000,00	53,86	1.076.622.800.000,00	46,14	2.333.628.000.000,00
2020	1.322.739.500.000,00	53,36	1.156.317.100.000,00	46,64	2.479.056.600.000,00
2021	1.393.656.600.000,00	52,85	1.243.433.100.000,00	47,15	2.637.089.700.000,00
Tahun Akhir 2022	1.403.204.300.000,00	50,00	1.403.204.300.000,00	50,00	2.806.408.600.000,00
Pertumbuhan (%)	3,64	(1,81)	7,73	2,08	5,99

Sumber : Hasil Analisa

Dengan memperhatikan ambang batas defisit, serta memperhatikan keseimbangan porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka Total Belanja Kabupaten Buleleng dapat diproyeksikan atau dirancang sangat moderat, yaitu mengalami peningkatan sebesar 5,99% rata-rata per tahun, dimana pada tahun 2018 Total Belanja ditargetkan sebesar Rp. 2.159,9 miliar lebih meningkat menjadi Rp. 2.806,4 miliar lebih pada tahun 2022.

Untuk menjamin terselenggaranya administrasi pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pelayanan, Belanja Tidak Langsung diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 3,64% per tahun. Pada tahun 2018, Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp. 1.164,6 miliar lebih meningkat menjadi Rp. 1.403,2 miliar lebih pada tahun 2022. Pada sisi lain, untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, Belanja Langsung diproyeksikan akan meningkat sebesar 7,73% rata-rata per tahun. Pada tahun 2018, Belanja Langsung diproyeksikan sebesar Rp. 995,4 miliar lebih meningkat menjadi Rp. 1.403,2 miliar lebih pada tahun 2022.

Dengan proyeksi tersebut di atas, dapat tercipta keseimbangan porsi alokasi dana yang semakin proporsional antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, di mana pada akhir periode (tahun 2022) porsi alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar 50,00% dan Belanja Langsung sebesar 50,00%.

Selanjutnya, rincian rancangan belanja tidak langsung menurut komponen dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil (Provinsi, Pemda lainnya, Desa)	Bantuan Keuangan (Provinsi Pemda Lainnya, Desa)	Belanja Tidak Terduga	Total Belanja Tidak Langsung
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tahun Awal 2017	818.897.683.505,77	93.137.600.000,00	811.000.000,00	16.400.000.000,00	245.169.716.000,00	2.250.558.625,06	1.176.666.558.130,83
2018	822.928.379.865,77	71.129.275.000,00	28.454.000.000,00	17.297.396.900,00	220.214.771.300,00	4.529.284.325,06	1.164.553.107.390,83
2019	888.259.400.000,00	76.776.100.000,00	30.712.900.000,00	18.670.600.000,00	237.697.300.000,00	4.888.900.000,00	1.257.005.200.000,00
2020	934.710.300.000,00	80.791.100.000,00	32.319.000.000,00	19.647.000.000,00	250.127.500.000,00	5.144.500.000,00	1.322.739.500.000,00
2021	984.823.800.000,00	85.122.600.000,00	34.051.800.000,00	20.700.300.000,00	263.537.800.000,00	5.420.300.000,00	1.393.656.600.000,00
Tahun Akhir 2022	1.037.976.100.000,00	89.716.800.000,00	35.889.600.000,00	21.817.600.000,00	277.761.300.000,00	5.712.900.000,00	1.468.874.300.000,00

Sumber : Hasil Analisa

Sementara itu, belanja langsung dirancang cukup moderat selama 5 (lima) tahun ke depan seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total Belanja Langsung
Tahun Awal 2017	-	-	-	969.124.249.804,26
2018	61.176.978.394,90	691.503.323.410,89	242.686.638.358,00	995.366.940.163,79
2019	66.171.100.000,00	747.953.600.000,00	262.498.100.000,00	1.076.622.800.000,00
2020	71.069.300.000,00	803.319.000.000,00	281.928.900.000,00	1.156.317.100.000,00
2021	76.423.600.000,00	863.840.300.000,00	303.169.200.000,00	1.243.433.100.000,00
Tahun Akhir 2022	82.207.200.000,00	929.214.500.000,00	326.112.600.000,00	1.337.534.300.000,00

Sumber : Hasil Analisa

5.1.3. Proyeksi Pembiayaan

Sebagai konsekuensi atas kebijakan yang bersifat ekspansif, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan APBD Kabupaten

Buleleng akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 120,8 miliar lebih pada akhir periode (tahun 2022). Rancangan defisit tersebut masih dalam ambang toleransi, yaitu; masih berada di bawah 4,5% dari total pendapatan.

Tabel 5.9
 Proyeksi Surplus dan Defisit Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 - 2022

Periode	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus (Defisit)	Ambang Batas (%)
Tahun Awal 2017	2.157.390.807.935,09	2.145.790.807.935,09	11.600.000.000,00	-
2018	2.124.617.361.710,82	2.159.920.047.554,62	(35.302.685.843,80)	1,7
2019	2.233.136.900.000,00	2.333.628.000.000,00	(100.491.100.000,00)	4,5
2020	2.372.303.000.000,00	2.479.056.600.000,00	(106.753.600.000,00)	4,5
2021	2.523.530.900.000,00	2.637.089.700.000,00	(113.558.800.000,00)	4,5
Tahun Akhir 2022	2.685.558.500.000,00	2.806.408.600.000,00	(120.850.100.000,00)	4,5

Sumber : Hasil Analisa

Sumber pembiayaan atas defisit tersebut secara konvensional akan menggunakan SILPA. Di samping itu, dapat diupayakan peluang pembiayaan yang lebih kreatif sebagai alternatif, misalnya menerbitkan obligasi daerah.

5.2. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Analisis kerangka pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, yaitu; total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib, mengikat, dan merupakan prioritas utama. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengalokasian harus mempertimbangkan:

- Penerimaan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi itu dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengolahan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali sebagai penyertaan modal sehingga menghasilkan pengembalian investasi bagi kas daerah.

- Penerimaan dari dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus sesuai dengan peruntukannya.
- Penerimaan dari dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil.

Berikut adalah proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dalam periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 5.10
 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
 Periode Tahun 2018 – 2022

Periode	Pendapatan Daerah	Dana Cadaan	SILPA	Total Penerimaan	Belanja Wajib	Kapasitas Fiskal Riil
2018	2.124.617.361.710,82	-	-	2.124.617.361.710,82	1.406.430.800.000,00	718.186.561.710,00
2019	2.233.136.900.000,00	-	51.530.900.000,00	2.284.667.800.000,00	1.336.874.600.000,00	947.793.200.000,00
2020	2.372.303.000.000,00	-	55.175.600.000,00	2.427.478.600.000,00	1.434.495.500.000,00	992.983.100.000,00
2021	2.523.530.900.000,00	-	59.222.800.000,00	2.582.753.700.000,00	1.508.888.100.000,00	1.073.865.600.000,00
2022	2.685.558.500.000,00	-	63.630.500.000,00	2.749.189.000.000,00	1.588.663.400.000,00	1.160.525.600.000,00

Sumber : Hasil Analisa

Dengan proyeksi terebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang fiskal daerah semakin besar, dimana pemeritah daerah dapat melakukan diskreasi dalam pembangunan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang.

5.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

5.3.1. Kebijakan dan Sasaran Keuangan Daerah

Kebutuhan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat yang semakin meningkat, maka dituntut kapasitas daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD untuk dapat melaksanakan berbagai kebutuhan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu mengkaji secara

cermat kebijakan dan sasaran pendapatan daerah, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan akan dapat terwujud tidak terlepas dari dukungan anggaran. Kemampuan keuangan daerah sangatlah menunjang capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terus meningkat setiap tahun. Secara keseluruhan sampai saat ini pendapatan daerah sebagian besar masih bersumber dari dana perimbangan Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan dikaitkan dengan struktur APBD adalah mencakup kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan. Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2018) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).

5.3.2. Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam struktur APBD disamping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pada Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai

dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pihak-Pihak Swasta, sehingga dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga. Penerimaan dimaksud sudah barang tentu legalitasnya didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3.3. Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2019 ini mengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Daerah dengan pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah. Demikian juga langkah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja, sejalan dengan amanat undang-undang tentang anggaran berbasis kinerja. Sedangkan pengalokasian anggaran pada masing-masing program kegiatan didasarkan pada penilaian seberapa besar *output*

maupun *outcome* yang dapat dicapai oleh suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kebijakan pengalokasian anggaran belanja juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengentasan/ penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan dan mendukung pemanfaatan potensi daerah. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan/ kebutuhan mendesak.

5.3.4. Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2018 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari sub pembiayaan penerimaan daerah.

5.3.5. Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD Tahun 2019, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);

- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada Bab V, sudah ditetapkan sasaran dan indikator sasaran. Sasaran dan indikator sasaran (*impact*) yang telah disepakati akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buleleng. Setiap IKU memiliki target capaian yang terukur dan dijabarkan ke dalam beberapa Program Prioritas. Masing-masing program diterjemahkan menjadi indikator program (*outcome*) dengan target tahunan yang terukur sampai periode akhir RPJMD. Setiap program diampu oleh satu SKPD.

Kebijakan pendanaan program didasarkan atas analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan di atas. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program prioritas guna mewujudkan visi daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah terdapat tiga aspek yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.

6.1 Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi merupakan usaha yang dianggap mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi didesain untuk menciptakan *empowering welfare* artinya kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat. Menurut UNDP (2001), pengembangan manusia sebagai aktor pembangunan harus didasarkan pada empat elemen kunci yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Dengan model pemberdayaan (*empowering welfare*), maka peningkatan kesejahteraan dapat diukur melalui pendekatan materi dan non materi yang diterjemahkan dalam 3 (tiga) kelompok indikator antara lain: 1). Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) Kesejahteraan Sosial; 3) seni budaya dan olahraga.

6.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur beberapa bidang yang memiliki esensi bagi pengembangan harkat dan martabat manusia sebagai aktor dalam sistem ekonomi, sistem

politik, sistem budaya dan keagamaan, sistem sosial dan sistem lingkungan hidup. Dalam pengukuran aspek kesejahteraan masyarakat dapat digunakan indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di
Kabupaten Buleleng

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
1	2	3	4
	Fokus Kesejahteran dan Pemerataan Ekonomi		
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah		
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) (%)	6,20	6,40
1.2	Persentase peningkatan nilai investasi	1.236.414.246.708	1% (1.261.266.173.000)
1.3.	Laju inflasi (%)	3,38	3,50
1.4.	PDRB Perkapita (Juta)	47,724	56,387
1.5.	Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)	0,339	0,316
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat		
1.	Pendidikan		
1.1.	Persentase sekolah yang menyertakan pendidikan karakter dan penggalian potensi	5,70	100,00
1.2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	351	355
1.3.	Angka Melek Huruf (%)	99,41	99,51
1.4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,90	7,03
1.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104,46	100,00
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,09	96,85
1.7.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,02	0,01
1.8.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00
1.9.	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97,20	99,12
1.10 .	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs	104,23	100,00
1.11 .	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs	94,60	95,56

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
1	2	3	4
1.12 .	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,04	0,03
1.13 .	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00
1.14 .	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92,66	93,63
2.	Kesehatan		
2.1.	Persentase RT ber PHBS (%)	78,50	83,00
2.2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,06	71,24
2.3.	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran	4,90	4,86
2.4.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,060	0,005
3.	Ketenagakerjaan		
3.1.	Menurunnya angka pengangguran (%)	2,00	1,89
3.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,29	75,29

**6.1.2 Penetapan Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum/
Publik**

Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayanan minimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Tabel 6.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Buleleng

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
	Pelayanan Umum		
1.	Pendidikan		
1.1.	Pendidikan Dasar (SD)		
1.1.1	Persentase sekolah yang telah memenuhi SPM	40,00	60,00
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	99,74	99,88
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk SD/MI	68,51	68,91
1.1.4	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1 : 15	1 : 20
1.1.5	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata (Guru/Kls/ 10.000 Pddk)	1,15	1,29
1.2	Pendidikan Dasar (SMP)		
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	96,40	99,75
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah menengah (Sek/ 10.000 Pddk)	23,86	25,86
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1 : 17	1 : 32
1.2.4.	Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (%)	99,41	99,64
1.3	Fasilitas Pendidikan		
1.3.1	Persentase lembaga pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM	40,00	50,00
1.3.2	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	35,87	37,47
1.4	Pendidikan Usia Dini		
1.4.1	APK Pendidikan Usia Dini (%)	75,32	75,92
1.5	Angka Putus Sekolah		
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,02	0,01
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,04	0,03
1.6.	Angka Kelulusan		
1.6.1	Angka kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
1.6.2	Angka kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00
1.6.3	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97,20	99,12
1.6.4	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92,66	93,63
1.6.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV (%)	91,01	91,05
2	Kesehatan		
2.1	Tingkat akreditasi pelayanan BRSUD Buleleng	Paripurna	Paripurna
2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi madya	5	7
2.3	Rasio Posyandu per Satuan Balita (Bh/10000)	1,12	1,14
2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,150	0,152
2.5	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,00120	0,00122
2.6	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Bh/10000)	13,70	13,74
2.7	Rasio Perawat per Satuan Penduduk (Bh/10000)	115,70	115,74
2.8	Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4(%)	91,70	95,50
2.9	Cakupan pertolongan persalihan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96,68	97,50
2.10	Cakupan desa kelurahan UCI (%)	100,00	100,00
2.11	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan(%)	100,00	100,00
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	100,00	100,00
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB(%)	100,00	100,00
2.14	Cakupan kunjungan bayi(%)	105,40	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pekerjaan Umum		
3.1.	penduduk berakses air minum	82,97	90,00

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
	(%)		
3.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	19,83	36,00%
	Penataan Ruang		
3.1	Pelayanan Informasi tata ruang (%)	100,00	100,00
4	Perumahan		
4.1	Rumah tidak layak huni	87,79%	52,67%
4.2	Pelayanan pengelolaan air limbah	87,98%	90,00%
4.3	Rasio rumah layak huni	0,185	0,190
4.4	Rasio permukiman layak huni	22,7	32,7
4.5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,71	96,23
4.6	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	83,53	90,12
4.7	Persentase permukiman yang tertata	22,7	32,7
4.8	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,069	0,046
4.9	Persentase penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14,29	50,00
4.10	Persentase areal kawasan kumuh	0,069	0,046
4.11	Persentase pengelolaan RTH publik di kawasan perkotaan	76,72	92,11
5	Perencanaan		
5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ya	ya
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ya	ya
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ya	ya
5.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD(%)	100%	100%
6	Perhubungan		
6.1	Pemasangan rambu	67,97%	77,60%
6.2	Perolehan penghargaan WTN (buah)	1	1
6.3	rasio Ijin trayek (unit)	0,70	0,70

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
6.4	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	5.100	5.100
6.5	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	4/1/5	4/1/5
6.6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan umum	90,00	90,00
7	Kependudukan dan Catatan Sipil		
7.1	Persentase perekaman KTP elektronik	96,27	98,30
7.2	Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	92,91	96,00
7.3	cakupan penerbitan akte kematian	66,43	70,50
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,60	0,58
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,2	2,14
8.3	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal , non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	45	47
8.4	Rasio akseptor KB	85,38	86,39
8.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	85,38	86,39
8.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)	3.179	3.091
8.7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5,8	5,6
8.8	Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	37,00	39,00
8.9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	74,33	74,53
8.10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	53,51	53,71
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	37,86	47,86
8.12	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	975	1210

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
8.13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	134	134
8.14	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70,00	72,00
8.15	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1/148	1/148
8.16	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	82,19	84,19
8.17	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85,48	85,48
8.18	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22
8.19	Cakupan peserta KB aktif (%)	85,38	86,39
8.20	Jumlah masyarakat yang mendapatkan konseling KB (%)	85,00	85,00
9	Sosial		
9.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memberikan pelayanan sosial (buah)	18 buah	9 buah
9.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial(%)	4,28	15,40
9.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial(%)	2,75	4,00
10	Kepemudaan dan Olahraga		
10.1	Jumlah Organisasi Pemuda (Buah)	25	29
10.2	Jumlah Organisasi olah raga (buah)	34	36
10.3	Jumlah Kegiatan kepemudaan (Kali)	20	21
10.4	Jumlah Kegiatan olah raga (Kali)	54	59
10.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah /penduduk)	165	167

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
11	Kesatuan bangsa Politik Dalam Negeri		
11.1	Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel (orang)	5.074	5.274
12	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
12.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	68	70
12.2	Opini BPK	WTP	WTP
12.3	Nilai IKM	80	85
13	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
13.1	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,6	6,2
13.2	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	57,70	63,60
13.3	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	85,00	90,00
14	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
14.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	70,00	80,00
14.2	Prosentase penegakan Perda	65,00	75,00
15	Tenaga Kerja		
15.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	32,00	62,00
15.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	40,00	66,00
15.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	54,00	80,00
15.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja setahun (%)	9,88	17,50
15.5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	78,00	85,70
16	Pemberdayaan Masyarakat		

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
	Desa		
16.1	Cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	47,62	54,26
16.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	0,00	12,16
16.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	0,00	40,00
16.4	Persentase PKK aktif	100,00	100,00
16.5	Persentase Posyandu Aktif	62,57	65,36
17	Statistik		
17.1	Buku “Kabupaten dalam angka” (dokumen)	1	1
17.2	Buku “PDRB Kabupaten” (dokumen)	0	1
18	Kearsipan		
18.1	Lembaga/SKPD yang mengelola arsip sesuai standar	30	50
18.2	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (orang)	300	365
19	Informasi dan Komunikasi		
19.1	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	6	6
19.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	12	24
19.3	Pameran/Expo (kali)	2	2
20	Perpustakaan		
20.1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang)	104	219
21	Perindustrian		
21.1	Persentase Pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	4,50	5,90
22	Perdagangan		
22.1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	2,40	3,60
23	UMKM		
23.1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,00	94,60
24	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
24.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,50	47,50
24.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,46	45,10

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
24.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,068	0,064
24.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,169	0,189
24.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu	90,00	91,00
24.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	51,79	51,89
24.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75,00	77,00
24.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	75,00	85,00
24.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00
24.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00
24.11	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	16,85	17,25
25	Pertanahan		
25.1.	Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat	65,30	77,00

6.2 Daya Saing Daerah

Daya saing daerah berkaitan dengan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum, Daya Saing Daerah dapat diukur antara lain dari tingkat daya saing industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, produk unggulan, efisiensi pelayanan birokrasi, efisiensi perdagangan, ketersediaan infrastruktur, keamanan, potensi pasar, kepastian hukum, dan sebagainya. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Buleleng

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (rupiah)	782.000	812.000
1.2	Persentase desa berstatus swasembada	17,05	19,38
1.3	Rasio ketergantungan (%)	50,15	49,09
	Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur		
1.	Lingkungan Hidup		
2.1	Indeks pertanaman padi (IP Padi)	2,2	2,2
2.2.	Persentase penanganan sampah (%)	75,00	77,00
2.3.	Jumlah pengukuran pencemaran status mutu air	8	10
2.4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	79,00	81,00
2.5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	80,00	84,00
2.6.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000 pddk)	57	67
2.7.	Penegakan hukum lingkungan (%)	80,00	83,00
2.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,18	65,00
3.	Fasilitas Wilayah		
3.1	Proporsi Jalan kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	69,71	73,00
3.2.	jembatan kondisi mantap (%)	78,44	81,00
3.3	Irigasi kabupaten dalam kondisi mantap (%)	71,20	74,72
4.	Lembaga Keuangan		
4.1	Koperasi aktif (%)	84,5	85,5
4.2	Jenis dan jumlah bank dan cabang (buah)	38	39
4.3	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (buah)	8	8
	Urusan Pilihan		

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Tahun 2019
1.	Pertanian		
1.1.	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem organik	465	562
1.2.	Produktivitas padi (ton/ hektar)	5,65	5,68
1.3.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	22,40	21,80
1.4	Cakupan bina kelompok petani (%)	50,00	60,00
2.	Kelautan dan Perikanan		
2.1.	Produksi perikanan (ton)	19,494	20,056
2.2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36,38	37,40
2.3.	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (%)	54,34	66,70
3.	Ketahanan Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	114	124
4.	Pariwisata		
4.1	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun	1	1
4.2	Jumlah kunjungan wisata	873.000	962.482
4.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	18,42	18,60
4.4.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	195	200
4.5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	436	449

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2019. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara Pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKPD merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD, masyarakat dan dunia usaha diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2019 sesuai yang tertuang dalam RKPD.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2019 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan baik forum SKPD maupun Musrenbang maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2019 sebagai lampiran dari RKPD.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan serta pengawasan pembangunan.

5. Pada akhir tahun anggaran setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Bupati.



PURU AGUS SURADNYANA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			625.628.214.758,00
1.01.01.	PENDIDIKAN			148.828.071.790,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			148.828.071.790,00
1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan	2.869.789.350,00
1.01.01.1.01.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	10.000 buah	54.963.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	1 tahun	301.270.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan	2 unit	283.706.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan	1 tahun	13.068.450,00
1.01.01.1.01.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselesaikannya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7 Laporan	1.217.896.900,00
1.01.01.1.01.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan - Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor	560 bh/511 bks/780 btl/5 ikat/112 kg/55 ktk	108.468.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1307 Buah, 17 Botol, 10 glg, 146 Kotak, 433Rim	101.477.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	486 bk, 400.000 lbr	65.251.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor	150 buah/250 set/1 Ls	20.825.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab. Buleleng	2 Unit /1 LS	39.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan tabloid	1 tahun	16.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat	350 pegawai	55.850.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	120 OH	160.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	456 OB	431.514.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	6 Kegiatan	1.182.458.380,00
1.01.01.1.01.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Upacara Agama	600 kali	167.700.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	204 OB	313.833.400,00
1.01.01.1.01.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional yang layak	4 Unit, 1 tahun	100.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	10 lembaga	60.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1 Paket	-
1.01.01.1.01.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 laporan	540.924.980,00
1.01.01.1.01.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	2 Kegiatan	455.712.500,00
1.01.01.1.01.01.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian seragam olahraga	253 orang	367.290.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan upacara agama	139 Buah, 1 Ls	88.422.500,00
1.01.01.1.01.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan	1 Kegiatan	150.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD dan SIEVK	22 Dokumen	150.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran SKPD	1 Kegiatan	275.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja	13 Dokumen	275.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi pembangunan daerah bidang pendidikan pemuda dan olahraga	1 Kegiatan	578.690.500,00
1.01.01.1.01.01.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Tersebar nya Informasi Pendidikan	1 Kegiatan	578.690.500,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	10 Kegiatan	1.856.838.070,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.004.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terbentuknya Buta Aksara yang Trampil Kabupaten Buleleng	500 Orang Buta Aksara	419.576.010,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.005.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya praktek life skill	120 orang	89.585.310,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.006.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terbinanya Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	650.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.007.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Terlaksananya Praktek Life Skill	PKBM, SKB dan LKP	26.800.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.18.009.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng	SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng	155.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Terbinanya peserta lomba PTK-PNF ke tingkat propinsi dan tingkat nasional Terdapatnya lomba-lomba dalam gebyar PNF	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional	266.169.230,00
1.01.01.1.01.01.01.18.014.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prsarana PNF	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PNF	10 PKBM	11.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.015.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	18.726.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.016.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terbinanya tutor paket A Setara SD	1 Lembaga PAUD	35.264.210,00
1.01.01.1.01.01.01.18.017.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terlaksananya Pendidikan Paket B setara SMP	10 Lembaga PAUD	184.717.310,00
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Meningkatkan manajemen pembiayaan pendidikan	8 Kegiatan	2.306.126.800,00
1.01.01.1.01.01.01.21.001.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terlaksananya penyebarluasan peraturan - peraturan pemerintah bidang pendidikan	509 Sekolah	1.170.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	- Terlaksananya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya di bidang pendidikan - Terlaksannya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	2 kegiatan	140.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	pemerintah bidang pendidikan Terlaksananya penyebarluasan peraturan - peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	200.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.005.	Pembinaan dewan pendidikan	Terlaksananya kemitraan antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan	1 Lembaga	150.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.007.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya Penyusunan DAPODIK Penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi	270.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya monev dan pelaporan program manajemen pembiayaan pendidikan - Tersusunya Laporan Monev	- 5 Kegiatan - 5 Laporan	90.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.010.	Penyusunan Sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan	Tersusunya SPM, Profil Pendidikan dan SOP	26 Dokumen	86.126.800,00
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan	500 orang / 1 Dokumen	200.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.	Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini	13 Kegiatan	2.560.537.700,00
1.01.01.1.01.01.01.24.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah	2 Sekolah	106.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.008.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Terlaksananya pembangunan gedung serba guna/aula sekolah	1 Sekolah	106.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pembangunan taman dan fasilitas yang nyaman	3 Sekolah	106.400.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.24.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Adanya sarana dan prasarana alat permainan edukatif yang memadai	3 Sekolah	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Adanya mebelair siswa	25 Sekolah	134.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehab gedung PAUD	4 Sekolah	106.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.060.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK Terdapatnya data anak usia dini Tersedianya bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	260 Lembaga PAUD	77.015.700,00
1.01.01.1.01.01.01.24.062.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	240 Orang	220.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.067.	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Anak Usia Dini	Terselenggaranya Lomba Gugus TK Terselenggaranya Lomba UKS Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Kabupaten dan Nasional Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Desa Terselenggaranya Gebyar PAUD Terselenggaranya Panggung Gembira	3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang	334.027.586,92
1.01.01.1.01.01.01.24.068.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD	25 Sekolah	15.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.069.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini	15 lembaga PAUD	2.068.813,08
1.01.01.1.01.01.01.24.070.	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Akreditasi PAUD dan PNF	50 Lembaga	25.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.071.	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	- Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK - Terdapatnya data Anak Usia Dini - Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	- 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD	1.277.425.600,00
1.01.01.1.01.01.01.25.	Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI	Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pendidikan dasar	20	67.050.496.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.079.	Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SD 481 Sekolah	131.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.086.	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	2 Sekolah	186.700.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.25.096.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI	Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	550.600.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.098.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD/MI	1 Unit	-
1.01.01.1.01.01.01.25.102.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI	1 Sekolah	184.800.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.106.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary	15 Unit	1.774.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.108.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	Terlaksananya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	1 Paket	2.317.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.114.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/MI	2 Sekolah	81.548.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.116.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	8 Sekolah	161.496.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.162.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	2 Unit	292.900.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.166.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	2.521.829.920,00
1.01.01.1.01.01.01.25.196.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Terealisasinya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	- 100 Guru - 100 Sekolah Pengguna K.13	455.964.280,00
1.01.01.1.01.01.01.25.201.	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	6 Unit	1.068.800.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.203.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD	Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Dasar Pada Progam Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	481 Sekolah	56.252.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.213.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar SD/MI.	9 Kecamatan	67.134.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.215.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Terlaksananya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/Mi	9 Kecamatan	307.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.227.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD/MI	100 Sekolah	91.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.231.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SD	Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan SD	482 Sekolah	76.700.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.25.235.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	Terealisasinya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	- 60 Guru SD - 60 Sekolah Dasar - 40 Pengawas SD	172.325.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.237.	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	Tersedianya Beasiswa bagi keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	SD 481 Sekolah	357.148.800,00
1.01.01.1.01.01.01.26.	Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS	Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dasar	24 Kegiatan	40.004.013.800,00
1.01.01.1.01.01.01.26.004.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya pengadaan mebeler SMP	1491 Buah	268.176.900,00
1.01.01.1.01.01.01.26.005.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	Terwujudnya rehabilitasi ruang kelas SMP	1 Ruang	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.006.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	6 Unit	-
1.01.01.1.01.01.01.26.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs	Terwujudnya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	1 Ruang	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.008.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP	9 Sekolah, 108 Guru	90.188.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.009.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	Terwujudnya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	1.717.491.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.010.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs	80 Sekolah	33.318.193.372,63
1.01.01.1.01.01.01.26.011.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)	- Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya lomba penataan lingkungan sekolah SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Lomba Adiwiyata SMP Kabupaten Buleleng	- 3 SMP - 50 SMP - 3 SMP	187.177.400,00
1.01.01.1.01.01.01.26.012.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	- Terlaksananya Seleksi OSN tingkat SMP - Terlaksananya FLS2N SMP	1 Kegiatan	-
1.01.01.1.01.01.01.26.013.	Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	Tersedianya Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTS	378 Siswa	600.979.422,63
1.01.01.1.01.01.01.26.014.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs	Terlaksanaya Akreditasi Sekolah SMP/MTs	15 Sekolah	17.595.700,00
1.01.01.1.01.01.01.26.015.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	Terwujudnya monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana	74 Sekolah	212.125.500,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.26.016.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP	Terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng, Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnival SMP	75 Sekolah	101.752.504,74
1.01.01.1.01.01.01.26.017.	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP/MTs)	Tersedianya Beasiswa Untuk Keluarga Tidak Mampu SMP/MTS	Siswa	-
1.01.01.1.01.01.01.26.018.	Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP/ MTs	Terselenggaranya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum	75 Sekolah	147.734.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.019.	Peningkatan kapasitas Asesmen SMP/MTs	Terselenggaranya Workshop Analisis Test, Workshop Asesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	109.788.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.089.	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	1 Ruang	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.097.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Terlaksananya Pembangunan Pagar, Senderan, Lapangan SMP	5 Unit	102.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.115.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	40 Paket	1.268.600.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.234.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	1 Ruang	391.312.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.235.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Terwujudnya Pembangunan Jamban dan WC SMP	11 Ruang	1.009.800.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.236.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	Terwujudnya rehabilitas ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	96.900.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.237.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP	10 Ruang	214.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D4	17 Kegiatan	29.538.408.690,00
1.01.01.1.01.01.01.27.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Tersedianya penbayaran TPG jenjang TK, SD, SMP dan Pengawas serta TKG jenjang SD	3490 Orang	187.144.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.002.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terseleksinya pemilihan GTK Berprestasi dan OGN, Widya Kusuma dan HUT PGRI jenjang TK, SD dan SMP	50 Orang	306.231.900,00
1.01.01.1.01.01.01.27.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	25 Orang	550.729.300,00
1.01.01.1.01.01.01.27.008.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP	Tersedianya dokumen/karya tulis dan terlatihnya guru dalam menyusun karya tulis	42 orang/42 hasil karya	78.165.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.017.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Terlaksananya pemetaan GTK SD Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	476 sekolah 476 sekolah	44.127.562,04

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.27.019.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (SD)	- Terselenggaranya Kenaikan Pangkat GTK SD - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat Pengawas GTK SDTerselenggaranya KGB dan Impasing Guru, dan Pengawas GTK SD - Terselenggaranya Usul Pensiun dan Purna Bakti GTK SD - Terselenggaranya Usul Karpeg, Karis/Karsu GTK SD - Terselenggaranya Usul Satya Lencana Karya GTK SD - Terselenggaranya Pemberian Cuti bagi GTK SD	- 300 Orang - 40 Orang - 300 Orang - 75 Orang - 200 Orang - 500 Orang - 50 Orang	397.815.571,90
1.01.01.1.01.01.01.27.021.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Terselenggaranya Penempatan, Rasionalisasi dan mutasi GTK SD - Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahan GTK SD - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK SD - Terselenggaranya penanganan Disiplin Study Kasus GTK SD	- 200 Orang - 40 Orang - 1305 Orang - 10 Kasus	13.964.650.700,00
1.01.01.1.01.01.01.27.024.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan GTK SMP	Terselenggaranya Monitoring Kinerja Kepala SMP	52 kepala sekolah	33.883.200,00
1.01.01.1.01.01.01.27.027.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF	Terlaksananya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF Terlaksananya pemetaan GTK Paud dan PNF	205 TK Negeri dan Swasta	18.292.600,00
1.01.01.1.01.01.01.27.028.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	Terselenggaranya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian cuti bagi GTK, Penilik dan Pengawas PAUD & PNF	1 Kegiatan	22.746.600,00
1.01.01.1.01.01.01.27.029.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	- Terselenggaranya penempatan, rasionalisasi dan mutasi GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahnGTK Paud dan PNF - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya penanganan disiplin study kasus GTK Paud dan PNF	1 Kegiatan	3.628.638.200,00
1.01.01.1.01.01.01.27.032.	Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi	Terselenggaranya Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar	30 Orang	552.998.900,00
1.01.01.1.01.01.01.27.036.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTK SD	Terselenggaranya monitoring kinerja kepala SD	476 Kepala Sekolah	42.882.662,06
1.01.01.1.01.01.01.27.039.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Terlaksananya Pemetaan PTK SMP dan terlaksananya analisis kebutuhan PTK SMP	86 Sekolah	32.461.580,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.01.1.01.01.01.27.040.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SMP	- Terselenggaranya kenaikan pangkat guru SMP - Terselenggaranya kenaikan pangkat pengawas SMP - Terselenggaranya KGB dan Impasing Guru SMP dan Pengawas Sekolah - Terselenggaranya usul pensiun dan Purna Bhakti PTK - Terselenggaranya usul Karpeg, Karis/Karsu PTK - Terselenggaranya usul Satya Lencana Karya PTK - Terselenggaranya pemberian cuti bagi PTK	- 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang	58.234.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.041.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	- Terselenggaranya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga kontrak PTK SMP - Terselenggaranya penanganan disiplin/study kasus PTK SMP	- 50 orang - 519 orang - 3 kasus	8.709.460.914,00
1.01.01.1.01.01.01.27.043.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	- Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendidik jenjang TK - Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah untuk memenuhi standar kompetensi - Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	90 Orang	909.946.000,00
1.01.02.	KESEHATAN			329.985.463.948,00
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN			173.386.463.948,00
1.01.02.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	5.778.140.060,00
1.01.02.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar ditangani	10.500 Lembar	7.228.500,00
1.01.02.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah saluran telepon, air, listrik berfungsi dengan baik	1.032 Rekening	1.029.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional layak operasi	14 Unit	115.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase SPJ UP, GU dan LS ditangani tepat waktu	100 %	673.325.260,00
1.01.02.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase lingkungan kantor dalam keadaan bersih	100 %	197.996.500,00
1.01.02.1.01.02.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dalam kondisi baik	53 Unit	107.100.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase kebutuhan ATK terpenuhi	100 %	412.861.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetak dan penggandaan disediakan	100 %	1.366.348.800,00
1.01.02.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana listrik dan penerangan berfungsi dengan baik	100 %	148.520.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi dan berfungsi dengan baik	100 %	797.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan informasi melalui bahan bacaan	100 %	11.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan	58 Jenis	469.760.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat dan Konsultasi	26 Laporan	442.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	1.418.085.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	59.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	100 %	275.605.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur	100 %	275.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Persentase pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Upacara	100 %	450.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	36.880.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	4 Unit	141.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung/kantor dalam kondisi baik	29 Unit	36.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan inventaris aset barang milik daerah	25 Dokumen	112.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	25 Dokumen	30.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur dengan Kehadiran minimal 80% setahun	95%	190.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan dan siap pakai	125 Stel	62.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu diadakan dan siap pakai	125 stel	78.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah penyelenggaraan pembinaan rohani	1 Paket	50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai dengan capaian kinerja baik	95%	11.771.490.900,00
1.01.02.1.01.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuannya	9 Orang	11.717.490.900,00
1.01.02.1.01.02.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah pegawai yang memperoleh penilaian kinerja dengan kategori baik	417 Orang	54.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP dan Laporan Keuangan minimal baik	100%	403.181.800,00
1.01.02.1.01.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/Laporan Kinerja disusun tepat waktu	6 Dokumen	215.428.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun tepat waktu	15 Laporan	51.428.300,00
1.01.02.1.01.02.01.06.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring dan Pelaporan dengan rekomendasi	25 Dokumen	66.241.550,00
1.01.02.1.01.02.01.06.006.	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat yang disusun	5 Dokumen	70.083.950,00
1.01.02.1.01.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan Rencana Strategis	95%	212.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan disusun tepat waktu	5 Dokumen	212.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah informasi pembangunan kesehatan yang telah disediakan dalam pameran	12 Jenis	61.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah informasi pembangunan kesehatan yang telah disediakan dalam pameran	12 Jenis	61.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar	95%	8.790.108.760,00
1.01.02.1.01.02.01.15.001.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar	100 %	8.537.736.760,00
1.01.02.1.01.02.01.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pendistribusian obat dilaksanakan tepat waktu	120 Kali	145.332.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	107.040.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	85%	36.325.962.948,00
1.01.02.1.01.02.01.16.016.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.121.183.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.017.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	923.733.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.018.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.373.972.550,00
1.01.02.1.01.02.01.16.019.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.087.282.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.020.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.342.512.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.16.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	933.180.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	2.052.981.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.023.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	867.479.100,00
1.01.02.1.01.02.01.16.024.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng III	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.381.873.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.025.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.754.094.093,00
1.01.02.1.01.02.01.16.026.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	880.323.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.027.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.748.318.155,00
1.01.02.1.01.02.01.16.028.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	909.955.500,00
1.01.02.1.01.02.01.16.029.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.026.605.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.030.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.282.655.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.031.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	504.780.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.16.032.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	923.831.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.033.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	540.071.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.034.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	2.699.640.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.035.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II	1. Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS; 2. Persentase Rujukan Non Spesialistik; 3. Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	151/1000, 5 %, 75 %	1.280.297.050,00
1.01.02.1.01.02.01.16.036.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.037.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.038.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.039.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	583.525.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.040.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	583.525.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.041.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.042.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	656.478.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.043.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.044.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	583.525.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.045.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	656.466.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.046.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar; 2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	12 Indikator, 15 Dokumen	583.525.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.16.047.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar;	12 Indikator, 15	656.466.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.048.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II	2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	Dokumen	
1.01.02.1.01.02.01.16.049.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar;	12 Indikator, 15	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.050.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II	2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	Dokumen	
1.01.02.1.01.02.01.16.051.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar;	12 Indikator, 15	583.525.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.052.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I	2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	Dokumen	
1.01.02.1.01.02.01.16.053.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar;	12 Indikator, 15	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.054.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I	2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	Dokumen	
1.01.02.1.01.02.01.16.055.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II	1. Jumlah indikator SPM yang sesuai standar;	12 Indikator, 15	619.996.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.057.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	2. Jumlah dokumen minilokakarya dengan rencana tindak lanjut	Dokumen	
1.01.02.1.01.02.01.16.058.	Pembinaan Kesehatan Kerja	Jumlah kelompok/club olah raga yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar	20 Kelompok	29.100.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pos UKK yang dibina dan melaksanakan upaya kesehatan kerja sesuai standar	9 Pos UKK	28.050.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.003.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Persentase layanan rekomendasi layak sehat ditangani	100%	521.702.800,00
1.01.02.1.01.02.01.17.006.	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Industri Rumah Tangga dan Pangan	1. Jumlah sampel yang diuji sesuai standar dan tepat waktu;	1.444 Sampel,	414.622.800,00
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2. Persentase Pelaksanaan Mutu Internal (PMI)	100 %	
1.01.02.1.01.02.01.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase IRTP Yang dibina dan memenuhi Syarat Kesehatan	100 %	107.080.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.002.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90%	657.025.400,00
1.01.02.1.01.02.01.19.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah model media promosi dan informasi yang dikembangkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	4 Model	50.400.000,00
		Persentase Pengetahuan Masyarakat meningkat tentang kesehatan	100 %	437.892.500,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	32.732.900,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.19.006.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah posyandu madya menjadi purnama; 2. Jumlah desa siaga menjadi desa siaga aktif madya; 3. Persentase Desa yang memanfaatkan alokasi dana minimal 10 % untuk UKBM	9 Posyandu, 18 Desa, 30 %	136.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0.05%	1.467.500.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; 2. Persentase balita gizi kurang mendapat PMT; 3. Persentase anak 5-59 bulan mendapat Vitamin A	100 %, 100 %, 100 %	494.379.100,00
1.01.02.1.01.02.01.20.003.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	1. Persentase bumil KEK ditangani sesuai standar; 2. Persentase bumil mendapat Fe 90 tablet; 3. CakupanRumah Tangga mengkonsumsi garam Beryodium; 4. Persentase Balita KEP Mendapat Perawatan;	100 %, 100 %, 100 %, 100 %	618.866.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.004.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	1. Persentase balita usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif; 2. Jumlah desa mendapat pembinaan UPGK	70 %, 148 Desa	354.255.400,00
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa STBM	40%	558.091.100,00
1.01.02.1.01.02.01.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah dokumen pengkajian pengembangan lingkungan sehat	115 Dokumen	75.831.700,00
1.01.02.1.01.02.01.21.002.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	1. Jumlah Kecamatan yang Membentuk Forum Desa Sehat; 2. Jumlah Desa yang Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat	9 Kecamatan, 148 Desa	331.150.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.003.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapat Pemucuan pilar 1 STBM; 2. Jumlah Desa/Kelurahan SBS	9 Desa ODF, 11 Desa Pamsimas	125.709.400,00
1.01.02.1.01.02.01.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	25.400.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.CFR DBD; 2.Angka Toleransi IR DBD; 3.Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi; 4.Prevalensi Tuberkulosis; 5.Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	1. < 1; 2. <49; 3. 0,04 %; 4. 94 %; 5. 86 %	1.689.880.400,00
1.01.02.1.01.02.01.22.001.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Persentase kasus PE Positif dilakukan fogging minimal 2 kali	100 %	529.725.200,00
1.01.02.1.01.02.01.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase Balita dan anak sekolah yang mendapat vaksinasi	80 %	35.234.500,00
1.01.02.1.01.02.01.22.005.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	90 %	491.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.006.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Angka Toleransi API <1	100 %	307.045.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Persentase Balita dan anak sekolah yang terlindungi dari PD3I	100 %	68.766.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.22.009.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Yang Direspon (Alert SKDR Terverivikasi); 2. Persentase KLB yang ditangani <18 jam	100 %, 100 %	109.663.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.010.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan KIE Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	20 Puskesmas	125.796.700,00
1.01.02.1.01.02.01.22.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi	20 Dokumen	22.100.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi madya	40%	622.775.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang dievaluasi	20 Puskesmas	107.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.007.	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi minimal madya	3 Puskesmas	515.275.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dalam kondisi baik	90%	2.526.678.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.001.	Pembangunan puskesmas	Jumlah Gedung Puskesmas Rawat Inap yang siap digunakan	1 Unit	105.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan yang telah diadakan dan siap digunakan	2 Unit	2.120.678.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.020.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang telah direhab dan berfungsi dengan baik	2 Unit	300.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase rumah sakit pratama yang representatif	94%	3.542.148.900,00
1.01.02.1.01.02.01.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah sarana/prasarana penunjang operasional RS.Pratama yang baru tersedia dan berfungsi dengan baik	2 Paket	710.231.420,00
1.01.02.1.01.02.01.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit yang tersedia dan berfungsi dengan baik	9 Jenis	1.368.649.800,00
1.01.02.1.01.02.01.26.019.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Persentase rumah sakit pratama dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar	100 %	415.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.021.	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah Mebeleur tersedia yang berfungsi dengan baik	37 Buah	130.750.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Pratama yang berfungsi dengan baik	21 Jenis	105.000.740,00
1.01.02.1.01.02.01.26.023.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik	100 %	100.778.740,00
1.01.02.1.01.02.01.26.024.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah Barang Cetakan Rumah Sakit yang tersedia	10 Jenis	204.105.700,00
1.01.02.1.01.02.01.26.027.	Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	Persentase pasien rawat inap terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman	100 %	507.632.500,00
1.01.02.1.01.02.01.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase peserta PBI yang datang ke FKTP dan memperoleh pelayanan kesehatan	100%	75.869.604.331,00
1.01.02.1.01.02.01.28.001.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Persentase peserta PBI yang datang ke FKTP dan memperoleh pelayanan kesehatan	100 %	75.848.403.131,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.28.008.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	21.201.200,00
1.01.02.1.01.02.01.35.	Program Kesehatan Tradisional	Persentase penyehat tradisional yang memenuhi standar pelayanan	35%	439.840.000,00
1.01.02.1.01.02.01.35.001.	Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional	Persentase penyehat tradisional yang teregistrasi dan dibina	15 %	411.840.000,00
1.01.02.1.01.02.01.35.002.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	28.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.36.	Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase FKTP dan FKTL memiliki alat kesehatan sesuai standar	89%	6.979.865.836,00
1.01.02.1.01.02.01.36.001.	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	1. Jumlah Alat Kesehatan yang berfungsi dan sesuai standar; 2. Persentase FKTP memiliki alat kesehatan sesuai standar	60 Unit, 100 %	6.288.115.836,00
1.01.02.1.01.02.01.36.002.	Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga	Persentase FKTP terpenuhi kebutuhan PKRT	100 %	617.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.36.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	74.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar	50%	611.811.900,00
1.01.02.1.01.02.01.37.001.	Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di FKTP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar	100 %	87.625.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.002.	Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan pengetahuan SDMK	100 %	481.152.200,00
1.01.02.1.01.02.01.37.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi	20 Dokumen	43.034.700,00
1.01.02.1.01.02.01.38.	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Cakupan pelayanan penyakit tidak menular (pencegahan/skrining dan penanganan spesifik)	100%	1.790.331.200,00
1.01.02.1.01.02.01.38.001.	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase sasaran yang meningkat pengetahuannya tentang PTM	100 %	849.090.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.002.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai standar	6.750 Orang	487.135.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.003.	Pelayanan kesehatan jiwa	Persentase kasus kesehatan jiwa tertangani sesuai standar	100 %	318.906.200,00
1.01.02.1.01.02.01.38.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring an Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 Dokumen	135.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.39.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	85%	4.316.533.873,00
1.01.02.1.01.02.01.39.001.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tangguwisata	Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama	60 %	2.736.521.667,00
1.01.02.1.01.02.01.39.002.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Giri Emas	Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama	60 %	1.580.012.206,00
1.01.02.1.01.02.01.40.	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase pasien yang tuntas ditangani pada FKTP	100%	2.333.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.001.	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase FKTP yang dibina pelayanan kesehatan dasar	60 %	2.126.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.01.02.01.40.002.	Penyelenggaraan Penilaian Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dinilai dengan kategori baik	20 Puskesmas	169.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.003.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20 Puskesmas	37.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.41.	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	87%	596.237.300,00
1.01.02.1.01.02.01.41.001.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasyankes Yang dibina Pelayanan Kesehatan Rujukan	27 Fasyankes	173.249.900,00
1.01.02.1.01.02.01.41.002.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra sesuai standarJumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra sesuai standar	20 Unit	263.387.400,00
1.01.02.1.01.02.01.41.003.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	Jumlah FKTL Terakreditasi	7 Unit	159.600.000,00
1.01.02.1.01.02.01.42.	Upaya Kesehatan Keluarga	Persentase pelayanan kesehatan ibu sesuai standar	85%	3.912.967.940,00
1.01.02.1.01.02.01.42.001.	Peningkatan Pelayanan Keehatan Ibu dan bayi	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Antenatal sesuai standar	100 %	3.048.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.42.002.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	351.179.635,00
1.01.02.1.01.02.01.42.003.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Persentase remaja yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	55.684.100,00
1.01.02.1.01.02.01.42.004.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	186.002.140,00
1.01.02.1.01.02.01.42.005.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring an Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan program/kegiatan	20 Dokumen	271.482.065,00
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			156.599.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana/alkes sesuai standar	83%	6.599.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana/alkes sesuai perencanaan	100%	6.599.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.33.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	99%	150.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase capaian pengadaan barang/jasa sesuai jumlah rekening belanja	100%	150.000.000.000,00
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			113.981.876.120,00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			113.981.876.120,00
1.01.03.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	1.745.427.830,00
1.01.03.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	36 Jenis	67.277.370,00
1.01.03.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang Terbayar	3 Jenis Rekening	131.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Mobil yang disewa	2 Jenis	236.400.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.03.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajaknya Terbayar	87 Unit	22.500.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	12 Bulan	447.603.400,00
1.01.03.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	22 Jenis	121.354.500,00
1.01.03.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor	22 Jenis	6.581.700,00
1.01.03.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	12.499 Lembar	6.740.100,00
1.01.03.1.01.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30 Buah	2.420.100,00
1.01.03.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	156.987.720,00
1.01.03.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.812 Eksemplar	7.200.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah yang Dihadiri	1 Tahun	429.500.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Jenis Dokumen	109.862.940,00
1.01.03.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Kegiatan	7.907.053.330,00
1.01.03.1.01.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	7 unit	80.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Dana / Sumber Daya Manusia	33 unit	27.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Tersedianya Lahan untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	2 Paket	7.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Sarana / Prasarana Upacara	422 upakara	147.932.840,00
1.01.03.1.01.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	4 Paket	329.600.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Masa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	71.910.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Masa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	8.172.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	83 kali	39.600.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Milik Daerah	10 Kegiatan	81.112.490,00
1.01.03.1.01.03.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah Event yang Diikuti	4 Event	121.726.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	80.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.03.1.01.03.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jenis	10.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	2 Jenis	10.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Sewa Kendaraan	3 Unit	60.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	109.050.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Terlaksana	1 Tahun	109.050.000,00
1.01.03.1.01.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	154.128.400,00
1.01.03.1.01.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	154.128.400,00
1.01.03.1.01.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Anggaran	1 Kegiatan	242.372.900,00
1.01.03.1.01.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	7 Dokumen	242.372.900,00
1.01.03.1.01.03.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan Internal Perangkat Daerah	1 Kegiatan	157.100.000,00
1.01.03.1.01.03.01.09.002.	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	Jumlah Sistem Aplikasi Database	2 Aplikasi	157.100.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Kegiatan	2.021.378.200,00
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Penggantian Jembatan	Jumlah Penggantian Jembatan yang Dilaksanakan	5 Paket	2.021.378.200,00
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kawasan Rawan Genangan banjir	2 Kegiatan	3.301.629.840,00
1.01.03.1.01.03.01.16.003.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase yang Terbangun	3 Paket	1.902.055.860,00
1.01.03.1.01.03.01.16.006.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Prosentase Saluran Drainase dan Trotoar dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1.399.573.980,00
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan	3 Kegiatan	46.870.485.000,00
1.01.03.1.01.03.01.18.003.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara	12,1 Km / 34 Paket	14.437.879.800,00
1.01.03.1.01.03.01.18.006.	Peningkatan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Ditingkatkan Kondisinya	27,05 Km / 9 Paket	29.872.309.200,00
1.01.03.1.01.03.01.18.007.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara	12 Bulan	2.560.296.000,00
1.01.03.1.01.03.01.20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya Database Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Kegiatan	162.328.000,00
1.01.03.1.01.03.01.20.001.	Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah Data Kondisi Jalan Kabupaten	1 Laporan	162.328.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.03.1.01.03.01.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang Memadai	2 Kegiatan	211.544.200,00
1.01.03.1.01.03.01.23.004.	Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat Berat	1 Unit	75.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.23.010.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat-alat Berat	30 Unit	136.544.200,00
1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	4 Kegiatan	10.360.778.595,00
1.01.03.1.01.03.01.24.021.	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah Data Base dan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Paket	162.389.610,00
1.01.03.1.01.03.01.24.022.	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Jumlah Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukad	2.861.483.440,00
1.01.03.1.01.03.01.24.023.	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	7 Daerah Irigasi (DI)	4.849.076.425,00
1.01.03.1.01.03.01.24.024.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi yang terpelihara	31 Daerah Irigasi (DI)	2.487.829.120,00
1.01.03.1.01.03.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3 Kegiatan	607.072.470,00
1.01.03.1.01.03.01.27.010.	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Air Minum	2 Dokumen	356.433.070,00
1.01.03.1.01.03.01.27.013.	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Pembangunan SPAM yang Terfasilitasi	31 Paket	203.307.950,00
1.01.03.1.01.03.01.27.014.	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Jumlah Pengelola SPAM yang Sehat dan Mandiri	1 Tahun	47.331.450,00
1.01.03.1.01.03.01.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1 Kegiatan	7.820.339.970,00
1.01.03.1.01.03.01.30.009.	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Jumlah SPAM yang terbangun	11 Paket	7.820.339.970,00
1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Meningkatnya kondisi Fasilitas Umum	2 Kegiatan	196.623.500,00
1.01.03.1.01.03.01.31.002.	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Umum	2 Paket	169.798.500,00
1.01.03.1.01.03.01.31.005.	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Informasi Teknis Bangunan Gedung	9 Kecamatan	26.825.000,00
1.01.03.1.01.03.01.32.	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Regulasi Pemanfaatan Ruang	2 Kegiatan	2.154.871.400,00
1.01.03.1.01.03.01.32.005.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Detail Tata Ruang	4 Dokumen	1.277.435.700,00
1.01.03.1.01.03.01.32.011.	Revisi rencana tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Detail Tata Ruang	4 Dokumen	877.435.700,00
1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan	151.599.800,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.03.1.01.03.01.34.005.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Informasi Tata Ruang	9 Kecamatan	151.599.800,00
1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Kegiatan	241.250.000,00
1.01.03.1.01.03.01.35.002.	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	Data Bangunan Gedung	1 Dokumen	69.950.000,00
1.01.03.1.01.03.01.35.004.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara - Kajian Teknis Terhadap Permohonan Sertifikat Layak Fungsi/TABG	2 Dokumen	171.300.000,00
1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3 Kegiatan	29.363.031.185,00
1.01.03.1.01.03.01.36.002.	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	40 Lokasi	10.965.781.335,00
1.01.03.1.01.03.01.36.004.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	18.277.693.150,00
1.01.03.1.01.03.01.36.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Data Kondisi Penerangan Jalan Umum	1 Laporan	119.556.700,00
1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	123.811.500,00
1.01.03.1.01.03.01.38.001.	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	Terbinanya Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	9 Kecamatan	123.811.500,00
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			14.870.715.900,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			14.870.715.900,00
1.01.04.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinyanya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	1.759.708.401,00
1.01.04.1.01.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Masuk dan Surat Keluar yang Terkelola	1400 Surat	49.810.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Rekening Yang Terbayar	3 Rekening x 12 Bulan	172.800.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Pejabat yang Tersedia	2 Jenis	250.455.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Jasa KIR dan Pajak Kendaraan	3 Jenis (9 Roda Enam , 3 Roda Empat 11 Roda Dua)	99.184.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminisrasi Keuangan	12 Bulan	608.106.701,00
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor	17 Jenis	20.139.500,00
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	22 Jenis	46.799.200,00
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan atau Pengadaan	7 Jenis	27.890.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	16 Jenis	102.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.04.1.01.04.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	15.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan yang tersedia	4 Jenis	7.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	1 Tahun	7.500.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah / Dalam	1 Tahun	325.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Data Kepegawaian	86 Orang	28.024.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Kegiatan	841.885.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	1 Tahun	200.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas / Oprasional	8 Unit	50.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Mebeulair dan Almari Arsip Kantor	5 Jenis	85.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Upacara Keagamaan	12 Jenis	275.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	50.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas /Oprasional yang Terpelihara	2 Kendaraan Dinas Roda 4 dan 3 Kendaraan dinas roda 2	66.200.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Ac	10 Unit	5.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor	3 Jenis	13.500.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Laporan Data Inventaris barang milik Daerah	3 Jenis	45.435.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/ Daerah	6 Kali	51.750.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Aparatur	3 Kegiatan	95.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	12 Bulan	35.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Endek, Pakaian Olahraga	86 Stel	10.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Sewa Kendaraan (BUS)	1 Unit	50.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegan	50.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Fomal	1 Tahun	50.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	181.795.000,00
1.01.04.1.01.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Dokumen	181.795.000,00
1.01.04.1.01.04.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Perencanaan anggaran SKPD	1 Kegiatan	182.484.500,00
1.01.04.1.01.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	RKA,DPA,RDPPS,DPPA Pergeseran,RENJA,RENSTRA,RKT,Rekap Musrembang	9 Jenis Dokumen	182.484.500,00
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	2 Kegiatan	960.863.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.012.	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah RTHL yang didampingi pembangunannya dan siap di huni	813 Unit	871.384.200,00
1.01.04.1.01.04.01.15.013.	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah RTHL yang dibangun dan siap huni	1.242 Unit	89.478.800,00
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan	1 Kegiatan	1.738.600.000,00
1.01.04.1.01.04.01.16.004.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Septiktank Individu yang dibangun dan berfungsi baik	1 Unit IPAL, 100 Septiktank Individu	1.738.600.000,00
1.01.04.1.01.04.01.18.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Terwujudnya Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam	1 Kegiatan	197.505.800,00
1.01.04.1.01.04.01.18.004.	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah rumah korban bencana alam yang dibangun dan siap huni	6 Unit	197.505.800,00
1.01.04.1.01.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	2 Kegiatan	774.960.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.006.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang tertangani	2 Kawasan	436.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.007.	Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	3 Kawasan	338.960.000,00
1.01.04.1.01.04.01.22.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	8.087.914.199,00
1.01.04.1.01.04.01.22.001.	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Luas RTH kawasan perkotaan yag ditata dan dalam kondisi baik	7,21 Ha	3.318.369.799,00
1.01.04.1.01.04.01.22.002.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Luas RTHL kawasan perkotaan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	6,84 Ha	2.556.770.900,00
1.01.04.1.01.04.01.22.003.	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Jumlah Sasaran dan Prasarana Penunjang Dalam Pengelolaan RTH dalam kondisi baik dan siap pakai	26 Jenis	2.212.773.500,00
1.01.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.912.087.000,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			2.874.100.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	1.353.600.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	8000 lembar	62.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	36 rekening	100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan operasional untuk Kepala dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng	2 Unit	250.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng yang terlayani perijinannya	54 unit	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya administrasi keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kab.buleleng	12 Bulan	350.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa dan alat kebersihan kantor Satuan Polisi Pamong Praja	7 jenis	82.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor pada secretariat,Bidang dan seksi Satuan Polisi Pamong Praja tercukupi	100 %	26.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	12 Jenis	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng	11 Jenis	18.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng	36 Jenis	12.600.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	3 Jenis	118.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan rapat rapat konsultasi ke dalam daerah / keluar daerah	12 Bulan	230.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparatur Satuan Polisi pamong Praja yang terkelola administrasi kepegawaiannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 Pegawai	85.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah	100 %	668.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional SatPolPP	2 unit	75.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor SatPol PP Kab Buleleng	2 Jenis	50.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang lengkap dan layak	6 jenis	60.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur pada SatPolIPP Kab Buleleng	3 jenis	50.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan SatPolIPP Kab Buleleng	12 Bulan	75.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan upacara peringatan hari-hari besar nasional	10 kali	115.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor SatPolPP	1 unit	30.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 bulan	60.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kator SatPolPP yang direhab	1 unit	50.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Aset / barang milik daerah yang ada di SatPolPP	12 Bulan	95.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah sarana prasarana penataan lingkungan kantor SatPolPP Kab Buleleng	15 jenis	8.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya	100 %	390.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan PDU , PDH dan pakaian pengibar bendera	3 paket	95.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan SatPolPP	1 paket	195.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerohanian di SatPolPP	12 bulan	100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia apartur	100 %	270.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah meningkatnya kapasitas aparat SatPolPP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	150 orang	100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah kapasitas aparaturnya SatPolPP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	250 orang	170.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah	100 %	42.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng	17 Laporan	42.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	150.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	5 dokumen	150.000.000,00
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			4.087.987.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	1.001.636.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Kebutuhan surat menyurat	60.000 Lembar	5.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening Air,Listrik,Telpon yang terbayar	1 Tahun	46.739.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya operasional kedinasan	2 Unit	250.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah jenis kendaraan Dinas/operasional Pemadam Kebakaran	8 Unit	23.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan Keuangan	39 Laporan	350.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya kebersihan kantor	18 Jenis	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	21 Jenis	12.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor yang Memadai	12 Jenis	2.900.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21 Jenis	30.650.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	4 Jenis	2.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minumam yang tersedia	9 Jenis	77.097.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	137.250.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	2 Buku	45.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Kegiatan	266.500.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	6 Unit	22.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	5.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	jumlah meubelair yg tersedia	12 Unit	2.500.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	jumlah Tersedianya sarana prasarana upacara yang terselenggara	8 Jenis	70.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah sarana penyelenggaran upacara/hari besar nasional	1 Tahun	6.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara	3 Unit	30.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	1 Tahun	30.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	6.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah jenis Mebeleur dipelihara	1 Tahun	7.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	rehab gedung kantor dinas pemadam Kebakaran	1 Ls	55.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	jumlah data yang terinventarisasi dengan baik	12 Buku	8.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah Unit Halaman Gedung yang ditata	1 Unit	25.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur	5 Kegiatan	138.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas yang diadakan	1 Jenis	10.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan beserta kelengkapannya	130 Stel	30.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.004.	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan	55 Stel	15.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	7 Jenis	80.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan rohani dan budaya dilaksanakan	1 Kali	3.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Kegiatan	6.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kali Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan	1 Kali	3.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kali bimbingan teknis dilaksanakan	1 kali	3.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	39.602.500,00
1.01.05.1.01.05.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	2 Laporan	39.602.500,00
1.01.05.1.01.05.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	130.688.300,00
1.01.05.1.01.05.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan SKPD disusun	4 Jenis	130.688.300,00
1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	10 Kegiatan	100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.001.	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Penyusunan norma,Standar pedoman ,dan manual pencegahan bahaya kebakaran	1 Kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.002.	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi norma,standar,pedoman dan manual Pencegahan bahaya kebakaran	9 Kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	1 Tahun	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.005.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan pencegahan kebakaran	1 Kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.006.	Kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Kebutuhan rekrutment tenaga suka rela pertolongan bencana Kebakaran	9 Kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.007.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	10 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.013.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kali Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	12 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.018.	Pelatihan sistem keselamatan kebakaran lingkungan/desa terpadu	Jumlah kali Pelatihan Sistem keselamatan kebakaran lingkungan/Desa terpadu	9 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.019.	Pelatihan penyegaran pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang dilatih	1 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.15.022.	Pengenalan pencegahan bahaya kebakaran bagi anak-anak sekolah	Jumlah Sekolah yang paham Pencegahan Bahaya Kebakaran	30 Sekolah	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran	-Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Bahaya Kebakaran	-5 Kegiatan	439.287.845,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.02.22.002.	Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	Jumlah pelatihan dan simulasi bahaya kebakaran	1 kali	15.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.005.	Pengembangan Sistem Deteksi Dini Bahaya Kebakaran	Jumlah kali pelatihan/sosialisasi Pengembangan sistem Dekteksi Dini Bahaya Kebakaran	2 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.006.	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Jumlah Pendataan dan pemetaan Daerah rawan kebakaran	1 kali	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.007.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	1 Tahun	100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.008.	Pemeliharaan Sarana dan Perasarana Bahaya Kebakaran	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	12 Bulan	304.287.845,00
1.01.05.1.01.05.02.23.	Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	-Terpenuhinya Capaian Kinerja Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	-2 Kegiatan	1.966.271.800,00
1.01.05.1.01.05.02.23.003.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bulan	1.935.483.500,00
1.01.05.1.01.05.02.23.004.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	terpeliharanya Alat-alat Komunikasi dan jaringan Air	15 Unit	30.788.300,00
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.950.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	1.305.500.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik	36 Rekening	53.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana mobilitas darat	12 Bulan	342.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	20.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan disampaikan tepat waktu	39 Laporan	260.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 Jenis	44.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	20 Jenis	14.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen digandakan	64 Buku	6.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik	35 Buah	8.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	230.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10.500.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	10 Jenis	43.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	1 Tahun	170.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian disampaikan tepat waktu	33 Orang	105.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	9 Kegiatan	653.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas	1 Unit	73.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleur	2 Jenis	33.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya sarana upacara	8 Jenis	110.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Tersedianya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	5 Jenis	77.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	20.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan yang layak	1 Tahun	300.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	15.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Rehab gedung kantor BPBD Kabupaten Buleleng	1 Paket	20.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Laporan aset dan Inventarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	8 Laporan	5.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	158.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	48 Buah	28.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Beserta perlengkapannya	14 Stel/Buah	60.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah aparatur yang terbina rohani	74 Orang	70.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Kegiatan	75.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Bupati (LKPJ), LKJIP, LPPD yang akuntabel dan tepat waktu	3 Jenis	75.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	105.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	umlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Jenis	105.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	7 Kegiatan	633.500.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.001.	Pendataan dan Mitigasi Daerah Potensi Rawan Bencana	Jumlah dokumen data Daerah Potensi Bencana yang disusun	2 Laporan	178.500.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.002.	Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta edukasi dan sosialisasi kebencanaan dilaksanakan	10 Peserta	140.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.003.	Bimbingan Teknis Tim Relawan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Tim Teknis Relawan dilaksanakan	30 Peserta/ Desa	70.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.004.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibentuk	1 Desa	55.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.05.1.01.05.03.19.005.	Pembentukan Sekolah Aman dan Siaga Bencana	Jumlah Sekolah Aman dan Siaga Bencana yang terbentuk	2 Sekolah	85.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.006.	Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana	Jumlah Paket Logistik Diadakan	100 Paket	35.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.19.007.	Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah Simulasi/Geladi Posko Rawan Bencana Dilaksanakan sesuai dengan SOP	10 Kali	70.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.20.	Program Kedaruratan Bencana	Terpenuhinya Capaian Kinerja Kedaruratan Bencana	3 Kegiatan	520.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.20.002.	Pendistribusian Kebutuhan Bagi Korban Bencana	Jumlah kebutuhan korban bencana yang menerima bantuan bencana dengan layak	100 Paket	60.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.20.003.	Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap pakai	10 Unit	190.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.20.004.	Penanganan darurat bencana	Terlaksananya Penanganan darurat Bencana	1 Tahun	270.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.21.	Program Pemulihan Pasca Bencana	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pemulihan Pasca Bencana	4 Kegiatan	500.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.21.001.	Pengkajian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah dokumen laporan Pengkajian, Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana disusun	4 Laporan	80.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.21.002.	Pemulihan Psikologis Korban Pasca Bencana	Jumlah kali dilaksanakan sosialisasi / pemulihan psikologis pasca bencana	2 Kali	60.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.21.003.	Verifikasi, Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Pasca Bencana	Jumlah stimulasi dan fasilitasi bantuan pasca bencana	5 Unit	55.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.21.004.	Perbaikan Prasarana Umum Pasca Bencana	Jumlah prasarana umum diperbaiki dalam kondisi layak	3 Lokasi	305.000.000,00
1.01.06.	SOSIAL			7.050.000.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL			7.050.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	1.395.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 Bulan	49.300.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	132 Rekening / 12 Bulan	251.625.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kendaraan dinas	12 Bulan	247.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	3 Roda Empat dan Roda Enam, 22 Roda Dua / 1 Tahun	9.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun	12 Bulan	256.800.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah lingkungan kantor yang terpelihara	12 Bulan	138.016.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	30.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.06.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	17.740.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan kantor yang memadai	12 Bulan	10.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	58.075.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12.100.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	23.202.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	1 Tahun	102.847.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	189.795.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	285.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia	1 Unit	20.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	2 Jenis	20.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	1 Unit	2.600.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	5 Unit	12.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	122.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	1 Paket	8.400.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	12 Bulan	64.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	12 Bulan	35.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	109.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian diadakan	30 Stel	10.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian diadakan	30 Stel	9.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	1 LS	90.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100 %	104.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.06.1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun	7 Laporan	104.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	100 %	171.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun	8 Jenis Dokumen	171.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100 %	45.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	1 Kali	45.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	14,50%	515.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.001.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pendamping sosial yang meningkat pemahaman dan keterampilannya tentang PMKS	50 Orang	82.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.002.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang meningkat keterampilannya dalam bidang usaha ekonomi produktif	100 Orang	292.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.005.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam usaha	40 orang	140.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	15 %	600.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.002.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Cakupan pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	550 Orang	36.300.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.003.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS dan korban napza yang meningkat pemahamannya tentang KIE	1.000 Orang	24.200.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.004.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah anak nakal yang meningkat keterampilannya dan mandiri	20 Orang	95.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.012.	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mandiri	620 orang	444.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan	30%	250.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.002.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat keterampilannya dan mandiri	600 Anak	220.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.003.	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Jumlah data dan analisis permasalahan anak terlantar	1 Dokumen	30.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	24 %	200.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.004.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni Panti yang mendapat pelatihan	18 Orang	21.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.005.	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan	18 Panti Asuhan	115.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.06.1.01.06.01.19.007.	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Panti Asuhan yang meningkat keterampilannya dalam bidang usaha kesejahteraan sosial	9 Panti Asuhan	63.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	19 %	200.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.001.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks Narapidana yang meningkat keterampilannya dan mandiri	20 Orang	60.650.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Waria, WTS, ODGJ, ODHA, Korban Napza) yang mandiri	140 Orang	139.350.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	5%	250.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.001.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah dunia usaha yang meningkat partisipasinya dalam masyarakat	250 Orang	100.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Suka Duka yang mandiri	2 Suka Duka	50.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang aktif	9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TKSK	100.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	18 %	1.410.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.001.	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah generasi muda yang meningkat pemahamannya tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang, 5 kegiatan	495.860.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan dalam kondisi baik	5 Monumen	157.140.472,00
1.01.06.1.01.06.01.22.004.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuaana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura dan Wira Bhuaana)	5 Monumen / Tugu Perjuangan	756.999.528,00
1.01.06.1.01.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	915.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.24.001.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Jumlah mayat terlanter yang disemayamkan dengan baik dan layak. Orang terlanter yang dipulangkan ke daerah asal.	500 KK dan 10 Orang	195.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.24.002.	Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan validasi	148 Desa/Kelurahan	318.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.24.003.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Jumlah PKH yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), jumlah keluarga miskin yang memperoleh sistem jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan jumlah keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial/santunan kematian	1 Lembaga	402.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.25.	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	9%	600.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.25.001.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang terampil di bidang usaha	50 Orang	101.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.06.1.01.06.01.25.002.	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri	430 Orang	498.500.000,00
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN			-
1.01.06.4.00.04.02.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial	4 kegiatan	-
1.01.06.4.00.04.02.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya	13 desa	-
1.01.06.4.00.04.02.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	13 desa	-
1.01.06.4.00.04.02.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	-
1.01.06.4.00.04.02.23.008.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Kepariwisataan	Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa Tentang Kepariwisataan	5 kegiatan	-
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN			-
1.01.06.4.00.04.05.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4 Kegiatan	-
1.01.06.4.00.04.05.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya			-
1.01.06.4.00.04.05.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan			-
1.01.06.4.00.04.05.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional			-
1.01.06.4.00.04.05.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial			-
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			92.467.988.440,00
1.02.01.	TENAGA KERJA			4.410.000.000,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA			4.410.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan transparasi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat	100%	1.060.677.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			95.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			195.600.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			12.800.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			300.580.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			50.400.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.01.1.02.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	meningkatkan transparasi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat	100%	18.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah			177.297.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			310.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			-
1.02.01.1.02.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-
1.02.01.1.02.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur			-
1.02.01.1.02.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	memperbaiki kesejahtraan pegawai sehingga makin mencerminkan resiko,tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang	100%	150.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			40.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			80.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT			20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			-
1.02.01.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			43.640.000,00
1.02.01.1.02.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			3.640.000,00
1.02.01.1.02.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			-
1.02.01.1.02.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur			40.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	melakukan pengawasan kinerja,termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin serta hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan,disiplin, dan etika kerja birokrasi	100%	20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			20.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.01.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatkan transparasi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat	100%	120.800.000,00
1.02.01.1.02.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			120.800.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	meningkatkan transparasi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat	100%	165.200.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD			165.200.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	meningkatkan transparasi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat	100%	30.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan			30.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif	250 orang	828.100.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.001.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah			70.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			687.500.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.008.	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK			-
1.02.01.1.02.01.01.15.010.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta			70.600.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap , dan mandiri /perusahaan	475 orang	1.097.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.001.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja			30.700.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.002.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja			100.300.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.003.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan			150.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.004.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai			50.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.005.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan			250.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.006.	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat			366.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.008.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja			130.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.	90%	734.583.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			80.606.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.005.	Peningkatan pengawasan, perlingugandan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja			80.760.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			80.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.010.	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			191.899.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.011.	Penarikan Pekerja Anak Menuju Program Keluarga Harapan			301.318.000,00
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.491.760.000,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.491.760.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100%	1.425.678.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang ditindaklanjuti	5.000 Lembar	38.400.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar	1 Tahun	187.400.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat yang disewa	2 Unit	334.880.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan	157 Jenis	48.460.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	7 Jenis Laporan (Lap.Realisasi Anggaran, Lap.Operasional Neraca, Neraca, Lap.Arus Kas, Lap.Perubahan SAL, Lap.Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Lap.Keuangan)	489.511.600,00
1.02.02.1.02.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor dibersihkan	1 Unit	48.139.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.02.1.02.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item ATK disediakan	8 Jenis (600 Rim, 100 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 200 Kotak, 600 Lembar)	77.388.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah, Item Barang Cetak dan Pengadaan disediakan	4 Jenis (20 Buku, 600 Eks, 12.000 Lbr, 25 Buah)	10.276.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik disediakan	4 Jenis (41 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit)	12.072.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Unit	22.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah, Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan	3.000 Eksemplar	7.200.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman disediakan	750 Kotak	15.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan	1 Tahun	134.451.400,00
1.02.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	1.665.332.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung P2TP2A dan Forum Anak	130.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit Mobil, 20 Sepeda Motor	916.900.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah, Jenis Sarana/Prasarana Upacara diadakan	1 Tahun, 7 Jenis (Upacara Sehari-Hari, Purnama & Tilem, Hari Raya Tumpek Landep, Hari Raya Nyepi, Penganyar, Piodalan Kabupaten dan Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan)	135.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Luas Gedung / Lingkungan Kantor dipelihara	9 Unit Balai Penyuluh KB Kecamatan	398.432.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.02.1.02.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai	157 Unit	70.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Alat kantor Terpelihara	2 Jenis (Komputer dan AC)	15.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1.02.02.1.02.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	9.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Baju Olahraga Diadakan	35 Stel	7.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Kegiatan Kerohanian dan Budaya Aparatur dilaksanakan	1 Tahun	2.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%	150.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan DAK, (LKPJ), LAKIP, LPPD, yang akuntabel yang disusun dan disampaikan tepat waktu	6 Dokumen (Laporan Kinerja, Laporan DAK, LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra, Cascading, Laporan Kemiskinan, Buku Profil Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA), dan 50 Buku	150.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	100%	121.250.000,00
1.02.02.1.02.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran yang tersusun akurat dan tepat waktu	6 Dokumen (Renja, RKA, DPA, DPPA Pergeseran, RDPA, DPPA Perubahan)	121.250.000,00
1.02.02.1.02.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	100%	15.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Kali Pameran dilaksanakan	1 Kali	15.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Desa yang Menerapkan P2TP2A dan PATBM yang dituangkan dalam Awig-Awig dan PERDES	40 %	585.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.005.	Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Jumlah Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja GugusTugas Trafficking	9 Kecamatan	55.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.02.1.02.02.01.15.006.	Pengembangan Kategori Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak	2 Jenis Pelatihan (KHA & PATBM)	200.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.007.	Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan	Jumlah Informasi Profil Anak dan Profil Perempuan yang diterima baik oleh masyarakat	2 Dokumen	130.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.008.	Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)	200.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan Tepat Waktu	32 Jejaring	310.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Data Dokumen Statistik Gender yang terpilah	1 Dokumen	60.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.011.	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Jumlah Anggota Focal Point yang kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	100.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.012.	Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah Kelembagaan Jejaring PUG yang terbentuk	500 Orang	150.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Meningkatkan Taraf Kesehatannya	3000 Orang	60.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.010.	Revitalisasi GSI-B	Jumlah Desa yang diberdayakan GSI-B	9 Kecamatan, 16 Desa	60.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Melibatkan Perempuan	770 Orang	150.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.001.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Kelompok Perempuan yang mampu melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif	500 Orang	150.000.000,00
1.02.03.	PANGAN			4.550.000.000,00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN			4.550.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal demi kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	1.114.050.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat masuk dan surat keluar yang teregistrasi	2600 pucuk surat	70.400.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran rekening listrik ,telepon dan air	36 Kitiir	30.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan kendaraan Operasional Kepala Dinas dan Sekretaris	2 Unit	220.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional kantor yang lengkap surat-suratnya	20 Unit	45.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	84 Laporan	313.600.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun	26 jenis	95.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik selama 1 tahun	11 Jenis	3.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan kantor	2 Unit	20.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.03.1.02.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan	4 Jenis	5.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Makanan dan minuman rapat yang disediakan - Makanan dan minuman tamu yang disediakan	- 250 kotak - 7 jenis	40.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Penugasan rapat dalam daerah dan keluar daerah	74 kali	200.050.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	- PNS yang naik pangkat tepat waktu - PNS yang naik gaji berkala tepat waktu - Pengeloan administrasi kepegawaian	- 4 orang - 4 orang - 12 bulan	72.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	359.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional kantor	3 unit	60.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Meubeleur kantor	17 unit	39.200.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	- Penyediaan Sarana upacara keagamaan - Persembahyangan ke tempat-tempat suci agama hindu	- 9 Jenis - 12 lokasi	55.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung / kantor yang mendapat pemeliharaan	1 gedung	20.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas kantor yang mendapat pemeliharaan	19 unit	59.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	50 unit	25.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Aset barang milik daerah yang terdata dan terinventaris	553 buah	100.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	71.050.000,00
1.02.03.1.02.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- Pakaian korpri - Pakaian endek - Pakaian olah raga	- 39 stel - 39 stel - 40 stel	71.050.000,00
1.02.03.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100%	106.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	106.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	140.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun	4 dokumen	140.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan masyarakat	22 ton	695.900.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.03.1.02.03.01.16.002.	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Pengawasan harga dan pasokan pangan pokok	3 komoditas	70.300.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.003.	Pengembangan cadangan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	22 Ton	60.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.004.	Pengembangan lumbung pangan desa	Pembinaan dan pengawasan lumbung pangan	14 LPM	350.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.005.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	- Pembinaan dan pengawasan LDPM yang masih aktif - Pembinaan dan pengawasan PUPM yang masih aktif - Pembinaan dan pengawasan TTI yang masih aktif	- 4 LDPM - 4 PUPM - 13 TTI	100.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.006.	Pengembangan sistem informasi pasar	Pengawasan harga komoditi pangan strategis	12 komoditi pangan	60.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.008.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	- Pengawasan Pasokan Pangan dan Akses Pangan di Tingkat Produsen - Pengawasan Pasokan Pangan dan Akses Pangan di Tingkat Konsumen	- 10 KWT, 9 Pedagang - 3 pasar	54.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	93%	982.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.001.	Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga	Pemberdayaan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan keluarga berkonsep KRPL	19.092 RT	295.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.002.	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Gerakan diversifikasi pangan lokal non beras/terigu	9 kecamatan	131.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.003.	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Panganekaragaman konsumsi pangan	9 desa	86.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.004.	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	Promosi panganekaragaman pangan lokal non beras/terigu	18 KWT	180.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.007.	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Pembinaan dan pengembangan usaha pangan lokal	2 kelompok	290.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman	75%	552.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.001.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Sample pangan yang di uji	100 sampel	205.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.003.	Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar	Sertifikasi dan registrasi pangan segar	3 Pangan segar	120.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.004.	Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	20 Sekolah dan 6 pasar	165.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.005.	Pendampingan di Bidang Kelembagaan keamanan pangan segar	Sosialisasi sertifikasi dan registrasi pangan segar	25 kelompok	62.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	75%	529.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.001.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Desa Mandiri Pangan	2 Desa	80.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.002.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Buku neraca bahan makanan yang disusun	1 dokumen	91.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.003.	Dewan Ketahanan Pangan	Fasilitasi kegiatan operasional dewan ketahanan pangan	12 bulan	83.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.004.	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Pemantauan potensi produk pangan local	3 gapoktan	65.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.03.1.02.03.01.19.005.	Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Pembinaan dan penilaian calon penerima APN	1 kelompok	73.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.006.	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengawasan kerawanan pangan dan gizi	9 kecamatan	71.500.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.007.	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)	Pemetaan daerah kerentanan pangan	9 Kecamatan	63.500.000,00
1.02.04.	PERTANAHAN			223.290.100,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			223.290.100,00
1.02.04.1.01.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2 Kegiatan	104.156.500,00
1.02.04.1.01.04.01.16.001.	Penataan penguasaan, kepemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Tanah yang pemanfaatannya sesuai peruntukan	1 IOKASI	71.202.000,00
1.02.04.1.01.04.01.16.003.	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Penyelenggaraan pengadaan tanah yang ditindaklanjuti	1 Lokasi	32.954.500,00
1.02.04.1.01.04.01.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1 Kegiatan	45.479.900,00
1.02.04.1.01.04.01.17.002.	Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti	8 Kasus	45.479.900,00
1.02.04.1.01.04.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanahan Yang Handal	1 Kegiatan	73.653.700,00
1.02.04.1.01.04.01.18.001.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah Dokumen Pertanahan yang disusun	2 Dokumen	73.653.700,00
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP			20.848.037.330,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			20.848.037.330,00
1.02.05.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	2.257.086.609,00
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	800	110.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	36 rekening	300.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat siap pakai	2 unit	250.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayar	70 unit	322.086.609,00
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 jenis dokumen	325.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih kantor	7 jenis	180.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor siap pakai	26 jenis	30.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	16 jenis	15.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor dalam kondisi baik	7 jenis	11.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	6 jenis	230.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	3 jenis	8.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	558 paket	130.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	650 kotak	25.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam daerah	35 kali	245.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4 jenis	76.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	1.584.450.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor siap pakai	1 paket	1.009.750.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor)	5 unit	90.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan mebeleur kantor yang akan diadakan	1 paket	40.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	15 buah	50.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Luas tanah untuk perluasan TPA	1. 20.210 m2 2. 1.000 m2	-
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan	10 jenis	110.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Intensitas perayaan hari besar lingkungan hidup	1 kali	45.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dalam kondisi baik	2 gedung	27.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah peralatan dan bahan pembersih siap pakai	6 jenis	55.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor siap pakai	2 jenis	30.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	2 jenis	2.200.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah alat - alat kantor dalam kondisi baik	6 jenis	40.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen aset barang	1 dokumen	85.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	634.761.600,00
1.02.05.1.02.05.01.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi siap pakai	1 unit	15.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.02.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas siap pakai	75 stel	50.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan, Jumlah pakaian pelindung kerja	558 stel	431.761.600,00
1.02.05.1.02.05.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- Jumlah baju endek - Jumlah pakaian olahraga - Jumlah pakaian untuk lomba	- 75 stel - 75 stel	78.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah bus	1 unit	60.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	22.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS peserta bimtek	2 orang	22.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	87.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dinas yang disusun	9 Dokumen	60.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil monev kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	10 Buku	27.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	170.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	9 dokumen	170.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pameran pembangunan	1 Unit	33.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah stand pameran dan materi pameran	1 unit	33.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkat	190080 m3	10.446.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			-
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah sampah plastik yang terkelola	80.000 Kg	162.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.15.004.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1. Jumlah LHC yang tersedia 2. Jumlah TPS yang Tersedia	1. 6 unit 2. 5 unit	-
1.02.05.1.02.05.01.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Volume sampah organik yang diolah menjadi kompos	60 ton	-
1.02.05.1.02.05.01.15.006.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah yang mendapat pelatihan	30 orang	-
1.02.05.1.02.05.01.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Jumlah Pusat Daur Ulang yang terbangun - Jumlah TPST yang terbangun	1 unit	-
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan	- Jumlah wilayah pelayanan kebersihan - Jumlah sarana peralatan kebersihan yang siap pakai	- 4 Kecamatan - 11 jenis	3.475.400.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Jumlah sampah yang dapat diangkut	- 190.080 m3	6.692.600.000,00
1.02.05.1.02.05.01.15.015.	Kegiatan peningkatan pelayanan persampahan	Jumlah lokasi pengelolaan persampahan	2 lokasi	-
1.02.05.1.02.05.01.15.016.	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan limbah B3 dan Limbah cair	50 Usaha/Kegiatan	115.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat limbah B3 menurun	60 %	787.110.300,00
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah lokasi pengambilan sampel (air danau, sungai, laut, sumur dan udara)	- 35 lokasi	150.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan/ pengawasan tentang lingkungan	35 usaha/ kegiatan	-
1.02.05.1.02.05.01.16.006.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	50 usaha/ kegiatan	-
1.02.05.1.02.05.01.16.007.	Pengkajian dampak lingkungan	- Jumlah penerbitan izin lingkungan - Jumlah penerima Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) - Jumlah pembinaan bagi usaha/ kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan - Penyusunan dokumen lingkungan hidup (TPA)	- 185 ijin lingkungan - 110 SPPL - 30 usaha/ kegiatan - 2 dokumen	-
1.02.05.1.02.05.01.16.009.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	- Jumlah usaha yang memenuhi kriteria penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) - Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan	- 3 usaha/ kegiatan - 20 usaha/ kegiatan	20.100.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana detil tata ruang kawasan perkotaan celukan bawang	- 2 dokumen - 1 dokumen	320.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Jumlah sekolah Adiwiyata - Jumlah calon penerima Kalpataru - Pelaksanaan lomba menggambar dan mewarnai (Twin Lake Festival) - Jumlah pembuatan sumur biopori	- 35 sekolah - 2 calon - 1 kali - 8 unit	-
1.02.05.1.02.05.01.16.016.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	10 buku	-
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	- Jumlah bahan kimia yang tersedia dilaboratorium lingkungan hidup - Jumlah lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi air dan kebisingan	- 33 jenis	251.310.300,00
1.02.05.1.02.05.01.16.018.	Penilaian Kota Sehat/Adipura	- Jumlah titik pantau penilaian Kota Sehat Adipura - Jumlah Tropy Adipura yang diraih	- 21 titik lokasi - 1 tropy	-
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah sungai prokasih/superkasih	3 sungai	45.200.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi sumber daya alam yang lestari	1 Lokasi	604.055.400,00
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	- Frekuensi pembersihan tanaman liar di Danau Buyan	- 12 bulan	346.329.300,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah desa binaan Program Kampung Iklim (Proklim)	2 desa	76.100.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.018.	Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Jumlah bibit tanaman yang siap ditanam	3150 pohon	101.626.100,00
1.02.05.1.02.05.01.17.019.	Pengkajian Dampak Lingkungan	- Jumlah penilaian dokumen bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan - Jumlah penerimaan Surat Pernyataan Izin Lingkungan Hidup (SPPL) - Jumlah usaha yang mendapat pembinaan	- 110 SPPL - 185 ijin - 30 Usaha Kegiatan	80.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang menyajikan informasi lengkap tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tersedia	2 Dokumen	101.875.000,00
1.02.05.1.02.05.01.19.002.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	- Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) - Jumlah dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	- 1 dokumen - 1 dokumem	101.875.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah pesisir bebas sampah	7 kecamatan	217.490.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.001.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	- Intensitas pelaksanaan kegiatan PNLG (Pemsea Network of Local Government) - Jumlah lokasi pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir	- 1 kali - 8 kecamatan	-
1.02.05.1.02.05.01.23.002.	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut	- Intensitas pelaksanaan kegiatan PNLG (Pemsea Network of Local Government) - Jumlah lokasi pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir	- 1 kali - 7 Kecamatan	217.490.000,00
1.02.05.1.02.05.01.26.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Prosentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	100%	470.700.000,00
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	Penegakan hukum lingkungan	- Jumlah inventarisasi kasus-kasus lingkungan - prosentase kasus - kasus lingkungan yang ditangani	- 28 kasus - 100%	84.800.000,00
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	Penyuluhan	Jumlah kecamatan yang meningkat pemahamannya tentang masalah hukum lingkungan hidup	9 kecamatan	58.650.000,00
1.02.05.1.02.05.01.26.003.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	- Jumlah sekolah Adiwiyata - Penyusunan profil Kalpataru - Jumlah pelaksanaan lomba menggambar - Jumlah sumur serapan siap pakai	- 35 sekolah	327.250.000,00
1.02.05.1.02.05.01.27.	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan keikutsertaaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan	9 Desa Pakraman	928.303.300,00
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	- Jumlah buku untuk panduan DSL yang disusun - Jumlah desa yang meningkat pemahamannya tentang desa sadar lingkungan	- 30 buku - 9 desa pakraman	298.350.000,00
1.02.05.1.02.05.01.27.003.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	- Jumlah usaha yang mendapat pembinaan / pengawasan tentang lingkungan - Jumlah laporan pembinaan terhadap usaha wajib AMDAL	- 35 Usaha	44.953.300,00
1.02.05.1.02.05.01.27.004.	Penilaian Kota Sehat / Adipura	- Jumlah titik pantau penilaian Kota Sehat Adipura - Jumlah tropy Adipura yang diraih	- 21 titik - 1 Tropy	585.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.02.05.01.28.	Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Persampahan	- Prosentase jumlah sampah yang terangkut di daerah pedesaan - Prosentase jumlah sampah yang terangkut di daerah kota - Prosentase kawasan perkotaan yang bersih sampah - Rata - rata produksi sampah plastik yang dapat dikelola	- 52 % - 92 % - 92 % - 80 %	2.503.705.121,00
1.02.05.1.02.05.01.28.001.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- Jumlah kendaraan roda 4 (pick up) dalam keadaan siap pakai - Jumlah kereta dorong siap pakai	- 10 Unit - 10 Unit	135.373.000,00
1.02.05.1.02.05.01.28.002.	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Jumlah LHC siap pakai - Jumlah TPS siap pakai	- 6 Unit - 5 Unit	198.392.121,00
1.02.05.1.02.05.01.28.003.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah pupuk kompos hasil olahan sampah organik	60 ton	484.340.000,00
1.02.05.1.02.05.01.28.004.	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sampah	30 Orang	22.600.000,00
1.02.05.1.02.05.01.28.005.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu yang siap beroperasi	1 Unit	835.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.28.006.	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Jumlah lokasi pelayanan dan pengelolaan persampahan	2 lokasi	828.000.000,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.167.018.000,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.167.018.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perkantoran untuk mendukung Kinerja Aparatur	100 %	1.752.831.810,00
1.02.06.1.02.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1.510 lembar	42.060.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar	108 rekening	148.100.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan yang Disewa	2 unit	229.356.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan di samsat	33 unit	14.855.192,00
1.02.06.1.02.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	84 laporan	437.995.300,00
1.02.06.1.02.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah unit kantor yang dibersihkan - Jumlah item peralatan yang diadakan	- 4 unit - 330 item	87.656.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah item alat tulis yang dibutuhkan	1.400 item	59.282.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah item barang cetakan dan penggandaan disediakan	123 item	10.727.800,00
1.02.06.1.02.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah item komponen listrik disediakan	137 item	5.602.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor disediakan	61 buah/ unit/ paket	249.107.600,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.06.1.02.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah examplar bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	77 exemplar	5.880.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah, kotak makanan & minuman	960 Kotak	19.250.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah OH koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	30 kali	294.359.918,00
1.02.06.1.02.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yan terselesaikan	10 Jenis	148.600.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung Kualitas Kinerja Aparatur	100 %	635.952.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlag gedung yang dibangun	1 unit	-
1.02.06.1.02.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional disediakan	5 unit	50.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	jumlah peralatan kantor disediakan	37 buah/unit	56.700.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah item sarana/prasarana upacara diadakan	65 item	102.600.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah item sarana/prasarana yang tersedia	8 item	10.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket ruangan yang direhab	1 paket	-
1.02.06.1.02.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dipelihara	33 unit	161.388.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah peralatan kerja diperbaiki	26 unit	86.750.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Paket ruangan yang direnovasi	1 paket	28.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventaris aset barang milik daerah	1 dokumen	99.714.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung/ lingkungan kantor yang ditata	1 unit	26.200.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah partisipasi dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/ Daerah	5 kali	14.600.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung Kualitas Kinerja Aparatur	100 %	85.560.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	42 stel	45.560.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 kali	40.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100 %	169.245.100,00
1.02.06.1.02.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja disusun	38 laporan	95.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.06.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring yang disusun	4 Laporan	74.245.100,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.06.1.02.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD	4 Dokumen	150.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	4 dokumen	150.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.16.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dokumen Akta Kependudukan Sesuai Standar	95 %	1.432.013.800,00
1.02.06.1.02.06.01.16.001.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	25.000 Akta	663.929.800,00
1.02.06.1.02.06.01.16.002.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	- Jumlah Akta Perkawinan Diterbitkan - Jumlah Akta Perceraian Diterbitkan	11.050 Pasang Akta 500 Akta	572.600.700,00
1.02.06.1.02.06.01.16.003.	Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	- Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan - Jumlah Akta Pengakuan Anak yang Diterbitkan	6.000 Akta 50 Akta	195.483.300,00
1.02.06.1.02.06.01.17.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan yang Tertib dan Tepat Waktu	76 %	532.525.600,00
1.02.06.1.02.06.01.17.001.	Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu	- Jumlah Perangkat SIAK yang Terpelihara dan Berfungsi Baik - Jumlah Desa/Kelurahan/SKPD/Lembaga Lain yang tersetting Aplikasi SIAK - Jumlah Validasi Penduduk Ganda	33 set 40 OPD 5.027 NIK	172.444.500,00
1.02.06.1.02.06.01.17.002.	Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Peraturan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang disusun	2 Dokumen	95.172.000,00
1.02.06.1.02.06.01.17.003.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka Administrasi Kependudukan Yang Dilaksanakan	770 Orang	129.717.300,00
1.02.06.1.02.06.01.17.004.	Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Jenis Data yang diolah	18 Jenis	42.056.800,00
1.02.06.1.02.06.01.17.005.	Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Terselenggaranya BinteK Pengelolaan SIAK - Terkoneksinya Data Base Kependudukan	74	93.135.000,00
1.02.06.1.02.06.01.18.	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase Cakupan Pemanfaatan Basis Data Kependudukan yang Terintegrasi	55 %	304.206.400,00
1.02.06.1.02.06.01.18.002.	Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah SKPD / Lembaga / Instansi lain yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama	40 SKPD / Lembaga / Instansi	30.997.300,00
1.02.06.1.02.06.01.18.003.	Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah SKPD / Lembaga Lainnya yang telah memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	80 SKPD/Lembaga Lainnya	62.567.600,00
1.02.06.1.02.06.01.18.005.	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan	5 Jenis	29.201.900,00
1.02.06.1.02.06.01.18.006.	Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen	Jumlah penduduk non permanen yang terdata	3.000 Orang	181.439.600,00
1.02.06.1.02.06.01.19.	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Pendaftaran Penduduk yang Valid dan Akuat	94 %	2.104.682.690,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.06.1.02.06.01.19.001.	Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	- Jumlah KK yang diterbitkan - Jumlah KTP-EI yang diterbitkan - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-EI yang diterbitkan - Jumlah NIK dan Biodata yang diterbitkan - Jumlah Biodata Perubahan yang diterbitkan	50.000 lembar 50.000 keping 27.000 keping 25.000 lembar 10.000 lembar 2.000 lembar	1.651.748.090,00
1.02.06.1.02.06.01.19.002.	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah SKPWNl antar Kabupaten/Provinsi yang diterbitkan Jumlah SKTT yang diterbitkan	10.000 lembar 100 lembar	219.198.900,00
1.02.06.1.02.06.01.19.003.	Pelayanan Pendataan Penduduk	Jumlah penduduk yang perekaman KTP-EI	5.000 orang	233.735.700,00
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			5.804.000.000,00
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.804.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	1.000.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya surat menyurat	1200 Lembar, 12 Bulan	40.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rekening, 12 Bulan	140.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit jasa sewa disediakan	2 Unit, 12 Bulan	180.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang laik jalan	26 Motor, 3 Mobil	7.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis laporan keuangan disusun	3 Jenis, 12 Bulan	285.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	2 Unit, 12 Bulan	176.200.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis item alat tulis kantor disediakan	10 Jenis	3.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah jenis item barang cetakan diadakan	3 Jenis	2.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik disediakan	5 Jenis	3.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	1 Jenis	3.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan disediakan	3 Jenis, 156 Rek, 12 Bulan	25.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	10 Jenis	25.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah kali koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	8 Kali	110.300.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah	100	100.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasinal diadakan	1 Unit	1.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur disediakan	1 Jenis	1.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara disediakan	4 Jenis, 12 Bulan	8.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	5.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis unit kendaraan dipelihara	2 Jenis, 24 Motor, 3 Mobil	40.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara	4 Jenis, 12 Bulan	2.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi aset daerah disusun	6 Buku	42.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah kali peringatan hari besar dan event diikuti	1 Kali	500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	100	90.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian hari - hari tertentu diadakan	1 Jenis, 36 Stel	30.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan rohani dilaksanakan	1 Kali, 90 Orang	60.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	100	50.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kali bimtek dilaksanakan	10 Kali	50.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah	100	90.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan disusun	42 Buku, 12 Bulan	90.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Prosentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	130.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah jenis dokumen anggaran SKPD disusun	3 Jenis, 60 Buku	130.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang dibina dan diberdayakan	39,17%	1.310.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.001.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibina	25 LPM	85.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.004.	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	Jumlah kelompok posyandu mendapat pembinaan pemberdayaan kelembagaan	53 Kelompok posyandu	200.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.07.1.02.07.01.15.009.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kali monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan	20 Kali	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.012.	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah tim penggerak PKK yang difasilitasi	32 TP PKK	950.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang dikelola dengan baik	40,51%	325.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.010.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	98 BUMDesa	190.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.011.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	9 Pasar Desa	60.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.012.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah TKP2KDes terbentuk	20 TKP2KDes	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4,50%	200.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.001.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina	26 Kelompok	80.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.006.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	Jumlah kali peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan	1 Kali	120.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	40%	1.500.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	129 Desa	100.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.006.	Pembinaan dan penilaian tugas-tugas kepala desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan administrasi desa	129 Desa	50.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.010.	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	Jumlah pengkajian dilaksanakan	1 Banjar Dinas	10.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.016.	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Jumlah pemilihan perbekel yang dimonev	76 Desa	1.340.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.19.	Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	50%	150.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Inventarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunan aset desa dan pelaksanaan kewenangan desa	129 Desa	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.19.004.	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	129 Desa	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.22.	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase kawasan perdesaan yang terbangun serta dikelola dan diberdayakan secara partisipatif	17%	350.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.22.001.	Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan rencana pembangunan kawasan perdesaan disusun	1 Kawasan	10.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.22.002.	Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan yang ditata	1 Kawasan	255.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.22.003.	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah pemberian stimulan pembangunan desa yang difasilitasi	9 Kecamatan	85.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.07.1.02.07.01.23.	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Prosentase perkembangan pengelolaan teknologi dan informasi desa	62%	200.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.23.001.	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki web desa	90 Desa	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.23.003.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kali pembinaan TTG dilaksanakan	1 Kali	125.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.24.	Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan	Indeks tingkat perkembangan desa	19,38%	309.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.24.001.	Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa / kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	259.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.24.002.	Pengelolaan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang menyusun profil desa	148 Desa / kelurahan	50.000.000,00
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.316.630.000,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.316.630.000,00
1.02.08.1.02.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Jumlah Anak per-Keluarga	74 %	1.142.250.000,00
1.02.08.1.02.02.01.15.002.	Pelayanan KIE	Jumlah PUS yang meningkat Pemahamannya tentang Pelayanan KIE KB	111.000 Orang	1.040.950.000,00
1.02.08.1.02.02.01.15.005.	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah PLKB/PKB, TOGA, TOMA, PUS dan GenRe yang meningkat pemahamannya tentang Program KKBPK	550 Orang	101.300.000,00
1.02.08.1.02.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	650 Orang	285.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.16.001.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Remaja yang meningkat pemahamannya tentang KIE Kesehatan	600 Orang	285.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36%	300.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.17.001.	Pelayanan konseling KB	Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang Pelayanan Konseling KB	2.000 Orang	300.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	86,39 %	802.400.000,00
1.02.08.1.02.02.01.18.002.	Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang melaksanakan KB/KR yang mandiri	500 Orang	802.400.000,00
1.02.08.1.02.02.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	900	345.700.000,00
1.02.08.1.02.02.01.23.001.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Kader Pendampingan yang meningkat pemahamannya tentang Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	135 Orang	345.700.000,00
1.02.08.1.02.02.01.25.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan Informasi Data Micro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan	75 %	83.280.000,00
1.02.08.1.02.02.01.25.001.	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target	Jumlah Informasi Keluarga Berencana yang diterima baik oleh masyarakat	1 Dokumen	53.280.000,00
1.02.08.1.02.02.01.25.003.	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah PLKB yang meningkat pemahamannya tentang sistem pencatatan dan pelaporan	250 Orang	15.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.08.1.02.02.01.25.004.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah, Kali Monev, Laporan	150 Buku	15.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	600 Orang	1.358.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.001.	Pembinaan pengendalian penduduk	Jumlah Kader KB di Kampung KB yang meningkat Pemahamannya tentang KIE Kesehatan Reproduksi Rremaja	150 Orang	60.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.002.	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Kader KB yang meningkat pemahamannya terhadap Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	600 Orang	1.258.000.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.003.	Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	Jumlah Stakeholder yang meningkat pemahamannya terhadap kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	150 Orang	40.000.000,00
1.02.09.	PERHUBUNGAN			5.350.000.000,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN			5.350.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	1.378.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	95.470.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air dan telepon dan internet	48 Rekening	80.500.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat	12 Bulan	244.280.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan yang terbayar	40 Unit	25.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	423.150.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37 Jenis	135.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	10.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan atau penggandaan	5 Jenis	24.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	18.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	83.500.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Jenis	2.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan Dinas	12 Bulan	12.500.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas	12 Bulan	55.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	12 Bulan	170.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.09.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	350.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit	30.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai	2 Jenis	15.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur	4 Jenis	20.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya sarana dan prasarana upacara yang memadai	12 Bulan	180.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	30.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	12 Bulan	25.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor yang memadai	3 Jenis	29.630.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang memadai	5 Unit	3.570.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai	1 Jenis	5.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	1 Laporan	12.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	95.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas	120 Stel	10.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	120 Stel	35.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Tersedianya perjalanan Sewa bus untuk peningkatan rohani aparaturnya	1 Trip	50.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Serapan Anggaran Sesuai Target	100 %	60.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ) Dinas	3 Dokumen	60.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target	100 %	250.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Dishub Kab.Buleleng	4 Dokumen	250.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya capaian program informasi Pembangunan Daerah	1 kegiatan	-
1.02.09.1.02.09.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 Kali	-
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	82 %	1.428.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.007.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah fasilitas terminal yang terkelola dengan baik	5 terminal	650.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.09.1.02.09.01.15.010.	Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran	Jumlah fasilitas perparkiran yang dikelola dengan baik	69 Lokasi	720.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.011.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan	Jumlah Laporan tentang kepelabuhanan	1 Laporan	58.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio jumlah penumpang umum terhadap jumlah seat angkutan	90 %	1.072.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.005.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Mobilitas angkutan jalan raya yang terpantau	500 Kendaraan	42.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.006.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Posko pada hari - hari besar keagamaan	4 Posko	32.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.010.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Bus Sekolah yang dikelola dengan baik	2 Unit	155.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.014.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Atensi Bimbingan Operasional Lalu Lintas	50 Kali	735.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.015.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Buleleng	25 Orang	63.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.018.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas	1 Laporan	45.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tercapainya Ruas Jalan Kabupaten Yang Berkeselamatan	77.6 %	150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu - rambu lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	3 Jenis	150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan angkutan dan barang yang layak jalan	5100 unit	565.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor	Alat uji Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	10 Unit	50.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.005.	Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang	Armada angkutan umum dan barang yang beroperasi laik jalan	5100 Unit	500.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.006.	Monitoring, evaluasi dan pendataan perizinan perbengkelan	Laporan tentang perbengkelan	1 Laporan	15.000.000,00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.807.000.000,00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN			5.807.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	1.590.950.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola dengan baik	3.600 surat	75.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	48 Rekening	250.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang siap pakai untuk operasional Kepala Dinas dan Sekretaris	2 Unit	185.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 2	30 Unit	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	25 Dokumen	259.400.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.10.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kerja yang siap pakai	16 Ruangan	33.713.100,00
1.02.10.1.02.10.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor rusak yang dapat digunakan kembali	16 Unit	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	4.682 Satuan	100.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan dokumen yang digandakan	23.664 Satuan	7.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	171 Satuan	3.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	25 Satuan	400.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	3.240 Eksemplar	14.256.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	1.032 Satuan	22.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar dan dalam daerah yang dapat diikuti	60 Kali	169.280.900,00
1.02.10.1.02.10.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dan disampaikan tepat waktu	56 Dokumen	51.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	365.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah DED gedung yang tersedia	1 Buah	25.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 Unit	88.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mabeleur kantor yang diadakan	18 Unit	35.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah upakara yang disediakan	324 Upakara	30.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Harkitnas	4 Kegiatan	52.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik dan siap pakai	7 Unit	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	3 Ruang	100.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah kegiatan hari besar dan event yang diikuti	3 Kegiatan	15.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	81.750.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	45 Potong	11.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai yang disediakan	45 Stel	22.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah penganyar yang dapat dilaksanakan dengan baik	12 Kali	48.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.10.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	8%	50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuannya dibidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian	8 Orang	50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Kominfosandi	2.80	85.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	16 Dokumen	85.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase realisasi anggaran kegiatan	98.40%	88.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran dinas yang dikeluarkan tepat waktu	10 Dokumen	88.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan coverage area komunikasi dan informasi	86.77%	1.348.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.002.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah titik jaringan komputer yang dapat berkomunikasi dengan baik	164 Titik	545.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Persentase kehandalan server milik Pemkab. Buleleng	100%	33.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.012.	Penyediaan Layanan Akses Internet	Jumlah instansi pemerintah yang dapat terlayani akses internet dengan baik, Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat, Jumlah masyarakat yang menggunakan Media Center	7 instansi, 9 Titik, 140 orang	770.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase kajian pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik	65%	205.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.001.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen kajian pengembangan dan Inovasi TIK	1 Dokumen	65.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.002.	Pengumpulan dan pengolahan data	Jumlah jenis data yang dikumpulkan dan diolah	4 Jenis Data	55.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.003.	Pengembangan dan pengelolaan Data Center	Jumlah jenis data yang disediakan pada data center	5 jenis data	45.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.004.	Pengkajian dan Integrasi Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dengan baik	5 sistem	40.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM Aparatur yang mampu menerapkan sistem informasi	85%	196.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.001.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan sistem informasi pemerintah.	350 Orang	158.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.003.	Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah pelatihan komputer yang dapat diselenggarakan pada lab pelatihan komputer	23 kali	38.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase gugatan informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	796.300.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.10.1.02.10.01.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah majalah Singa Manggala yang dicetak dan siap edar, Jumlah brosur/leaflet/pamflet yang dicetak dan siap edar	3.000 oplah, 500 Lembar	200.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Kabupaten Buleleng, Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Provinsi Bali	25 buah informasi, 5 buah informasi	274.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.003.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media tradisional	3 buah informasi	43.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.004.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi	Jumlah dokumen dokumentasi peliputan yang disusun	240 dokumen	60.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.005.	Pembinaan dan pengembangan kelompok komunikasi sosial masyarakat	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang KIM, Jumlah anggota KIM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan internet	350 orang, 30 Orang	54.300.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.007.	Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Jumlah press release yang disebarluaskan, Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	240 buah, 104 buah informasi	85.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.008.	Pemberdayaan dan penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik	Persentase permohonan informasi dari masyarakat yang terlayani	100%	80.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.	Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Jumlah informasi benar yang diterima masyarakat	33,33%	383.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.001.	Pengumpulan dan pengolahan data opini publik	Jumlah laporan hasil monitoring opini publik di media cetak dan sosial media yang disusun, Persentase kritik saran pada situs resmi pemkab buleleng yang ditanggapi	12 Dokumen, 100 %	64.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.002.	Pengumpulan dan pengolahan data tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan sosialisasi terkait tema publik, Waktu pelaksanaan monitoring tema publik baik lokal maupun nasional	600 orang, 12 Bulan	105.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.003.	Pelayanan informasi publik	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui siaran keliling, Jumlah permohonan pelayanan multi media yang dipenuhi	70 Kali, 50 Kali	214.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.	Program Pengelolaan Layanan e-Government	Persentase prangkat daerah yang layanannya berbasiskan elektronik	68,29%	618.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001.	Pengelolaan layanan secara elektronik	Jumlah layanan pemerintah secara elektronik yang dapat berjalan dengan baik	12 Layanan	200.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.002.	Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan	1 aplikasi	120.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.003.	Pengelolaan nama domain dan sub domain	Jumlah nama domain dan sub domain lingkup Pemkab. Buleleng yang dimonitor, Jumlah nama domain dan sub domain yang berhasil didaftarkan.	101 sub domain, 10 subdomain	46.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.004.	Pembinaan dan pengembangan situs resmi Pemerintah Daerah	Jumlah sub domain pada situs resmi Pemkab. Buleleng yang terkelola dengan baik	71 Sub Domain	96.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.10.1.02.10.01.20.006.	Pengkajian dan pengembangan implementasi e-Government	Jumlah regulasi terkait implementasi e-government yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,	1 Regulasi,	96.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.008.	Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK	Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan dan ditindaklanjuti	1 Dokumen	
		Jumlah tenaga teknis yang meningkat pengetahuannya dibidang TIK	5 Orang	60.000.000,00
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.200.000.000,00
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.200.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan	1.305.353.880,00
1.02.11.1.02.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	2500 Surat 12 Bulan	120.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, internet dan Telepon	4 Jenis 12 Bulan	90.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Sarana Mobilitas Darat	2 Unit 12 Bulan	230.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jenis 12 Bulan	6.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan	1 Buku	330.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor	12 Jenis 12 Bulan	55.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	53.751.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	10.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22 Unit 12 Bulan	150.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis 12 Bulan	6.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	29.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	225.602.880,00
1.02.11.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8 Kegiatan	408.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Lingkungan Kantor	1 Lembaga	20.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.11.1.02.11.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 Unit	18.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Upacara Keagamaan	8 Jenis 12 Bulan	230.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Lingkungan kantor yang terpelihara	1 Lembaga 12 Bulan	10.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	30.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	15.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terpeliharanya alat-alat Kantor/RT	12 Bulan	15.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	jumlah data dan informasi aset barang milik daerah	1 dokumen	50.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah event yang diikuti	2 kali	20.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Kegiatan	52.898.400,00
1.02.11.1.02.11.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32 Buah	5.398.400,00
1.02.11.1.02.11.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Telaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	47.500.000,00
1.02.11.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	18.153.230,00
1.02.11.1.02.11.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang memahami peraturan disiplin pegawai	3 Orang	18.153.230,00
1.02.11.1.02.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	55.054.400,00
1.02.11.1.02.11.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja kegiatan SKPD dan LAKIP	12 Laporan 1 Buku 12 Bulan	42.880.400,00
1.02.11.1.02.11.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir tahun	12 Laporan	12.174.000,00
1.02.11.1.02.11.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	151.140.190,00
1.02.11.1.02.11.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	5 Dokumen 12 Bulan	151.140.190,00
1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Capaian Program Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	67.996.800,00
1.02.11.1.02.11.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Pameran / Pawai Pembangunan	2 Kali 12 Bulan	67.996.800,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terpenuhinya Capaian Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	2 Kegiatan	143.411.000,00
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terdata	270 UKM formal 12 Bulan	93.411.000,00
1.02.11.1.02.11.01.15.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kecamatan 12 Bulan	50.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	2 Kegiatan	75.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah KUMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	1 Kelompok KUMKM (50 Orang) 12 Bulan	51.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kali 12 Bulan	24.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2 Kegiatan	306.392.100,00
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan 12 Bulan	56.242.100,00
1.02.11.1.02.11.01.17.004.	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Data Kredit Usaha Rakyat (KUR)	9 Kecamatan	50.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	5 Kali 12 Bulan	200.150.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terpenuhinya CapaianProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	5 Kegiatan	285.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.002.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian Terlaksananya Diklat Sertifikasi Propesi Pengelola	1 Angkatan 1 Angkatan	71.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.004.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya Penyuluhan Perkoperasian Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Fasilitas Pencabutan Badan Hukum Koperasi	20 Klp Pra Koperasi 20 Koperasi 10 Koperasi 12 Bulan	56.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	jumlah Koperasi yang Berprestasi	25 Koperasi 25 Koperasi 12 Bulan	47.600.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya Kerjasama Dengan pola Kemitraan Antar Koperasi Dengan Lembaga Keuangan Lainnya, Terwujudnya Kemampuan Bersaing Koperasi	40 Koperasi 12 Bulan	40.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Melalui Peringatan Hari Koperasi	1 Kali 12 Bulan	70.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Usaha Koperasi	4 Kegiatan	118.600.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.001.	Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat tata keloala kelembagaannya	20 Koperasi 12 Bulan	36.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.002.	Peningkatan Akses Permodalan Koperasi	Terwujudnya Kemampuan Koperasi Dalam Akses Jumlah koperasi yang bermitra dengan koperasi lainnya	20 Koperasi 12 Bulan	25.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.003.	Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP	Jumlah KSP/USP yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) Persaingan Usaha	50 Koperasi 12 Bulan	37.400.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.004.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	Jumlah koperasi yang anggotanya memiliki produk unggulan	25 Koperasi 12 Bulan	20.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.20.	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Tercapainya Capaian Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	4 Kegiatan	212.800.000,00
1.02.11.1.02.11.01.20.001.	Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	50 koperasi	49.984.000,00
1.02.11.1.02.11.01.20.002.	Penyebaran Pola Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga	50 Koperasi	34.722.500,00
1.02.11.1.02.11.01.20.003.	Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP	Jumlah koperasi yang kelembagaannya mamatuhi peraturan perundang-undangan	50 Koperasi	77.076.000,00
1.02.11.1.02.11.01.20.004.	Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 Koperasi	51.017.500,00
1.02.12.	PENANAMAN MODAL			4.100.000.000,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU			4.100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	14 Kegiatan	1.175.287.500,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1200 Exsamplar	60.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	84 Rekening/Bulan	55.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	2 Unit 12 Bulan	170.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	24 Unit	9.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	250.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa/alat kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	114.700.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	199.862.500,00
1.02.12.1.02.12.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	8 Jenis	15.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.12.1.02.12.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8 Jenis	5.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit	70.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Rekening	6.600.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	19.925.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	115 OH	125.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	74.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	11 Kegiatan	232.776.300,00
1.02.12.1.02.12.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Unit	-
1.02.12.1.02.12.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	2 Unit	-
1.02.12.1.02.12.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	1 Set	-
1.02.12.1.02.12.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7 Jenis	50.776.300,00
1.02.12.1.02.12.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	10 Kegiatan	30.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	2 Unit	-
1.02.12.1.02.12.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	24 Unit	85.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	7 Unit	7.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 Unit	-
1.02.12.1.02.12.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen	60.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	-
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	4 Kegiatan	40.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	-	-
1.02.12.1.02.12.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	40 Stel	-
1.02.12.1.02.12.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40 Stel	-
1.02.12.1.02.12.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	40.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	1 Kegiatan	20.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.12.1.02.12.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4 OH	20.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	2 Kegiatan	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	55.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	45.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	1 Kegiatan	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksannya Buleleng Vestifal		22.737.900,00
1.02.12.1.02.12.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Tersedianya Dana	22737900	22.737.900,00
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	4 Kegiatan	601.093.300,00
		Jumlah Investor		
1.02.12.1.02.12.01.15.001.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	1 Kali	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.013.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	5 Investor	240.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.014.	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	7 Kali	150.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.018.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Sarana Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	111.093.300,00
1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Perencanaan Dan Peningkatan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	1 Dokumen	661.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.001.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	2 Sistem	175.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.002.	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	4 Dokumen	60.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.004.	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Pengusaha	40.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.005.	Penyusunan Perencanaan Penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	3 Dokumen	126.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.006.	Penyelesaian Permasalahan Penanaman	Jumlah kasus yang difasilitasi	5 kasus	10.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.007.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.008.	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	246.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.20.001.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan perijinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	35.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.20.002.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	9 Kecamatan	145.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.20.003.	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayan perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	66.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.21.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	3000 Ijin	506.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.21.001.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2500 Ijin	380.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.21.002.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	500 Ijin	126.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.22.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	3000 Ijin	394.605.000,00
1.02.12.1.02.12.01.22.001.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 ijin	230.605.000,00
1.02.12.1.02.12.01.22.002.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 ijin	164.000.000,00
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.142.128.210,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			6.142.128.210,00
1.02.13.1.01.01.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terselenggaranya kegiatan kepemudaan	2 Kegiatan	250.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.15.005.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda	120 Petugas	103.466.000,00
1.02.13.1.01.01.01.15.008.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan	25 Orang	146.534.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebersamaan bagi pemuda	6 Kegiatan	1.178.620.380,00
1.02.13.1.01.01.01.16.001.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang	200 Orang	98.894.200,00
1.02.13.1.01.01.01.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya Pembinaan Paskibraka Kabupaten Buleleng dan Seleksi Paskibraka Provinsi Bali	200 Orang	804.374.120,00
1.02.13.1.01.01.01.16.005.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya Kegiatan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional / KSPAN dan Penyuluhan Bahaya Narkoba	200 Orang	62.515.760,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.13.1.01.01.01.16.006.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba band	225 Orang	120.915.500,00
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Sosial	100 Orang	47.832.600,00
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemuda	150 Orang	44.088.200,00
1.02.13.1.01.01.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya kemandirian pemuda dalam berwirausaha	1 Kegiatan	137.500.000,00
1.02.13.1.01.01.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	137.500.000,00
1.02.13.1.01.01.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatkan pengelolaan manajemen keolahragaan	2 Kegiatan	65.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabang Olahraga	60 Siswa	32.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.19.002.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Terselenggaranya sertifikasi pelatih Cabang Olahraga	18 Guru Penjaskes	33.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggaranya pembinaan atlet pelajar beserta event olahraga pelajar	7 Kegiatan	3.150.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya pengiriman atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP	60 Atlit	202.511.500,00
1.02.13.1.01.01.01.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terlaksananya kegiatan dan pengiriman Kontingen Porseni ke Provinsi	265 Atlit	1.992.148.200,00
1.02.13.1.01.01.01.20.004.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbentuknya Klub Olahraga Pelajar	20 orang atlit	63.006.200,00
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan kejuaraan Petanque dan Futsal	2 Cabang Olahraga	110.963.000,00
1.02.13.1.01.01.01.20.007.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Olahraga bagi masyarakat	640 Orang	326.496.100,00
1.02.13.1.01.01.01.20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian bonus dan Dana pembinaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	200 Atlet	350.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.20.010.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya kegiatan Porca Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	30 Orang	104.875.000,00
1.02.13.1.01.01.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	2 Kegiatan	1.361.007.830,00
1.02.13.1.01.01.01.21.002.	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Terpenuhi kebutuhan sarana olahraga	6 Unit	195.334.400,00
1.02.13.1.01.01.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya pemeliharaan kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra , Lapangan Tennis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tennis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque, Lapangan Panahan.	12 Unit	1.165.673.430,00
1.02.14.	STATISTIK			2.350.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.14.01.	DINAS STATISTIK			2.350.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	845.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang ditindaklanjuti	1.500 Pucuk	42.200.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Terbayar	3 Rekening / 12 Bulan	85.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	2 Unit	210.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang sudah di bayar pajak	42 Unit	15.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyelesaian administrasi keuangan	12 Bulan	215.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Instansi yang terjaga kebersihannya	1 SKPD	95.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang dapat disediakan	30 Jenis	20.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	7.720.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen alat listrik yang dapat disediakan	15 Jenis	5.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan	1 Unit	10.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan	2 Jenis	8.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang dapat disediakan	400 Kotak	21.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke Luar/dalam daerah	75 OH	111.080.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Presentatif dalam rangka Pelaksanaan Tugas yang Propisional	10 Kegiatan	295.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Sarana dan Prasarana Mebeleur yang Memadai	2 Jenis	30.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi	5 Jenis	60.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	-	-
1.02.14.1.02.14.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	42 Unit	70.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara	1 Tahun	5.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Alat-alat Kantor yang terpelihara	3 Jenis	10.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.14.1.02.14.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	-
1.02.14.1.02.14.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Aset barang milik daerah yang terinventarisasi	1 SKPD	90.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah Penataan Lingkungan Kantor	1 SKPD	10.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	3 Event	20.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Aparatur yang Mempunyai Tingkat Kedisiplinan yang Optimal	3 Kegiatan	40.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam dinas pegawai yang dapat disediakan	-	-
1.02.14.1.02.14.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah seragam khusus hari-hari tertentu yang dapat disediakan	-	-
1.02.14.1.02.14.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Persembahyangan Bersama	1 Kali	40.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasaitas Sumberdaya Aparatur yang Melaksanakan Tugas	1 Kegiatan	25.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Orang	25.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kwalitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Kegiatan	85.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanan Kegiatan SKPD - Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP2D) -Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Kegiatan SKPD	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen	30.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan	2 Dokumen	45.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang dapat diselesaikan	1 Dokumen	10.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Selarasnya Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng	1 Kegiatan	170.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	170.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya Kuwalitas Data Statistik Sektoral	7 Kegiatan	530.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.14.1.02.14.01.15.005.	Penyusunan, Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	60.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.006.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	75.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.007.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	80.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.008.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	85.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.009.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	60.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.010.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah	Jumla Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	95.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.015.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/200 Exemplar	75.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.	Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah	Meningkatnya Kuwalitas Data Statistik Daerah	3 Kegiatan	360.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.001.	Analisis dan Updating Data Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Siap di Publikasikan	2 Dokumen/120 Exemplar	90.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.002.	Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Pembangunan Daerah yang Siap di Publikasikan	3 Dokumen/220 Exemplar	185.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.003.	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya Workshop Data Statistik Sektoral	1 Kali	85.000.000,00
1.02.15.	PERSANDIAN			543.000.000,00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN			543.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase prangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	543.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.004.	Pengelolaan sumber daya persandian	Jumlah dokumen kebijakan terkait pengamanan data dan informasi lingkup Pemkab. Buleleng yang disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala, Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai.	1 Dokumen 36 unit	79.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.005.	Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuannya di bidang persandian, Jumlah instansi pemerintah yang bebas dari gangguan keamanan informasi.	1 orang, 1 instansi	161.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.15.1.02.10.01.15.006.	Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi	Jumlah obyek pengamanan persandian yang berhasil diamankan dari gangguan keamanan informasi dan komunikasi	13 obyek	211.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.007.	Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan persandian yang disusun dan disampaikan tepat waktu	12 Dokumen	92.000.000,00
1.02.16.	KEBUDAYAAN			10.465.124.800,00
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN			10.465.124.800,00
1.02.16.1.02.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	9 Kegiatan	1.555.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	7480 Lembar	95.700.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bukti pembayaran telpon,air dan listrik	180 Rekening	126.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jangka waktu operasional kendaraan roda empat untuk kadis dan sekretaris	12 Bulan	227.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	34 Unit	22.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jangka waktu pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	396.200.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jangka waktu pelayanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	95.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang alat tulis kantor	5.765 item	55.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	384 Item	14.300.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	7 Jenis	17.600.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	212.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga	6 Unit	16.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 Jenis	13.200.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	49.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	215.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	8 Kegiatan	630.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua	5 Unit	100.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	16 Buah	65.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.16.1.02.16.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	308 Kali	137.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	15 Buah	11.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Paket	77.200.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 Unit	166.300.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	22.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen data dan inventaris aset barang milik daerah	12 Dokumen	51.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Kegiatan	94.325.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.004.	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian korpri	50 Pakaian	20.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50 Stell	15.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	59.325.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan	1 Kegiatan	190.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	37 Laporan	190.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	1 Kegiatan	180.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 Dokumen	180.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	60.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan	1 Kali	60.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lembaga adat yang lestari	3 Kegiatan	1.620.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Desa Pakraman dan Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan, Penyuratan Awig-awig serta Fasilitas dan Monev Hibah	12 Desa Pakraman, 12 Sekaa teruna, 30 Pecalang, 10 Awig-awig Sekaa teruna, 800 Hibah	770.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah Subak dan Subak Abian yang di bina dan dilestarikan, Penyuratan awig-awig	8 Subak, 9 Subak Abian	480.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	- Jumlah Sekaa Santi yang dibina dan dilombakan - Jumlah Pembinaan Kepemangkuan - Jumlah Sosialisasi Kasus Adat	- 19 Sekaa Santi - 2 Paket - 1 Paket	370.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Jumlah sejarah lokal/purbakala yang ditulis dan dapat diakses di perpustakaan daerah - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lestari dan ditetapkan dengan SK Bupati	7 Kegiatan	1.115.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.003.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah cagar budaya yang lestari dan ditetapkan di kabupaten buleleng	8 Obyek	50.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.004.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah lokasi yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di kabupaten buleleng	9 Kecamatan	50.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.005.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan seni ukir khas buleleng	40 Orang	75.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah promosi budaya yang diikuti ditingkat lokal, regional dan nasional	1 Kali	235.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.011.	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	- Jumlah kunjungan ke Museum - Jumlah koleksi museum beserta kelengkapannya yang dipamerkan - Jumlah penelitian sejarah lokal/purbakala yang dicetak/diterbitkan	- 1500 orang - 1 Paket - 1 Buku	220.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	- Jumlah salinan lontar - Jumlah Pelatihan Penulisan Lontar - Jumlah kunjungan ke gedong kertya	- 4 Naskah - 1 Paket - 1500 Orang	400.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.013.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah cagar budaya yg databasenya di input pada Sistem Registrasi Daerah dan Nasional	160 Cagar Budaya	85.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang dipentaskan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	4 Kegiatan	5.020.799.800,00
1.02.16.1.02.16.01.17.001.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sekaa/ sanggar seni yang siap tampil di acara pagelaran seni dan gelar seni	35 kelompok/sekaa/sanggar seni, 27 Kali	895.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.002.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	- Prosentase jumlah seniman yang aktif - Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	- 5 % - 1 Dokumen	85.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.008.	Perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah kelompok kesenian modern yang dibina dan dilombakan di tingkat kabupaten/ Provinsi	12 Group band, 9 Group teater	350.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.16.1.02.16.01.17.009.	Penyelenggaraan Festival budaya daerah	- Jumlah kelompok/sekaa/sanggar seni yang dipertunjukan pada Pesta Kesenian Bali - Jumlah penyelenggaraan Buleleng Festival dan - Jumlah penyelenggaraan Utsawa Merdangga - Jumlah seniman yang menerima penghargaan wija kusuma	- 36 kelompok/sekaa/sanggar seni, - 1 Kali - 1 Kali - 5 Orang	3.690.799.800,00
1.02.17.	PERPUSTAKAAN			2.159.752.400,00
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			2.159.752.400,00
1.02.17.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	1.053.797.600,00
1.02.17.1.02.17.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk	1.400 Surat	43.538.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik	36 Rekening	91.200.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya operasional kendaraan roda empat yang memadai	12 Bulan	185.400.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengurusan perijinan Kendaraan dinas/operasional : - Roda 4 - Roda 2	- 2 Unit - 16 Unit	11.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	- 5 Dokumen - 12 Bulan	335.285.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor	- 104 Buah - 12 Kotak - 12 Kaleng - 42 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus	63.422.100,00
1.02.17.1.02.17.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan penunjang lainnya	- 100 Rim - 895 Buah - 35 Kotak - 20 Botol	20.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.17.1.02.17.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak, foto copy dan penggadaan	- 515 Eks - 47 Buku - 37 Buah - 11.000 Lembar	16.660.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat Listrik/Elektronik Pemeliharaan Jaringan Listrik	- 146 Buah - 6 Roll - 1 Paket	10.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 4 Unit - 8 Buah	70.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah / Tabloid	- 12 Bulan	20.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat	- 61 Orang/Porsi - 265 Orang/Porsi	20.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	1 Tahun	145.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan Data Kepegawaian	6 Jenis laporan	22.292.500,00
1.02.17.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	147.954.800,00
1.02.17.1.02.17.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Agama	- 401 Upakara - 5 Pcs - 4 Buah	47.954.800,00
1.02.17.1.02.17.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung/Kantor	1 Paket	20.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan layak pakai : - Roda 4 - Roda 2	- 2 Unit - 16 Unit	10.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala - AC - TV	- 13 Unit - 1 Unit	10.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala - Komputer - Laptop - Printer	- 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit	10.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.17.1.02.17.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan lingkungan gedung kantor	1 SKPD	50.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	81.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34 Stell	17.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pakaian Olahraga Senam - Pakaian Olahraga - Pakaian Endek - Pakaian Gerak Jalan - Pakaian Futsal	- 10 Stell - 58 Stell - 2 Stell - 25 Stell - 12 Stell	39.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya kegiatan kerohanian	1 Kali	25.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah	100%	20.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang	20.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	75.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	- 41 Kegiatan - 12 Laporan	75.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	62.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersedianya RKA/DPA Induk, Pergeseran, dan Perubahan	6 Jenis	62.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100%	25.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terlaksananya pameran kearsipan dan perpustakaan	1 Kali	25.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang gemar membaca	12.000 Pengunjung	260.578.000,00
1.02.17.1.02.17.01.15.001.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya Layanan Keliling, Silang, dan Sirkulasi	- 75 Kali - 10 Kali - 365 Hari	122.750.000,00
1.02.17.1.02.17.01.15.008.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terbinanya pengelola perpustakaan tentang pelestarian bahan pustaka, surat kabar dan majalah	75 Orang	56.928.000,00
1.02.17.1.02.17.01.15.009.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Pengadaan bahan pustaka	600 Eks	80.900.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.17.1.02.17.01.16.	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Jumlah kartu anggota perpustakaan elektronik yang tercetak	1.100 Kartu	33.650.000,00
1.02.17.1.02.17.01.16.01.	Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik	Terpenuhinya kartu anggota perpustakaan elektronik	- 1.100 Eks - 1.100 Anggota	33.650.000,00
1.02.17.1.02.17.01.17.	Program Peningkatan SDM dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah tenaga yang SDM yang mampu mengelola perpustakaan	54 Orang	325.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.17.001.	Pembinaan dan peningkatan tenaga Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah	54 Orang	56.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.17.002.	Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan	Terlaksananya workshop pengembangan tenaga perpustakaan	35 Perpustakaan	144.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.17.003.	Evaluasi peningkatan budaya baca	Terlaksananya : - Lomba bercerita rakyat - Lomba gending bali pupuh sinom pangkur - Lomba paduan suara - Lomba Perpustakaan desa/sekolah	- 1 Lomba - 1 Lomba - 1 Lomba - 2 Lomba	125.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.18.	Program Pembinaan dan Otomasi	Jumlah perpustakaan desa yang berbasis IT	9 Desa	75.772.000,00
1.02.17.1.02.17.01.18.001.	Pengumpulan data Perpustakaan	Terkumpulnya data perpustakaan Desa, SD, SMP	11 Jenis	37.886.000,00
1.02.17.1.02.17.01.18.002.	Pelatihan strategi pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah di bidang IT	90 Orang	37.886.000,00
1.02.18.	KEARSIPAN			540.247.600,00
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			540.247.600,00
1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD/Lembaga yang mengelola arsip sesuai standar	50 SKPD/9 Desa	303.949.200,00
1.02.18.1.02.17.01.15.008.	Pembinaan kearsipan	Terlaksananya pembinaan kearsipan SKPD/Lembaga	42 SKPD	79.474.600,00
1.02.18.1.02.17.01.15.010.	Lomba pengelolaan kearsipan	Terlaksananya penilaian lomba pengelolaan kearsipan	- 9 Desa - 9 Kecamatan	135.000.000,00
1.02.18.1.02.17.01.15.013.	Pembinaan kearsipan lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan kearsipan Desa, Desa Pakraman, Ormas/Orsospol, dan Masyarakat	60 Lembaga/950 Orang	89.474.600,00
1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah peningkatan khasanah arsip inaktif dan statis	150 Dokumen	147.430.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.001.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	- 300 Buah - 1 Paket	23.500.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip statis	160 Arsip Statis	39.000.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.003.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	60 Arsip	38.580.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.18.1.02.17.01.16.006.	Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	Terlaksananya penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	310 Arsip	46.350.000,00
1.02.18.1.02.17.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	70 Laporan	12.663.800,00
1.02.18.1.02.17.01.17.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	- 30 SKPD - 50 Desa/Kelurahan	12.663.800,00
1.02.18.1.02.17.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya pengetahuan SDM kearsipan	790 Orang	76.204.600,00
1.02.18.1.02.17.01.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	790 Orang	76.204.600,00
2.00.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			94.843.725.950,00
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.303.027.000,00
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN			5.303.027.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	1.357.399.178,00
2.00.01.2.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim	1.720	135.264.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	180.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor	- 2 Unit - 2 Jenis	200.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak-Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	69 Unit	15.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Dokumen Administrasi Keuangan Di SKPD	4 jenis	302.396.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih	12 Bulan	84.500.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	15.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	2 Jenis	10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	9 Jenis	5.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	20.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	7 Jenis	13.800.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat dan tamu	1.360 Orang	65.220.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	191.667.178,00
2.00.01.2.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian	4 Jenis	119.552.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.01.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8 kegiatan	253.232.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			-
2.00.01.2.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	-
2.00.01.2.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya sarana dan prasarana upacara	12 Jenis	90.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	1 Paket	25.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	69 Unit	60.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	23 Unit	10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Jenis	10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen aset daerah	1 Dokumen	58.232.000,00
2.00.01.2.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	63.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian olahraga beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian futsal beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian senam beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian batik/endeK tradisional - Pakaian olahraga dalam rangka lomba beserta kelengkapannya	- 92 Stel - 15 Stel - 10 Stel - 2 Stel - 66 Stel	-
2.00.01.2.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari tertentu	1 Paket	23.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Tersedianya jasa transportasi dan akomodasi	1 Paket	40.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	15.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksanya kegiatan Bimtek	3 Orang	15.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	195.340.000,00
2.00.01.2.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Data Perikanan, Renstra, SIRUP dan LAPOR SP4N)	7 Jenis	195.340.000,00
2.00.01.2.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	88.408.000,00
2.00.01.2.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA (Induk, Pergeseran dan Perubahan)	3 Jenis	88.408.000,00
2.00.01.2.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Capaian Kinerja Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	39.100.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.01.2.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	- Terlaksananya pameran potensi perikanan di Twin Lake Festival - Terlaksananya pameran potensi perikanan di BULFEST - Terlaksananya pameran potensi perikanan di Pameran Pembangunan HUT Kemerdekaan RI - Terlaksananya pameran potensi perikanan di Luar Daerah - Terlaksananya pameran potensi perikanan di BBDF	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 3 Kali - 1 Kali	39.100.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Budidaya Perikanan	5 Kegiatan	963.960.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.005.	Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan	Pembinaan Kelompok Pembenihan Ikan / Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	16 Kelompok	49.360.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.007.	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	- Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) - Lomba Mancing Ikan di Twin Lake Festival	- 9 Kecamatan - 1 kali	125.680.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.008.	Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya	- Paket Budidaya Patin di kolam - Pengadaan Sarana Prasarana Pembenihan Ikan - Pengadaan Bibit Ikan Nila dan pakan ikan - Paket Percontohan ikan dengan padi (MINAPADI)	- 2 Paket - 2 Paket - 2 paket - 1 Paket	484.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.009.	Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	- Data hama penyakit ikan - Operasional penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan - Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan	- 1 Dokumen - 12 Bulan - 1 Paket	30.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pengembangan bibit unggul ikan air tawar	- Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit - Paket induk / calon induk unggul dan pakan ikan air tawar - Rehab kolam / bak / Saluran air/ bangunan BBI	- 12 Bulan - 1 Paket - 1 Paket	274.920.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Perikanan Tangkap	2 Kegiatan	1.410.995.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.003.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Pemeliharaan dan Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sangsit	12 Bulan	168.720.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.006.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	- Pembinaan KUB / Kelompok Nelayan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - Lomba Dayung Pedau di Twin Lake Festival - Lomba Mancing di laut	- 14 KUB / Kelompok Nelayan - 12 Paket - 1 kali - 1 kali	1.242.275.000,00
2.00.01.2.00.01.01.25.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	1 Kegiatan	71.431.000,00
2.00.01.2.00.01.01.25.001.	Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat	- Penataan kawasan budidaya - Tersedianya dokumen kawasan budidaya perikanan darat	- 1 Sentra Perikanan - 1 Dokumen	71.431.000,00
2.00.01.2.00.01.01.26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	4 Kegiatan	415.785.822,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.01.2.00.01.01.26.001.	Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan	- Pelatihan kelompok masyarakat perikanan	- 4 kali	115.090.822,00
2.00.01.2.00.01.01.26.002.	Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan	- Peningkatan kelas, evaluasi serta supervisi kelompok - Lomba kelompok	- 9 Kecamatan - 3 kali	75.178.600,00
2.00.01.2.00.01.01.26.004.	Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan	- Pembinaan kelembagaan kelompok - Penumbuhan kelompok	- 20 Kelompok - 4 Kelompok	63.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.26.005.	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	- Lomba Perahu Layar - Peringatan Hari Nusantara - Dokumen Perjanjian Kerjasama / fasilitasi kemitraan usaha - Penyampaian informasi dan akses IPTEK Perikanan	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Dokumen - 1 Paket	162.516.400,00
2.00.01.2.00.01.01.27.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4 Kegiatan	429.376.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.001.	Kajian Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Operasional Balai Benih Ikan (BBI) - Rehab kolam / bak / saluran air/ bangunan BBI	- 12 Bulan - 1 Paket	138.936.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.002.	Pembinaan dan Pengolahan Mutu Hasil Perikanan	- Terbinanya kelompok pengolah tentang mutu hasil perikanan - Uji mutu hasil olahan ikan - Lomba pengolahan ikan	- 3 kelompok - 11 paket - 4 kali	108.760.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.003.	Pemantapan Pemasaran Produksi Perikanan	- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) - Pembinaan kelompok pedagang ikan	- 5 Kali - 15 Kelompok	103.160.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.004.	Pengembangan dan penatausahaan Perikanan	- Terbinanya pengusaha perikanan - Pengawasan pengusaha perikanan - Pembuatan buku profil investasi perikanan	- 67 Pengusaha - 67 Pengusaha - 30 Buku	78.520.000,00
2.00.02.	PARIWISATA			10.163.698.950,00
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA			10.163.698.950,00
2.00.02.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	1.203.406.950,00
2.00.02.2.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk	1600 lembar	93.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik yang terbayar"	60 Rekening	90.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa kendaraan roda empat untuk Kadis dan Sekretaris	12 Bulan	180.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak	17 Unit	1.938.950,00
2.00.02.2.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	61 Laporan	408.036.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.02.2.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	157.432.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	1419 Item	40.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak registasi administrasi keuangan	413 Item	13.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat penerangan bangunan kantor	260 Item	10.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	10.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	2 Unit	2.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3110 eksemplar	8.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	41.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Dokumen	120.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	12 Dokumen	29.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas perangkat daerah	100%	337.848.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah sarana kantor yang refresentatif	1 set	10.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	366 kali	100.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	30 buah	30.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	10.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	22 unit	37.848.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	20 Unit	5.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah data aset barang milik daerah	12 Dokumen	145.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	33.152.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas pegawai	145 Potong	8.152.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	25.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.02.2.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah	100%	180.988.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	30 Laporan	180.988.000,00
2.00.02.2.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Presentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	226.684.000,00
2.00.02.2.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	9 Dokumen	226.684.000,00
2.00.02.2.00.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya informasi pembangunan daerah	100%	60.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1 Kali	60.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan dan mancanegara	100%	3.586.384.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	- Kontribusi kunjungan wisata ke DTW - Data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	-Rp.2.300.000.000,- -12 Laporan	2.408.064.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.002.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	-Penyebaran informasi melalui website Dinas Pariwisata	-300 konten -15 orang	313.576.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.003.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata lewat media	- 3 Media	72.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	- Jumlah Penyebaran Potensi Pariwisata Melalui Event promosi	5 event	721.744.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.009.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Jumlah materi promosi yang dicetak	2200 buah	71.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW yang layak dan Desa wisata Yang Memenuhi Standar	100%	3.664.120.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.001.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah sarana dan prasarana Eks. Pelabuhan Buleleng yang di pelihara	1 Sarana Prasarana	486.956.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana daya tarik wisata yang dibangun	2 DTW	2.730.320.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.003.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah atraksi wisata yang dilestarikan	- 4 Kali	151.987.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah sarana prasarana yang di bangun	1 Unit	222.740.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.009.	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibina	2 Desa Wisata	59.863.600,00
2.00.02.2.00.02.01.16.010.	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Jumlah wisata minat khusus yang di data	- 5 Desa	12.253.400,00
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah sumber daya pariwisata yang berstandar	100%	491.052.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terbinanya kelompok sadar wisata	3 kelompok	139.924.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.011.	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	Terselenggaranya jegeg bagus buleleng	1 kali	199.120.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.02.2.00.02.01.17.012.	Pelatihan Pemandu Wisata	Terselenggaranya Pelatihan Pemandu Wisata	20 Orang	65.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.015.	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	- Terbentuknya forum komunikasi / kelembagaan di bidang pariwisata di kabupaten buleleng - Pembinaan sertifikasi kompetensi pariwisata di Kabupaten Buleleng - Memfasilitasi terlaksananya sertifikasi usaha pariwisata Kabupaten Buleleng	- 1 Lembaga - 30 Orang - 1 Kali/10 Usaha pariwisata Jumlah Desa Wisata yang layak di Buleleng	87.008.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah industri Pariwisata yang memenuhi standar usaha	100%	380.064.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	- Terlaksananya pendataan produk pariwisata. atraksi wisata, dan ekonomi kreatif - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan produk wisata atraksi wisata dan ekonomi kreatif - terselenggaranya promosi produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif	- 25 Usaha produk pariwisata - 35 Usaha produk pariwisata - 3 Jenis produk pariwisata	133.320.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.008.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	- Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan - Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu - Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang taat aturan	- 20 Usaha Jasa Pariwisata - 15 Usaha Jasa Pariwisata - 15 Usaha Jasa Pariwisata	114.120.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.009.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	-Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan -Jumlah data Usaha Sarana Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu -Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang taat aturan	- 30 Usaha Sarana Pariwisata - 25 Usaha Sarana Pariwisata - 25 Usaha Sarana Pariwisata	132.624.000,00
2.00.03.	PERTANIAN			18.377.000.000,00
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN			18.377.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	14 kegiatan	2.179.356.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	1 tahun	78.800.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan tv berlangganan	1 Tahun	330.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa mobil operasional kantor	2 unit	232.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.03.2.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	7.400.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen adminitrasi keuangan	39 dokumen	343.836.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan kebersihan dan keamanan kantor	1 paket	220.400.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	99 unit	35.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis Kantor	29 jenis	65.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik	2 jenis	25.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	272.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2 jenis	11.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	8 jenis	40.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	325.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Cakupan jasa adminitrasi kepegawaian	1 tahun	193.920.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	8 Kegiatan	1.009.424.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional	9 unit	381.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	2 unit	12.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana upacara keagamaan	8 paket	150.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor	3 paket	100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang layak	1 Tahun	144.448.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Cakupan monitoring evaluasi aset barang milik daerah	1 Tahun	141.976.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Terlaksananya Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	1 paket	30.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah event yang diikuti	3 event	50.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	2 kegiatan	135.760.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	1 paket	95.760.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah persembahyangan bersama umat hindu	1 Paket	40.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.03.2.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1 kegiatan	111.600.000,00
2.00.03.2.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	3 laporan	111.600.000,00
2.00.03.2.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1 kegiatan	165.788.000,00
2.00.03.2.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	9 dokumen	165.788.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Fasilitasi peningkatan kapasitas petani dan kelompok	2 kegiatan	617.732.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.003.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Jumlah pembinaan kelembagaan kelompok tani - Jumlah evaluasi kelompok tani - Jumlah study banding petani	45 kelompok 5 kategori 1 paket	617.732.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan efisiensi, kualitas, mutu dan pemasaran komoditas pertanian.	1 kegiatan	1.358.548.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.007.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	-Jumlah pelatihan pengolahan hortikultura -Jumlah SL GHP Hortikultura -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas hortikultura	8 kelompok 8 kelompok 8 kali	1.358.548.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pengelolaan lahan, sarana prasarana dan teknologi pertanian	2 kegiatan	802.192.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.001.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-Jumlah pelatihan penerapan teknologi budidaya perkebunan	10 kelompok	364.632.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.005.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-Jumlah pelatihan pengendalian OPT perkebunan	20 kelompok	437.560.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	6 kegiatan	2.288.140.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.007.	Penyusunan database potensi produksi pertanian	-Jumlah data potensi pertanian -Jumlah pemberdayaan pembantu mantri tani	-1 dokumen -11 orang	477.200.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.008.	Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian	-Jumlah hari temu lapang petani (FFD) -Jumlah pengembangan padi hibrida -Jumlah demplot padi -Jumlah demplot palawija -Jumlah demfarm padi -Jumlah demplot padi organik	-7 klp -2 ha -10,2 ha -2 ha -64 ha -50 ha	698.508.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.010.	Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian	-Jumlah benih unggul bermutu tanaman pangan	1 paket	295.160.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.011.	Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian	-Jumlah bimbingan sosialisasi kewaspadan OPT tanaman pangan -Jumlah penanggulangan bencana komoditas tanaman pangan -Jumlah dukungan lahan pangan berkelanjutan	-9 kali -1 paket -1 paket	308.680.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.03.2.00.03.01.19.012.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	-Jumlah pelatihan pengolahan hasil pertanian	-3 kali	308.592.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.013.	Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian	-Jumlah promosi/pameran komoditas tanaman pangan	-2 kali	
		-Jumlah alat pasca panen dan pengolahan tanaman pangan	-10 unit	
2.00.03.2.00.03.01.20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	-Jumlah bimbingan penerapan teknologi pasca panen dan susut hasil tanaman pangan	4 paket	200.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.20.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-Jumlah bimbingan pengoperasian alat pasca panen	4 kali	
		Meningkatnya pelayanan di bidang pertanian	3 kegiatan	1.958.720.000,00
		- Jumlah bimbingan peningkatan kapasitas PPL Pertanian	- 9 BPP	758.760.000,00
		- Jumlah pelatihan PPL Pertanian	- 2 paket	
		- Jumlah study banding PPL Pertanian	- 0 paket	
		- Jumlah pemberdayaan PPL Pertanian kontrak	- 18 orang	
		- Jumlah pemberdayaan THL TBPP	- 39 orang	
2.00.03.2.00.03.01.20.003.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	- Jumlah programma penyuluhan pertanian	- 10 paket	237.560.000,00
		- Jumlah evaluasi penyuluhan pertanian	- 9 paket	
		- Jumlah media informasi penyuluhan pertanian	- 9 paket	
2.00.03.2.00.03.01.20.004.	Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh	- Jumlah pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian	- 1 Paket	962.400.000,00
2.00.03.2.00.03.01.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terkendalnya penyakit zoonosa	1 kegiatan	487.960.000,00
2.00.03.2.00.03.01.21.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	-Jumlah penyediaan sarana pelayanan kesehatan hewan	- 10 paket	487.960.000,00
		- Jumlah pembinaan kesehatan hewan	- 9 paket	
		- Jumlah penanggulangan penyakit zoonosis (vaksinasi rabies)	- 4300 dosis	
2.00.03.2.00.03.01.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian.	2 kegiatan	2.743.600.000,00
2.00.03.2.00.03.01.22.002.	Pembibitan dan perawatan ternak	-Jumlah bantuan ternak ke masyarakat:	-	2.525.600.000,00
		-Kambing PE betina	-50 ekor	
		-Kambing PE jantan	-12 ekor	
		-Kambing ettawa betina	-20 ekor	
		-Kambing ettawa jantan	-6 ekor	
		-Sapi bibit betina	-110 ekor	
		-Sapi bibit jantan	-22 ekor	
		-Babi persilangan betina	-200 ekor	
		- Jumlah bimtek budidaya ternak	-2 paket	
		-Jumlah pelatihan pengolahan pakan dan limbah ternak	-2 paket	
2.00.03.2.00.03.01.22.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	-Jumlah pengawasan pelaku usaha produk dan Pengolahan peternakan	-12 kali	218.000.000,00
		-Jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan	-4 kali	
		-Jumlah pembinaan pelaku usaha dan pemasaran produk peternakan	-3 kali	

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.03.2.00.03.01.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan efisiensi, kualitas, mutu dan pemasaran komoditas pertanian	1 kegiatan	250.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.23.007.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _	- Jumlah promosi/pameran pertanian hasil peternakan	8 Kali	250.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	1 kegiatan	200.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.24.002.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	- Jumlah sarana prasarana peternakan - Jumlah alsintan ternak	- 1 Paket - 3 Unit	200.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.25.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengelolaan lahan, sarana prasarana dan teknologi pertanian	3 kegiatan	2.782.348.000,00
2.00.03.2.00.03.01.25.001.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	-Jumlah jalan pertanian -Jumlah pembangunan sumber air pertanian -Jumlah terpeliharanya prasarana pertanian	-2 unit -8 unit -1 unit	2.020.600.000,00
2.00.03.2.00.03.01.25.002.	Penyediaan sarana produksi pertanian	-Jumlah alat mesin pertanian -Jumlah bantuan pupuk ke masyarakat	-4 unit -1 paket	542.188.000,00
2.00.03.2.00.03.01.25.003.	Fasilitasi pembiayaan pertanian	-Jumlah pembinaan kemitraan petani/kelompok -Jumlah pembinaan penguatan modal bagi kelompok tani	-2 kali -35 kali	219.560.000,00
2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Meningkatnya produksi produksi dan produktivitas pertanian	2 kegiatan	667.392.000,00
2.00.03.2.00.03.01.26.001.	Pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman Hortikultura	-Jumlah bibit unggul hortikultura -Jumlah SL PHT komoditi hortikultura -Jumlah demplot komoditi hortikultura -Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura -Jumlah SL GAP komoditi hortikultura	-7000 pohon -6 kelompok -4 kelompok -2 kelompok -3 kelompok	446.992.000,00
2.00.03.2.00.03.01.26.002.	Peningkatan produksi Hortikultura			220.400.000,00
2.00.03.2.00.03.01.27.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	2 kegiatan	618.440.000,00
2.00.03.2.00.03.01.27.001.	Peningkatan produksi perkebunan	- Jumlah Pelatihan budidaya perkebunan - Jumlah bibit tanaman perkebunan	6 Kelompok 15000 Pohon	298.880.000,00
2.00.03.2.00.03.01.27.002.	Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	-Jumlah pelatihan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan -Jumlah fasilitas pengolahan pasca panen komoditi perkebunan -Jumlah penjajagan harga dan peluang pasar komoditi perkebunan -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas perkebunan -Jumlah musyawarah harga komoditi tembakau	1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 2 kali	319.560.000,00
2.00.04.	KEHUTANAN			-
2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			-
2.00.06.	PERDAGANGAN			60.290.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			60.290.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.542.132.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang ditindaklanjuti	2500 Surat 12 Bulan	221.923.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang dapat dipenuhi	4 Jenis 12 Bulan	140.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Sarana Mobilitas Darat yang dilaksanakan	2 Unit 12 Bulan	198.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah KIR dan Perpanjangan STNK yang dilaksanakan	40 Unit 12 Bulan	15.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran yang disusun SKPD	350 Dokumen 12 Bulan	443.600.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	18 Jenis 12 Bulan	46.709.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1 Paket 12 Bulan	8.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	4 Jenis 12 Bulan	8.900.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 Jenis 12 Bulan	155.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 Jenis	5.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Minum Pegawai yang Disediakan	4 Jenis 12 Bulan	25.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dalam periode 1 tahun	12 Bulan	275.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Operasional Perkantoran	100%	266.727.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	3 Unit	45.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	8 Jenis 12 Bulan	93.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor yang Dilaksanakan	2 Paket 12 Bulan	4.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.06.2.00.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	2 Jenis 12 Bulan	99.727.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Jenis 12 Bulan	10.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	4 Jenis 12 Bulan	15.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	100%	115.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan	50 Buah	20.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Khusus untuk Hari-hari Tertentu yang Disediakan	50 Buah	20.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur yang Dilaksanakan	12 Bulan	75.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan SDM	100%	20.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat Formal yang Dilaksanakan	2 Orang 12 Bulan	20.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan SKPD	100%	180.835.000,00
2.00.06.2.00.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD yang Disediakan - Jumlah LAKIP yang Disusun. - Jumlah Monitoring dan Evaluasi SKPD yang Dilaksanakan	12 Laporan 1 Buku	115.500.000,00
2.00.06.2.00.06.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang Disusun Selama 1 Tahun	12 Laporan	65.335.000,00
2.00.06.2.00.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Teridentifikasinya Rencana Anggaran SKPD	100%	178.014.000,00
2.00.06.2.00.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan) yang Disusun	5 Dokumen 12 Bulan	178.014.000,00
2.00.06.2.00.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya Hasil-hasil Pembangunan	100%	252.292.000,00
2.00.06.2.00.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Pameran/ Pawai Pembangunan yang Dilaksanakan	4 Kali	252.292.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terwujudnya Tertib Ukur	11.025 Unit	480.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.005.	Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur, Daerah Tertib Ukur, dan Pasar Tertib Ukur yang Dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	50.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.007.	Pelaksanaan Tera-tera Ulang	Jumlah Tera dan Tera Ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	300.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.06.2.00.06.01.15.008.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	70.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.011.	Pembinaan Tertib Niaga	Jumlah Pembinaan Tertib Niaga di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	60.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produk Unggulan dan Andalan Daerah	10 Produk Unggulan	85.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.012.	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Jumlah pameran Berskala Nasional atau Internasional yang Dilaksanakan	1 Kegiatan 12 Bulan	85.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.19.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Meningkatnya Kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2 Kecamatan	50.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.19.003.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Dilaksanakan	30 Pedagang 12 Bulan	50.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar yang Memadai	3 Pasar	57.075.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.20.001.	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Rehab Pasar Desa/ Revitalisasi Pasar yang Dilaksanakan	3 Pasar 12 Bulan	57.075.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Tersedianya Data dan Informasi Perdagangan	9 Kecamatan	45.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	45.000.000,00
2.00.07.	PERINDUSTRIAN			560.000.000,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			560.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Perkembangann Kelompok Industri Kecil dan Menengah	5 Kelompok	100.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.002.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Pembinaan dan Pendataan Industri Kecil yang Dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	40.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.007.	Pemetaan potensi industry kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	Jumlah Pendataan Perajin IKRT / RT yang Dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	60.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pengusaha Industri Kecil Rumah Tangga	53 Orang	160.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga dan Magang Industri Dilaksanakan	2 Kali 12 Bulan	100.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.002.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Teknologi Industri yang Dilaksanakan	1 Kali 12 Bulan	60.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM dengan Sistem Industri yang Terkendali	40 IKM	50.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
2.00.07.2.00.06.01.18.004.	Pengawasan Terhadap Sistem Industri kecil dan menengah	Jumlah Pengawasan terhadap Sistem Industri	9 Kecamatan	50.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.19.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	12 Bulan	
		Tersebar nya Informasi Produk IKM Kabupaten Buleleng melalui Pelaksanaan Pameran	8 Kali	250.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.19.002.	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Pameran produk IKM Kabupaten Buleleng	8 kali	250.000.000,00
2.00.08.	TRANSMIGRASI		12 Bulan	150.000.000,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA			150.000.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigrasi yang sejahtera dan mendapat hak-haknya.	15 orang	150.000.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.001.	Penyuluhan transmigrasi regional			80.000.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.004.	Peningkatan Lokasi Transmigrasi			70.000.000,00
3.00.	PENUNJANG URUSAN			57.192.556.916,00
3.00.01.	PERENCANAAN			12.606.588.393,99
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			12.606.588.393,99
3.00.01.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	2.304.415.409,30
3.00.01.3.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat masuk/keluar	3000 exp	55.267.905,00
3.00.01.3.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	1 tahun	134.560.524,00
3.00.01.3.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit kendaraan roda 4	171.473.400,00
3.00.01.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional	1 Tahun	9.219.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	390.883.354,25
3.00.01.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 tahun	223.400.984,73
3.00.01.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	66.653.830,95
3.00.01.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak an dan penggandaan	1 tahun	29.810.558,40
3.00.01.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	16.681.688,31

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.01.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	317.207.352,00
3.00.01.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	13.828.500,00
3.00.01.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	105.886.115,16
3.00.01.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Tahun	700.644.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	tersediannya biaya administrasi kepegawaian	12 bulan	68.898.196,50
3.00.01.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8 Kegiatan	673.373.460,48
3.00.01.3.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Teradakannya kendaraan dinas / operasional	3 unit	60.845.400,00
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Teradakannya Meubeleur	58 unit	108.323.250,00
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor Secara Berkala	1 Tahun	69.142.500,00
3.00.01.3.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Secara Berkala	1 Tahun	119.366.874,48
3.00.01.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	12 Bulan	20.281.800,00
3.00.01.3.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala	12 Bulan	17.516.100,00
3.00.01.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	1 Paket	193.599.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terdata dan terinventarisasinya asset barang milik daerah	1 Tahun	84.298.536,00
3.00.01.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	184.989.652,47
3.00.01.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Teradakannya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	29 stel	34.518.056,37
3.00.01.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Teradakannya pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	43.172.577,00
3.00.01.3.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	107.299.019,10
3.00.01.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	115.237.500,00
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Binteks implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang/Kali	115.237.500,00
3.00.01.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Kegiatan	106.112.672,09

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.01.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang - Penetapan Kinerja Bappeda Litbang - Laporan LAKIP Bappeda Litbang - Laporan Bulanan Bappeda Litbang terhadap Capaian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	51.513.467,25
3.00.01.3.00.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semeteran	2 Buku	23.807.376,08
3.00.01.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	30.791.828,76
3.00.01.3.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	142.710.120,00
3.00.01.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya anggaran Bappeda Litbang yang baik - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Pergeseran - Dokumen RDPPA - Dokumen DPPA	100 % Tersedianya dokumen anggaran Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergeseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	142.710.120,00
3.00.01.3.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	445.305.627,00
3.00.01.3.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terselenggaranya pameran/pawai pembangunan	1 Kali	445.305.627,00
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terwujudnya informasi pembangunan daerah	100%	1.377.597.198,18

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.01.3.00.01.01.15.001.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat - Aplikasi system perencanaan - Dokumen renja induk badan/dinas/kecamatan/bagian - Dokumen Renja Perubahan Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian	95 % pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat dan valid - 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	883.101.100,98
3.00.01.3.00.01.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan			393.087.097,20
3.00.01.3.00.01.01.15.005.	Penyusunan Profile Daerah			101.409.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Cepat Tumbuh	100%	448.156.314,80
3.00.01.3.00.01.01.18.003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1 dokumen RPIJM bidang cipta karya tahun 2020-2024	1 dokumen	154.180.399,80
3.00.01.3.00.01.01.18.008.	Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	1 laporan kordinasi perencanaan penyediaan informasi dan pengembangan wilayah	1 dokumen	124.318.215,00
3.00.01.3.00.01.01.18.009.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Kebencanaan	1 dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran di kabupaten buleleng	1 dokumen	169.657.700,00
3.00.01.3.00.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah Dan Besar	100%	750.313.685,20
3.00.01.3.00.01.01.19.013.	Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Dokumen Pemantauan RAD AMPL Kab. Buleleng 2 Dokumen Review Rencana Induk Pengembangan SPAM Kab. buleleng	1 Dokumen 1 Dokumen	460.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1 laporan pelaksanaan pokja dan kawasan permukiman 2 legalisasi dokumen RP3KP	2 laporan 1 dokumen	290.313.685,20
3.00.01.3.00.01.01.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Kegiatan	124.339.326,51
3.00.01.3.00.01.01.20.002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa	124.339.326,51
3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan	100%	3.444.857.427,94

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng: a. Dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 b. Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKPD Tahun 2019	1.539.444.671,52
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan RKPD Tahun 2019	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	659.826.973,43
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019	66.376.800,00
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			296.851.800,00
3.00.01.3.00.01.01.21.014.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara pada program dan kegiatan Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	742.586.080,19
3.00.01.3.00.01.01.21.015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Rp200000000	139.771.102,80
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan ekonomi	100%	1.290.660.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.018.	Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dokumen	130.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengmbangan Dunia Usaha	2 Dokumen	180.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Perencanaan Pembangunan Kepariwisataa	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kepariwisataa	1 Dokumen	225.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	125.660.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Hasil Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Ketahanan	1 Dokumen	630.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	Terwujudnya Capaian Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%	1.198.520.000,02
3.00.01.3.00.01.01.23.012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial			99.389.854,64
3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga			290.398.500,00
3.00.01.3.00.01.01.23.014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia			304.277.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD), -Tersusunnya laporan Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan TKPKD, -Tersusunnya Dokumen Pengembangan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial	3 Dokumen/buku	504.454.645,38
3.00.02.	KEUANGAN			35.842.556.916,00
3.00.02.01.	BADAN KEUANGAN DAERAH			35.842.556.916,00
3.00.02.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan	4.433.457.912,00
3.00.02.3.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terdistribusikan	20 Surat	26.444.550,00
3.00.02.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 Rekening	465.465.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana prasarana operasional kantor yang memadai	2 Unit	304.833.540,00
3.00.02.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	147 Unit	57.288.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng	4000 SPP/SPM	1.357.766.224,00
3.00.02.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	34 Jenis	262.779.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	2024 Item	68.484.120,00
3.00.02.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	54.996.480,00
3.00.02.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen istalasi/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	155.335.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.02.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85 Unit	698.468.595,00
3.00.02.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	96 Eksemplar	12.276.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1700 Kotak	290.020.500,00
3.00.02.3.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	20 Orang	252.832.663,00
3.00.02.3.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya jasa administrasi kepegawaian	141 Orang	426.468.240,00
3.00.02.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur	10 Kegiatan	2.040.239.954,00
3.00.02.3.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang memadai	1 Unit	132.990.000,00
		- Terlaksananya pembuatan DED gedung kantor		
3.00.02.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	2 Unit	480.321.295,00
3.00.02.3.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	14 Buah	97.437.881,00
3.00.02.3.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya sarana dan prasanara upacara	51 Kali	177.490.500,00
3.00.02.3.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Terselenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	97 Buah	120.509.400,00
3.00.02.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaanrutin/berkala gedung	3 Unit	381.096.144,00
3.00.02.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasioanal secara rutin/berkala	135 Unit	288.066.548,00
3.00.02.3.00.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang laik pakai	40 Unit	145.214.850,00
3.00.02.3.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	15 Unit	78.259.500,00
3.00.02.3.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terklasananya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	1 Dokumen	138.853.836,00
3.00.02.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	3 Kegiatan	390.143.463,00
3.00.02.3.00.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	83.754.963,00
3.00.02.3.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	562 Stel	204.088.500,00
3.00.02.3.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terselenggaranya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 Unit	102.300.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD	3 Kegiatan	60.929.136,00
3.00.02.3.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	19.948.500,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.02.3.00.02.01.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen/laporan tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku	17.391.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya dokumen/laporan keuangan akhit tahun	4 Buku	23.589.636,00
3.00.02.3.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran SKPD	1 Kegiatan	243.205.547,00
3.00.02.3.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan anggaran SKPD	163 Buku	243.205.547,00
3.00.02.3.00.02.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Tersedianya aplikasi dan jaringan system informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	3.207.148.767,00
3.00.02.3.00.02.01.09.001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah	42 SKPD	3.207.148.767,00
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah	4 Kegiatan	1.198.823.814,00
3.00.02.3.00.02.01.15.002.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	100 Buku	462.023.814,00
3.00.02.3.00.02.01.15.005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Jumlah dokumen kebijakan pendapatan yang disusun	60 Buku	402.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monev sumber-sumber pendapatan disusun	1 Laporan	195.300.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah aparatur di perangkat daerah yang paham dalam penyusunan laporan, monev PAD	1 Dokumen	139.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah	5 Kegiatan	4.991.620.324,00
3.00.02.3.00.02.01.17.002.	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	42 SKPD	939.120.324,00
3.00.02.3.00.02.01.17.003.	Pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	700 Buku/dok	325.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.004.	Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	Jumlah buku rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	800 Buku	2.797.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.005.	Penyusunan pergeseran APBD	Jumlah buku pergeseran APBD	150 Buku	604.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.006.	Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	150 Buku	325.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.	Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pelayanan perbendaharaan keuangan daerah	9 Kegiatan	3.900.075.807,00
3.00.02.3.00.02.01.18.001.	Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan	Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan	1 Dokumen/Surat Edaran	297.600.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.002.	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	Jumlah dokumen pengeluaran kas dan penetapan SPD	930 Dokumen	604.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.003.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	1.400 Dokumen	790.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.004.	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana tranfer	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan dana transfer	500 Dokumen	338.175.807,00
3.00.02.3.00.02.01.18.005.	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	Jumlah dokumen SP2D Belanja Langsung	8000 SP2D	790.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.02.3.00.02.01.18.006.	Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	360 Laporan	232.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.007.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Jumlah dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung	5000 SP2D	465.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.008.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	Jumlah SKPD yang dilayani bidang belanja tidak langsung	42 SKPD dan 129 Desa	148.800.000,00
3.00.02.3.00.02.01.18.010.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	Jumlah SKPD yang dilayani Bidang Belanja Langsung	42 SKPD	232.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.	Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	8 Kegiatan	3.049.815.867,00
3.00.02.3.00.02.01.19.001.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	106.365.867,00
3.00.02.3.00.02.01.19.002.	Pelaksanaan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah laporan SKPD mengenai system akuntansi dan laporan keuangan	42 SKPD	744.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.003.	Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan laiannya yang ditunjuk	1 Dokumen	60.450.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Jumlah laporan SKPD mengenai pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah	42 SKPD	288.300.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.005.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen	902.100.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.006.	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan pembinaan akuntansi keuangan daerah	42 SKPD	232.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan SKPD yang melakukan pelaporan dan pengembangan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	42 SKPD	372.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.008.	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	Jumlah laporan SKPD mengenai pemantauan dan tindaklanjut kerugian daerah	42 SKPD	344.100.000,00
3.00.02.3.00.02.01.20.	Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Terlaksananya pelayanan-pelayanan dan analisis kebutuhan aset	3 Kegiatan	1.204.283.412,00
3.00.02.3.00.02.01.20.002.	Perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang aset/barang milik daerah	Jumlah buku perencanaan dan analisis kebutuhan aset/barang milik daerah	120 Buku	209.250.000,00
3.00.02.3.00.02.01.20.005.	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang	Jumlah sertifikat tanah milik daerah	200 Sertifikat	595.200.000,00
3.00.02.3.00.02.01.20.006.	Pelaksanaan penilaian barang milik daerah	Jumlah obyek penilaian (OP) Barang Milik Daerah	200 OP	399.833.412,00
3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Terlaksananya pelayanan inventarisasi dan pemanfaatan aset	5 Kegiatan	2.502.512.913,00
3.00.02.3.00.02.01.21.001.	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	95 Buku/dok	335.612.913,00
3.00.02.3.00.02.01.21.002.	Pelaksanaan penata usahaan/inventarisasi barang/aset daerah	Jumlah dokumen SKPD mengenai pelaksanaan penatausahaan/inventarisasi barang/aset daerah	42 SKPD	1.162.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.02.3.00.02.01.21.003.	Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	20 Dokumen	334.800.000,00
3.00.02.3.00.02.01.21.004.	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan penghapusan barang milik daerah (BMD)	39 Dokumen	390.600.000,00
3.00.02.3.00.02.01.21.005.	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen SKPD mengenai pembinaan pengelolaan barang milik daerah	42 SKPD	279.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.	Program Peningkatan dan Pelayanan PAD	Terlaksananya pendataan dan pengembangan PAD	4 Kegiatan	4.825.900.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.001.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	- Jumlah data angka target pajak daerah	- 100%	882.418.600,00
		- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	- 231.669 WP	
3.00.02.3.00.02.01.22.002.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online	Jumlah data angka target pajak daerah	100%	390.600.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.003.	Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah laporan angka penerimaan pajak daerah	100%	1.209.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.004.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Jumlah data angka target bukan pajak	1 Laporan	783.300.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.005.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng I)	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	69.955 Wajib Pajak	463.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.006.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng II)	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	69.955 Wajib Pajak	694.581.400,00
3.00.02.3.00.02.01.22.007.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng III)	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	69.955 Wajib Pajak	403.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.23.	Program Pendataan dan Pengembangan PAD	Terlaksananya peningkatan pelayanan pendapatan PAD	3 Kegiatan	3.794.400.000,00
3.00.02.3.00.02.01.23.001.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Jumlah penetapan pajak daerah	350 WP	558.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.23.002.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah	400 OP	2.790.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.23.003.	Verifikasi Data dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah verifikasi data keberatan pajak daerah	100%	446.400.000,00
3.00.03.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			8.350.000.000,00
3.00.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN			8.350.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.546.236.704,00
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani	5.000 Surat	88.339.750,00
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telp tepat waktu	36 Rekening	136.140.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terbayarnya sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Kepala badan dan sekretaris	100%	206.236.704,00
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat perijinan kendaraan dinas operasional yang terbayar	31 STNK	9.273.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.03.3.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	15 Dokumen	400.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase bahan/alat kebersihan yang tersedia	100%	116.048.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	38 Unit	26.620.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100%	39.364.400,00
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan pengadaan yang tersedia	100%	34.943.250,00
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang disediakan	699 Buah	22.885.800,00
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	185.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disedikan	2.912 Eksemplar	15.106.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100%	100.830.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah dokumen Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	65 Dokumen	165.449.800,00
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	837.965.446,00
3.00.03.3.00.03.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung CAT	1 Paket	-
3.00.03.3.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Sepeda Motor yang disedikan	5 Unit	100.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	53.100.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang memadai	8 Unit	35.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Persentase sarana upacara yang disediakan	100%	170.965.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	210.942.300,00
3.00.03.3.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara	16 Unit	139.217.146,00
3.00.03.3.00.03.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meja dan kursi yang dipelihara	250 Unit	18.500.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	110.241.000,00
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	69.965.800,00
3.00.03.3.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian endek dan olahraga yang disediakan	57 Stel	69.965.800,00
3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pelaporan yang akurat dan tepat waktu	100%	65.640.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.03.3.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu	31 Dokumen	65.640.000,00
3.00.03.3.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	100%	189.545.000,00
3.00.03.3.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat waktu	11 Dokumen	189.545.000,00
3.00.03.3.00.03.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah	100%	15.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	1 Paket	15.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	90%	612.679.200,00
3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Penanganan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun yang terbit tepat waktu	350 Orang	126.600.000,00
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Jumlah Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti	1.200 Orang	120.584.300,00
3.00.03.3.00.03.01.18.003.	Penyelenggaraan Adminstrasi Mutasi Kepegawaian	Jumlah SK kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang terbit tepat waktu	1.300 Orang	323.312.600,00
3.00.03.3.00.03.01.18.004.	Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengusulkan JKK, JKM dan Kartu Taspen, THT	350 Orang	42.182.300,00
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	Persentase ketersediaan data kepegawaian /ASN yang valid dan akurat	60%	822.120.800,00
3.00.03.3.00.03.01.19.001.	Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur	Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan	5 SK	15.369.000,00
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Jumlah kebutuhan Formasi CPNS	100 Orang	220.566.700,00
3.00.03.3.00.03.01.19.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang update	5.000 Orang	95.601.600,00
3.00.03.3.00.03.01.19.004.	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang disusun	500 Orang	118.107.300,00
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur	Jumlah usulan penerbitan kartu identitas aparatur	200 Kartu Identitas	57.815.600,00
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Jumlah dokumen kelembagaan KORPRI yang disusun	12 Dokumen	314.660.600,00
3.00.03.3.00.03.01.20.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase meningkatnya kompetensi pegawai/ASN	24%	2.909.197.050,00
3.00.03.3.00.03.01.20.001.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Workshop, Rakor dan Seminar	255 Orang	922.103.400,00
3.00.03.3.00.03.01.20.002.	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	60 Orang	65.120.000,00
3.00.03.3.00.03.01.20.003.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Jumlah Pejabat yang Lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV	31 Orang	1.039.737.000,00
3.00.03.3.00.03.01.20.004.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Jumlah PNS fungsional yang mengikuti diklat fungsional	55 Orang	423.122.750,00
3.00.03.3.00.03.01.20.005.	Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Tk I dan Tk. II	25 Orang	92.897.200,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
3.00.03.3.00.03.01.20.006.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar , Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	2 Orang	49.948.800,00
3.00.03.3.00.03.01.20.007.	Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi kompetensi	36 Orang	216.267.900,00
3.00.03.3.00.03.01.20.008.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNSD yang lulus diklat prajabatan	364 Orang	100.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	90%	1.281.650.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.001.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah PNS yang Memahami Peraturan Kepegawaian	300 Orang	219.480.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.002.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang disusun	22 Dokumen	45.820.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.003.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah Surat Keputusan Mutasi yang terbit	50 SK	407.200.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.004.	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Jumlah Kasus-Kasus PNS Indisipliner yang di selesaikan	14 Kasus	280.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.005.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terbit	300 SK	87.150.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.006.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42 Dokumen	242.000.000,00
3.00.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			-
3.00.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			393.411.606,01
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			393.411.606,01
3.00.05.3.00.01.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan	100%	393.411.606,01
3.00.05.3.00.01.01.15.001.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK			156.744.710,75
3.00.05.3.00.01.01.15.002.	Diseminasi Litbang dan Inovasi-inovasi Daerah			236.666.895,26
4.00.	PENDUKUNG			115.363.159.252,00
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH			41.666.259.252,00
4.00.01.02.01.	BAGIAN PEMERINTAHAN			5.500.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah	5 upacara/hari besar nasional, 3 upacara/hari besar daerah	1.600.950.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah upacara/peringatan hari besar nasional yang terlaksana sesuai perencanaan, penganggaran dan petunjuk teknis	5 upacara	653.250.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.01.02.053.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Daerah	Jumlah upacara /peringatan hari besar Daerah yang terlaksana sesuai perencanaan, penganggaran dan petunjuk teknis	3 upacara	947.700.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.	Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Terwujudnya koordinasi pelayanan umum pemerintahan yang baik	3,2 (sangat tinggi), 70%, 12 laporan, 12 laporan	2.899.250.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.001.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	50 dokumen	288.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.003.	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	9 laporan	130.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.010.	Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi SKPD dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 rapat koordinasi	660.125.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.011.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan rapat - rapat koordinasi unsur pimpinan daerah dan lintas sektoral dengan instansi vertikal di daerah	12 rapat koordinasi	1.821.125.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.22.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya daerah	25 perjanjian, 39 SKPD	540.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.22.005.	Evaluasi Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah evaluasi terhadap draf kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah yang diajukan oleh perangkat daerah.	25 evaluasi	345.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.22.009.	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah rakor / sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan kerjasama daerah	1 rakor/sosialisasi	195.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.29.	Program Pembakuan Nama Rupabumi	Terwujudnya penetapan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam pembakuan nama rupabumi	500 unsur, 27 orang	228.600.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.29.001.	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan infentarisasi dan verifikasi pembakuan nama rupabumi	25 buku	160.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.29.002.	Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi	Jumlah peserta bintek pembakuan nama rupabumi	27 orang	68.600.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.30.	Program Penegasan Batas Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan melalui kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah	10 desa/kelurahan, 2 segmen, 27 orang	231.200.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.30.001.	Penegasan Batas Wilayah Dalam Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Peta Wilayah Desa dan Peta Wilayah Kelurahan	10 Peraturan Bupati	160.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.30.002.	Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten	Jumlah pilar batas kabupaten yang terbangun dan terpelihara dalam setahun	2 pilar	-
4.00.01.4.00.01.02.01.30.003.	Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten	Jumlah peserta bintek penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten	27 orang	71.200.000,00
4.00.01.02.02.	BAGIAN HUKUM			1.950.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.02.23.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya produk hukum yang berkualitas	100	1.895.093.100,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.003.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Legislasi Rancangan peraturan daerah yang tertib hukum	6 Raperda	507.093.100,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.005.	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasikannya Peraturan Perundangundangan melalui Sistem jaringan Dokumentasi Hukum (SJDIH) dan tersedianya Lembaran daerah Serta Himpunan Peraturan bupati dan Keputusan Bupati	110 Buku	351.950.700,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.007.	Pembinaan dan Penuntunan Awig-awig Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan,penyusun an dan Penyuratan Awig- awig	6 Awig	90.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.008.	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	9 Kecamatan	123.093.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.009.	Rencana Aksi Nasional HAM	Terlaksananya evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi HAM	2 Laporan	14.443.200,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.010.	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Permasalahan Peraturan perundang undangan	5 dokumen	745.863.400,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.011.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Materi Sosialisasi Peraturan Daerah	3 Perda	62.649.700,00
4.00.01.4.00.01.02.02.28.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Peraturan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitas peraturan desa	100	54.906.900,00
4.00.01.4.00.01.02.02.28.003.	Evaluasi dan Pembinaan Rancangan Peraturan Desa	Terlaksananya Evalusi dan Pembinaan Rancangan Peraturan desa	129 desa	54.906.900,00
4.00.01.02.03.	BAGIAN ORGANISASI			2.000.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Profesionalisme Dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	100	286.280.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			139.780.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			101.500.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.007.	Pembinaan Disiplin Kepegawaian			45.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kelembagaan Dan Kinerja Aparatur	100	1.713.720.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.001.	Penyusunan Kinerja Pemerintah			610.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.002.	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik			333.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.003.	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat			-
4.00.01.4.00.01.02.03.24.004.	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah			203.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.006.	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian			145.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.03.24.007.	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (kompetensi)			-
4.00.01.4.00.01.02.03.24.009.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng			75.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.010.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi			155.920.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.011.	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			133.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.012.	Penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng			58.000.000,00
4.00.01.02.04.	BAGIAN PEREKONOMIAN			1.950.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.	Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	7 Kegiatan	1.950.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.004.	Pembinaan Pelaksanaan LPD	- Terlaksananya Pembinaan Teknis LPD di Kabupaten Buleleng - Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan LPD se-Kabupaten Buleleng	- 80 LPD - 1 Kali	250.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.006.	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terlaksananya kunjungan kerja Bupati Buleleng	- 42 OPD - 1 Kali	400.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.009.	Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam	Terkendalnya pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	9 Kecamatan	200.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.011.	Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	- Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan PEKAN Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 di Sumatera Barat - Terkoordinasinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Buleleng	- 1 Kegiatan - 1 Tahun	450.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.013.	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam	Terkendalnya pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam	9 Kecamatan	150.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.014.	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Terlaksananya laporan perusahaan Daerah secara berkala	4 Perusahaan Daerah	150.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.015.	Pelaksanaan Promosi Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya promosi potensi unggulan daerah	2 Kali	350.000.000,00
4.00.01.02.05.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			8.013.368.800,00
4.00.01.4.00.01.02.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Upacara Keagamaan	75 Upacara	2.850.750.000,00
4.00.01.4.00.01.02.05.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara			2.850.750.000,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial			5.162.618.800,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.001.	Pembinaan Masalah Kesejahteraan Sosial			941.412.340,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.05.19.002.	Pembinaan Adat dan kebudayaan			2.375.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.004.	Penanggulangan dan Pencegahan HIV da AIDS			895.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.005.	Pembinaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan			592.029.890,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.006.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkotika			359.176.570,00
4.00.01.02.06.	BAGIAN UMUM			8.002.890.452,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	-	7.833.232.452,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	30.000 Eksemplar	481.154.352,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan TV Berlangganan	1 Tahun / 756 Rek.	1.291.500.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	1000 SPM	981.821.979,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	42 Jenis	60.270.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	59.171.364,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.880 Eksemplar	179.983.440,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	1 Tahun	1.942.214.400,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	400 OH	1.063.335.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.023.	Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KDH/ WKDH	- Terlaksananya Penyediaan peralatan dan bahan pembersih - Terlaksananya pengisian tabung gas - Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	2 Lokasi	1.773.781.917,00
4.00.01.4.00.01.02.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	-	40.508.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	1 Tahun	40.508.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Penerimaan Tamu-tamu Pemkab	-	129.150.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Terlaksananya Jasa Hiburan	1 Tahun	129.150.000,00
4.00.01.02.07.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			7.500.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.07.18.	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Terwujudnya Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Terlaksananya Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	7.500.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.001.	Peliputan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Liputan dan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	525 Liputan	679.002.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.002.	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	661 Publikasi	1.593.359.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.003.	Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan	Terlaksananya Liputan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan oleh Wartawan	900 Rilis Berita	251.585.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.004.	Pelaksanaan Jumpa Pers	Terlaksananya Jumpa Pers	12 Jumpa Pers	49.391.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.006.	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya Acara dan Upacara Keprotokolan	525 Acara dan Upacara	4.060.959.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.007.	Penyusunan Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumentasi Informasi dan Kegiatan serta Tersebar nya Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Informasi	6 Media Informasi	865.704.000,00
4.00.01.02.08.	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN			1.900.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.08.25.	Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa	2 Kegiatan	459.504.780,00
4.00.01.4.00.01.02.08.25.001.	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	a. Jumlah data paket pengadaan yang terupdate b. Jumlah verifikasi dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket lelang/seleksi	a. 2 Data b. 100 Dokumen	284.970.300,00
4.00.01.4.00.01.02.08.25.002.	Kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	a. Jumlah data OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP b. Jumlah data OPD yang mengumumkan RUP pada SiRUP LKPP	a. 1 Data (42 OPD) b. 1 Data (42 OPD)	174.534.480,00
4.00.01.4.00.01.02.08.26.	Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Meningkatnya layanan lelang/seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengelolaan arsip dokumen hasil lelang/seleksi	2 Kegiatan	1.012.641.420,00
4.00.01.4.00.01.02.08.26.001.	Layanan Lelang/Seleksi Pengadaan	a. Jumlah data penetapan pemenang lelang/seleksi b. Jumlah dokumen hasil lelang yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah data penyelesaian permasalahan lelang/seleksi d. Jumlah data Penyedia mengajukan penawaran dalam lelang/seleksi e. Jumlah data penurunan gagal lelang paket pengadaan f. Nilai IKM	a. 100 data pemenang lelang/seleksi b. 100 Dokumen c. 2 data d. 2 data e. 2 data f. Nilai 3 (Baik)	943.775.520,00
4.00.01.4.00.01.02.08.26.002.	Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Jumlah dokumen hasil lelang yang diarsip/dikelola	100 Dokumen	68.865.900,00
4.00.01.4.00.01.02.08.27.	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Level kematangan (self asesment) Bagian Layanan Pengadaan	2 Kegiatan	427.853.800,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.01.4.00.01.02.08.27.001.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa	a. Jumlah Laporan monitoring, evaluasi, pengadaan barang/jasa b. Level kematangan (self asesment)	a. 12 Laporan b. Level 2	120.824.100,00
4.00.01.4.00.01.02.08.27.002.	Pengembangan, Pembinaan, dan Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan	Jumlah pengelola pengadaan barang/jasa mengikuti bintek/seminar/diklat kompetensi	20 Pengelola	307.029.700,00
4.00.01.02.09.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN			4.850.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase sarana dan prasarana kerja yang ditindaklanjuti	100	1.113.300.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	95 kegiatan	853.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Marang Milik Daerah	terjaminnya barang milik daerah	9 unit	55.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	318 unit	105.500.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penerangan lingkungan kantor yang memadai	25 jenis	99.800.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset Sekretariat Daerah Dalam Kondisi Baik	100	3.736.700.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya pembangunan gedung/lingkungan kantor	5 paket	200.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	450.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	32 jenis	150.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	2 lokasi	100.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	4 lokasi	457.750.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	4 unit	346.200.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22 unit	564.450.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.025.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	3 lokasi	612.950.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor lingkup Setda Kab. Buleleng	4 lokasi	351.050.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor/lingkup kantor	4 lokasi	100.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	terpenuhinya inventarisasi asset barang milik daerah	24 dokumen	197.550.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	termonitornya pengelolaan aset barang milik daerah	32 dokumen	206.750.000,00
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD			39.250.000.000,00
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD			39.250.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.02.4.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	13.795.306.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	4000 Surat	91.700.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa komunikasi (Telepon), Air dan Listrik	276 rekening	564.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	348.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 48 Kendaraan	48 Unit	34.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	24 Dokumen	876.222.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebutuhan Jasa Kebersihan/ Rumah Jabatan	3 Unit	288.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	40 Jenis	148.100.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	46.780.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Yang Tersedia	34 Jenis	34.909.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	11 Unit	876.600.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2868 Exsemplar	170.484.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekuensi Pemenuhan Makan dan minuman	7551 Orang	863.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Perjalan Dinas Dalam Rangka Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/ Dalam Daerah	1272 Oh	9.353.511.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.019.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	180 Orang	100.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Kegiatan	2.556.450.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Paket	78.900.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang tersedia	4 Unit	540.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedia	3 LS	15.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebulair	14 buah	67.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terwujudnya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	96 pcs/120 paket/ 279 buah/ 20 gulung	419.600.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	2 unit	310.100.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/ berkala	1 LS/ 1 paket	269.200.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.02.4.00.02.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan	48 unit	689.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	10 item	116.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	3 kali	51.250.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	865.050.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Diadakan	238 stel	718.800.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan DPRD & PAW Yang Diadakan	45 stel	78.750.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari Tertentu yang Diadakan	45 buah	67.500.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4 Kegiatan	2.053.083.500,00
4.00.02.4.00.02.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/ PNS Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	301.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 ranperda	1.092.623.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan	17 OH	244.350.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah aparatur /PNS Yang Dinilai	9 Orang	414.910.500,00
4.00.02.4.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	248.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Dokumen	248.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	215.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen anggaran SKPD	5 Dokumen	215.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah	7 Kegiatan	18.612.386.500,00
4.00.02.4.00.02.02.15.001.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terbahasnya ranperda Yang masuk ke DPRD	14 Ranperda	3.115.850.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.002.	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	jumlah pelaksanaan hearing, dialog dan koordinasi Pejabat pemerintahan Daerah dan Toko	24 Rapat	54.169.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.003.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat alat Kelengkapan dewan Yang Terlaksana	223 Kali	338.600.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.004.	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah rapat-rapat Paripurna Yang Terlaksana	33 kali	204.573.100,00
4.00.02.4.00.02.02.15.005.	Kegiatan Reses	mlah Pelaksanaan reses Anggota DPRD	135 Orang	4.194.670.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.006.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah Yang terlaksana	405 OH	297.615.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.02.4.00.02.02.15.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah Yang terlaksana	3180 OH	10.406.909.400,00
4.00.02.4.00.02.02.16.	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Terlaksananya Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	3 kegiatan	903.360.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.001.	Publikasi pembangunan, Pemerintah dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Media	84 Kali	552.800.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.002.	Pelaksanaan Jumpa Pers	Terlaksananya jumpa Pers	12 Kali	80.186.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.003.	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan anggota	32 Kali	270.374.000,00
4.00.03.	PENGAWASAN			4.700.000.000,00
4.00.03.01.	INSPEKTORAT DAERAH			4.700.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi	14 Kegiatan	1.381.498.940,00
4.00.03.4.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya Surat Masuk dan Surat Keluar	2700 Eksemplar	46.190.400,00
4.00.03.4.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Rekening Air & Rekening Listrik	36 Rekening	80.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Mobil Operasional Kantor	3 Jenis/12 Bulan	115.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas yang diselesaikan	33 Unit	9.900.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	11 Orang/12 Bulan	525.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang/12 Bulan	33.355.900,00
4.00.03.4.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis/12 Bulan	51.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat - alat tulis kantor	6 Jenis/12 Bulan	100.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Perlengkapan	5 Jenis	25.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	13.531.600,00
4.00.03.4.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengktan Kantor	10 Jenis	41.514.300,00
4.00.03.4.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan	4 jenis/12 bulan	8.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 Jenis/12 Bulan	82.989.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar / dalam daerah	1 Tahun	250.017.740,00
4.00.03.4.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 Kegiatan	402.887.260,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.03.4.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	20.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana mebeleur	6 Jenis	14.900.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	7 Jenis/12 Bulan	103.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung /lingkungan kantor	1 Unit/12 Bulan	61.987.260,00
4.00.03.4.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	195.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	5 Jenis/12 Bulan	8.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Kegiatan	110.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	3 Jenis	70.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Kali	40.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SIPKD	1 Kegiatan	45.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD	9 Dokumen	45.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	11 Kegiatan	2.468.463.800,00
4.00.03.4.00.03.01.15.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala ke Unit Kerja Irban I,II,III,IV	48 Obrik	866.373.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.002.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah15 Kasus	15 Kasus	30.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.006.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	48 PHP	470.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.009.	Penanganan Evaluasi LP2P	Terlaksananya Penanganan / Evaluasi LP2P	42 SKPD	20.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.012.	Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terlaksananya Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	42 SKPD	17.500.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.013.	Review RKA/DPA SKPD	Terlaksananya Review RKA / DPA	42 SKPD	25.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.014.	Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi	12 Bulan	105.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.015.	Pemberantasan Pungutan Liar	Terlaksananya Pemberantasan Pungutan Liar	12 Bulan	839.668.800,00
4.00.03.4.00.03.01.15.016.	Penilaian Zona Integritas	Terlaksananya penilaian zona integritas	5 SKPD	23.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.017.	Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	Terlaksananya review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 LKPD	36.922.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.018.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	Terlaksananya evaluasi LAKIP SKPD dan review LAKIPDA	42 SKPD	35.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.03.4.00.03.01.16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Aparatur Pengawasan bersertifikat	2 Kegiatan	229.150.000,00
4.00.03.4.00.03.01.16.001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	11 Kali	187.150.000,00
4.00.03.4.00.03.01.16.005.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Terlaksananya peningkatan kapabilitas APIP	17 Orang	42.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.19.	Program Penguatan Maturitas SPIP	Terlaksananya Program Penguatan Maturitas SPIP	3 Kegiatan	63.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.19.001.	Bimbingan Teknis SPIP	Terlaksananya bimbingan teknis SPIP	42 SKPD	18.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.19.002.	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP	3 Bulan	5.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.19.003.	Monitoring dan Evaluasi SPIP	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPIP	42 SKPD	40.000.000,00
4.00.04.	KEWILAYAHAN			29.746.900.000,00
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA			1.809.512.400,00
4.00.04.4.00.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	577.018.850,00
4.00.04.4.00.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	1100 eksemplar	80.751.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi kantor	1 tahun / 12 bulan / 8 rekening	59.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Tahun / 12 bulan / 1 unit	67.300.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan kendaraan Dinas	18 kendaraan	3.100.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	233.712.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan pembersih	12 jenis	3.046.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang tersedia	30 jenis	23.858.800,00
4.00.04.4.00.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	7 jenis	6.924.600,00
4.00.04.4.00.04.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2 jenis / tahun	2.200.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	-
4.00.04.4.00.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	3 jenis	4.104.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan Dan Minuman	7 jenis	15.890.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	1 tahun	77.132.450,00
4.00.04.4.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	310.325.850,00
4.00.04.4.00.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Kuantitas penyelenggaraan dan pe3ngadaan sarana/prasarana upacara	18 jenis / tahun	102.600.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Penyelenggaraan Perayaan hari-hari Nasional	5 kali	124.943.200,00
4.00.04.4.00.04.01.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	kuantitas perlengkapan rumah jabatan yang terpelihara	0 unit	-
4.00.04.4.00.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kuantitas perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	0 unit	-
4.00.04.4.00.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	43.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kuantitas perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala	1 unit	6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Kuantitas alat-alat kantor yang terpelihara	19 unit	8.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Data dan inventarisasi Aset barang milik daerah	6 dokumen	25.782.650,00
4.00.04.4.00.04.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	terciptanya penataan halaman gedung / lingkungan kantor yang baik	0 unit	-
4.00.04.4.00.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase kedisiplinan aparatur	100%	48.400.000,00
4.00.04.4.00.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	0 stel	-
4.00.04.4.00.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pelaksanaan upacara kerohanian dan budaya aparatur	1 tahun	48.400.000,00
4.00.04.4.00.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase kapasitas aparatur	100%	-
4.00.04.4.00.04.01.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 kali	-
4.00.04.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	19.153.200,00
4.00.04.4.00.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	15.310.000,00
4.00.04.4.00.04.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	laporan keuangan semesteran	0 laporan	-
4.00.04.4.00.04.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3.843.200,00
4.00.04.4.00.04.01.06.006.	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	-
4.00.04.4.00.04.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	30.123.600,00
4.00.04.4.00.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran SKPD	4 dokumen	30.123.600,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	63.358.400,00
4.00.04.4.00.04.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pawai / Pameran Pembangunan	3 kali	63.358.400,00
4.00.04.4.00.04.01.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Baik	93.996.000,00
4.00.04.4.00.04.01.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	10 Desa	15.210.000,00
4.00.04.4.00.04.01.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jumlah pembinaan koordinasi pelayanan masyarakat dan perijinan	10 desa	78.786.000,00
4.00.04.4.00.04.01.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Jumlah pembinaan dan pendataan obyek pendapatan daerah	4 laporan	-
4.00.04.4.00.04.01.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	persentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	50.061.600,00
4.00.04.4.00.04.01.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Kuantitas pembinaan tugas-tugas Kepala desa / perbekel	10 Desa	35.061.600,00
4.00.04.4.00.04.01.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	kuantitas pembinaan keagraria	0 Desa	-
4.00.04.4.00.04.01.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Kuantitas pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa / kelurahan	10 desa	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	kuantitas pembinaan penyusunan Peraturan Desa	0 desa	-
4.00.04.4.00.04.01.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	75%	160.656.600,00
4.00.04.4.00.04.01.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Jumlah Pembinaan Lomba desa terpadu	2 desa	48.795.000,00
4.00.04.4.00.04.01.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa/ kelurahan dan kecamatan	11 kali	29.309.400,00
4.00.04.4.00.04.01.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan evaluasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk Desa	0 desa	-
4.00.04.4.00.04.01.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Desa/ Kelurahan dan kecamatan	10 desa	4.900.000,00
4.00.04.4.00.04.01.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Buku Hasil Pembinaan	14 buku	67.652.200,00
4.00.04.4.00.04.01.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Buku Hasil pembinaan	0 desa	-
4.00.04.4.00.04.01.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Buku Hasil Pembinaan	10 Buku	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	persentase laporan gangguan keamanan, ketertiban dan bencana yang ditindak lanjuti	100%	117.903.600,00
4.00.04.4.00.04.01.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Laporan Hasil pengamanan dan pengawasan	10 desa	77.149.800,00
4.00.04.4.00.04.01.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Jumlah Sasaran pembinaan linmas hansip Desa	10 Desa	5.638.000,00
4.00.04.4.00.04.01.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Tingkat Persiapan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	100%	29.328.400,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.01.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Pelaksanaan penanggulangan bencana alam	10 Desa	5.787.400,00
4.00.04.4.00.04.01.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	-	-	338.514.700,00
4.00.04.4.00.04.01.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Kuantitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	8 lomba	203.814.700,00
4.00.04.4.00.04.01.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan pemuda & olah raga dan lembaga sosial kemasyarakatan	10 Desa	109.700.000,00
4.00.04.4.00.04.01.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan peningkatan	10 desa	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.19.004.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Kepariwisataan Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan Aparat Desa / kelurahan tentang kepariwisataan wilayah kecamatan	10 desa	-
4.00.04.4.00.04.01.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial wilayah Kecamatan	10 Desa	-
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN			1.911.300.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	14 kegiatan	578.982.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10000 exp	75.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas	16 Unit	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bualan	215.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	30.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12 Bulan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	37.622.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Peraundang -Undangan	12 Bulan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	12 Bulan	80.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13 kegiatan	289.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	40.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terlaksananya Penyelenggaraan dan pengadaan Sarana/Prasarana Upahcara	1 Tahun	98.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Terlaksananya Perayaan Hari - Hari Nasional	8 Kegiatan	90.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1 unit	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	1 unit	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional	15 unit	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala alat - alat kantor	35 unit	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi asset barang milik daerah	1 tahun	6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya aparatur yang berdisiplin	5 kegiatan	33.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan	12 stel	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus	22 stel	8.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 tahun	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai	22 laporan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 kegiatan	12.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD	1 tahun	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 tahun	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tercapainya Perencanaan Anggaran SKPD	1 kegiatan	87.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD	1 tahun	87.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya informasi pembangunan daerah	1 kegiatan	50.510.000,00
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terlaksananya penyelenggaraan pameran / pawai / informasi pembangunan	1 kali	50.510.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terpenuhinya capaian kinerja pengembangan kinerja	3 kegiatan	93.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	13 Desa	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan hidup	13 Desa	76.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan pendataan Daerah	13 Desa	7.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	5 kegiatan	116.550.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terlaksananya Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa / Kelurahan	-	14.550.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	13 Desa	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Perbekel	10 Desa	65.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Iventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	13 Desa	7.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan, Pemilu Ideologi dan Kesatuan Bangsa	13 Desa	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan peningkatan pembangunan desa	5 kegiatan	165.834.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	jumlah desa yang dibina terkait indikator evaluasi perkembangan desa	13 desa	36.930.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan	75%	24.580.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	39 lembaga	8.575.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Jumlah Pembinaan RKP Desa	13 desa	83.774.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah profil aktual kecamatan	1 buku	11.975.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terselenggaranya peningkatan linmas trantib	3 kegiatan	148.424.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	13 desa	142.974.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa	13 desa	2.700.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	13 desa	2.750.000,00
4.00.04.4.00.04.02.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4 kegiatan	332.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya	13 desa	100.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	13 desa	80.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	80.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.02.19.004.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Kepariwisataa an Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan aparat Desa/ Kelurahan tentang kepariwisataan	5 kegiatan	72.000.000,00
4.00.04.03.	KECAMATAN SAWAN			1.958.650.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	535.528.400,00
4.00.04.4.00.04.03.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	19.610.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	33.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhnya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan/1Tahun	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)	2.200.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	281.702.036,00
4.00.04.4.00.04.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	12 Bulan	36.476.328,00
4.00.04.4.00.04.03.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	4 Unit	6.300.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	25 Jenis	28.020.200,00
4.00.04.4.00.04.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	11.333.036,00
4.00.04.4.00.04.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	2.126.800,00
4.00.04.4.00.04.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT	-
4.00.04.4.00.04.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	8.400.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 Tahun	30.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	7 Kegiatan	289.380.000,00
4.00.04.4.00.04.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Kegiatan	-
4.00.04.4.00.04.03.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	-

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	2 Jenis	-
4.00.04.4.00.04.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana upacara	55 Kali	75.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	-
4.00.04.4.00.04.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit	55.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.02.051.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	1 Tahun	159.380.000,00
4.00.04.4.00.04.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Kegiatan	-
4.00.04.4.00.04.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			-
4.00.04.4.00.04.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem	1 Kegiatan	-
4.00.04.4.00.04.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	-
4.00.04.4.00.04.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	90.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	1 Tahun	90.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	52.813.900,00
4.00.04.4.00.04.03.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terselenggaranya Pmeran/Pawai Pembangunan	1 Tahun	52.813.900,00
4.00.04.4.00.04.03.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	3 Kegiatan	94.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	14 Desa	14.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	14 Desa	60.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	14 Desa	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	5 Kegiatan	83.850.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Tersenggaranya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbeke	14 Desa	18.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.03.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Tersenggaranya Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	14 Desa	65.850.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa	5 Kegiatan	150.650.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Terselenggaranya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Trepadu	14 Desa	73.150.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa/ 14 Dokumen	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Tersedianya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Tersedianya Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	14 Desa	37.500.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan	Terbinanya Penyusunan Profil Kecamatan	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	3 kegiatan	162.427.700,00
4.00.04.4.00.04.03.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	14 Desa	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan	14 Desa	9.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilaya	14 Desa	143.427.700,00
4.00.04.4.00.04.03.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilaya	14 Desa	-
4.00.04.4.00.04.03.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan		500.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	dana	Rp. 450.000.000	450.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	dana	Rp. 40.000.000	40.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.03.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	10.000.000,00
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN			3.320.210.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	915.510.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			86.400.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			52.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			1.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			195.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			30.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.150.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah			70.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.042.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada			295.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Kegiatan	230.800.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-
4.00.04.4.00.04.04.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara			170.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			800.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT			20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	29.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	29.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD			45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD			45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Program Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan			40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum			102.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	2 Kegiatan	12.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan			90.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan			175.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	5 Kegiatan	170.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel			5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan			119.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 Kegiatan	70.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan			14.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan			4.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 Kegiatan	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan			6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa			5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 Kegiatan	133.900.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah			5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan			6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah			116.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam			6.900.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.04.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan Sukasada		1.530.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana	Rp1200000000	1.200.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana	Rp160.000.000	160.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana	Rp35000000	35.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana	Rp0.00	135.000.000,00
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN			12.003.389.313,00
4.00.04.4.00.04.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	31 kegiatan	6.030.881.100,00
4.00.04.4.00.04.05.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	4000 Surat	143.874.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telpon dan Listrik	36 Rekening	97.524.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan Kantor	1 Unit	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa perlengkapan Kantor tersedia	14 Unit	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan Perkantoran	204 OB	347.595.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan Kantor	72 OB	121.605.900,00
4.00.04.4.00.04.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	29 Jenis	197.962.100,00
4.00.04.4.00.04.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Jenis	23.536.500,00
4.00.04.4.00.04.05.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang tersedia	8 Jenis	3.452.100,00
4.00.04.4.00.04.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	71.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	9.480.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	780 Orang	124.900.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	12 Bulan	45.350.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya jasa administrasi Kepegawaian	36 OB	95.116.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.025.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	4 Pelayanan	216.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.026.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	4 Pelayanan	213.376.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.05.01.027.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	4 Pelayanan	220.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.028.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	4 Pelayanan	251.852.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.029.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	4 Pelayanan	281.650.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.030.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	4 Pelayanan	302.163.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.031.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	4 Pelayanan	303.696.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.032.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	4 Pelayanan	245.300.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.033.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	4 Pelayanan	253.700.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.034.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	4 Pelayanan	341.550.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.035.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	4 Pelayanan	292.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.036.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	4 Pelayanan	287.676.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.037.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	4 Pelayanan	256.676.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.038.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	4 Pelayanan	246.152.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.039.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	4 Pelayanan	334.126.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.040.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	4 Pelayanan	392.108.500,00
4.00.04.4.00.04.05.01.041.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	4 Pelayanan	238.100.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Kegiatan	693.539.654,00
4.00.04.4.00.04.05.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			-
4.00.04.4.00.04.05.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	38.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	9.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan Mebeleur	1 Paket	149.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Frekwensi penyelenggaraan dan pengadaan sarana / Prasarana Upacara	389 Kali	148.200.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Terselenggaranya Upacara / Hari Besar Nasional	2 Kali	160.649.900,00
4.00.04.4.00.04.05.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Unit	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	62.509.754,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.05.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	7.150.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	40 Unit	7.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala alat-alat Kantor / RT	16 Unit	10.100.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	5 Dokumen	79.430.000,00
4.00.04.4.00.04.05.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penataan halaman Gedung kantor Camat Buleleng	1 Paket	2.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Kegiatan	185.700.000,00
4.00.04.4.00.04.05.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			-
4.00.04.4.00.04.05.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			-
4.00.04.4.00.04.05.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	165 Stel	82.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	17 Unit	103.200.000,00
4.00.04.4.00.04.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	1 Kegiatan	28.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	28.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	10.495.000,00
4.00.04.4.00.04.05.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	12 Laporan	10.495.000,00
4.00.04.4.00.04.05.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	29.733.600,00
4.00.04.4.00.04.05.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersedia	3 Dokumen	29.733.600,00
4.00.04.4.00.04.05.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1.030.067.715,00
4.00.04.4.00.04.05.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	1 Kali	116.750.000,00
4.00.04.4.00.04.05.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Tersedianya Penyediaan Jasa Hiburan	2 Kali	913.317.715,00
4.00.04.4.00.04.05.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	3 Kegiatan	205.724.072,00
4.00.04.4.00.04.05.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	4 Kali	51.660.000,00
4.00.04.4.00.04.05.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Tersedianya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	29 Kali	154.064.072,00
4.00.04.4.00.04.05.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah			-

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.05.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	8 Kegiatan	239.191.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	29 Desa/Kelurahan	138.998.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Tersedianya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	1 Desa	6.720.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemerintah Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan	14.223.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan	29 Desa/Kelurahan	79.250.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa			-
4.00.04.4.00.04.05.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan			-
4.00.04.4.00.04.05.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa			-
4.00.04.4.00.04.05.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa			-
4.00.04.4.00.04.05.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	8 Kegiatan	354.329.852,00
4.00.04.4.00.04.05.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Frekuensi Pembinaan Perlimbaan Desa/Kelurahan Terpadu	4 Desa/Kelurahan	173.055.152,00
4.00.04.4.00.04.05.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	29 Desa/Kelurahan	83.199.800,00
4.00.04.4.00.04.05.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	30 Dokumen	73.595.100,00
4.00.04.4.00.04.05.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Tersedinya Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Tersusun	60 Buku	11.279.800,00
4.00.04.4.00.04.05.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah LPM yang Dibina	29 LPM	13.200.000,00
4.00.04.4.00.04.05.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan			-
4.00.04.4.00.04.05.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa			-
4.00.04.4.00.04.05.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan			-
4.00.04.4.00.04.05.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 Kegiatan	178.888.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah Lebih Baik	29 Desa/Kelurahan	3.995.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan	23.004.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Tersedianya Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	29 Desa/Kelurahan	151.889.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	29 Desa/Kelurahan	-

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.05.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3.016.839.320,00
4.00.04.4.00.04.05.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya DI Wilayah Kecamatan	17 Kelompok	2.733.722.420,00
4.00.04.4.00.04.05.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	19 Kelompok	188.960.750,00
4.00.04.4.00.04.05.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	4 Kali	94.156.150,00
4.00.04.4.00.04.05.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	4 Kali	-
4.00.04.06.	KECAMATAN BANJAR			1.950.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	472.760.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim dan diterima	2.500 lembar	123.343.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, dan listrik yang terbayar tepat waktu	48 rekening	42.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kendaraan opsional yang tersedia	12 bulan	-
4.00.04.4.00.04.06.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/opsional yang terbayar tepat waktu	14 unit	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase serapan anggaran/keuangan	100%	162.610.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan jasa kebersihan yang diadakan	12 bulan	71.147.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-
4.00.04.4.00.04.06.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	174 meter	-
4.00.04.4.00.04.06.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai aturan	10 unit	-
4.00.04.4.00.04.06.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan/koran yang diadakan sesuai aturan	1.080 bacaan/exp	6.160.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan sesuai aturan	135 kotak/kg	12.500.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Perjalanan dinas rapat-rapat/koordinasi ke luar/dalam daerah	12 bulan	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam konisi baik dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	174.710.900,00
4.00.04.4.00.04.06.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan sesuai aturan	26 buah/unit	28.360.900,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.06.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan dengan baik	400 kali	54.500.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah upacar hari besar nasional yang dilaksanakan dengan baik	5 kali	91.850.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rehab sedang/berat rumah jabatan	1 unit	-
4.00.04.4.00.04.06.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab ringan/sedang gedung/kantor	2 unit	-
4.00.04.4.00.04.06.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara baik	12 bulan	-
4.00.04.4.00.04.06.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Pendataan dan inventarisasi asset barang milik daerah	14 laporan	-
4.00.04.4.00.04.06.02.052.	Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah laporan kegiatan yang dilaporkan ke media/website	150 dokumen	-
4.00.04.4.00.04.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	100%	-
4.00.04.4.00.04.06.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan sesuai aturan	65 stel	-
4.00.04.4.00.04.06.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100%	29.700.000,00
4.00.04.4.00.04.06.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen penilaian dan pengembangan pegawai yang diselesaikan sesuai aturan	50 dokumen	29.700.000,00
4.00.04.4.00.04.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	9.900.000,00
4.00.04.4.00.04.06.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	24 dokumen	-
4.00.04.4.00.04.06.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun dan disam[paikan tepat waktu	4 dokumen	9.900.000,00
4.00.04.4.00.04.06.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	88.660.000,00
4.00.04.4.00.04.06.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	4 dokumen	88.660.000,00
4.00.04.4.00.04.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	-
4.00.04.4.00.04.06.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah kegiatan informasi pembangunan dilaksanakan dengan baik	3 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Banjar	87% (baik)	101.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan kepada bank sampah/pengelola sampah sejenis yang dibina	17 kali	17.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jumlah perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	170 dokumen	84.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan obyek pendapatan daerah	3 kali	-

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.06.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kualifikasi baik	83%	221.176.600,00
4.00.04.4.00.04.06.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada kepala desa/perbekel	10 kali	13.925.000,00
4.00.04.4.00.04.06.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang tersusun sesuai aturan tepat waktu	34 perdes	118.251.600,00
4.00.04.4.00.04.06.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan administrasi pemerintah desa/kelurahan	24 kali	89.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintah desa	3 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan pembinaan terkait pemilu, ideologi dan kesatuan bangsa	5 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	78%	153.262.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Jumlah pembinaan terkait indikator evaluasi perkembangan desa	8 kali	49.041.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	% tingkat pastisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan	80%	35.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	12 kali	56.342.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Jumlah RKP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	17 kali	7.500.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah profil actual kecamatan	1 dokumen	5.379.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	226.485.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah laporan bulanan pelanggaran perda di kecamatan yang ditindaklanjuti	24 kali	12.485.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan kepada linmas/hansip desa	1 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.18.006.	Pemantauna Ketentraman, Ketertiban Wilayah, dan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan bencana yang ditindaklanjuti	12 bulan	214.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	78%	472.345.500,00
4.00.04.4.00.04.06.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Jumlah pementasan budaya dan jumlah pembinaan dan lomba pelestarian adat dan budaya	10 kali/event	417.345.500,00
4.00.04.4.00.04.06.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	8 kali	-
4.00.04.4.00.04.06.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan terkait pemberdayaan kesehatan masyarakat	12 kali	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan pelayanan terkait PMKS	6 kali	15.000.000,00
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN			2.729.708.187,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	866.707.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Lembar	154.500.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Dan Listrik	1 Tahun	85.600.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	62.560.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil, 12 Sepeda Motor	2.500.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	1 Tahun	180.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 Jenis	8.145.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	18 Jenis	47.201.900,00
4.00.04.4.00.04.07.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	4 Jenis	21.450.100,00
4.00.04.4.00.04.07.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	7.752.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Jenis	6.336.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minumam	977 Kotak	52.262.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	80.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.043.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	Terlaksananya Jasa Pelayanan Adminitrasi Kelurahan Seririt	1 Tahun	158.400.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Kegiatan	369.224.890,00
4.00.04.4.00.04.07.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	77.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeluair	20 Buah	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasaran Upacara	800 Kali	98.257.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			-
4.00.04.4.00.04.07.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			-
4.00.04.4.00.04.07.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Roda 4, 10 Roda 2	29.702.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	4 Unit	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	1 Tahun	15.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.07.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			-
4.00.04.4.00.04.07.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan halaman/lingkungan kantor	1 Tahun	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.049.	Pemeliharaan Fasilitas Umum	Terlaksananya pemeliharaan bangunan fasilitas umum	1 Tahun	75.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.051.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	1 Kali	53.765.890,00
4.00.04.4.00.04.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			-
4.00.04.4.00.04.07.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			-
4.00.04.4.00.04.07.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Paket	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	5.819.500,00
4.00.04.4.00.04.07.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	5.819.500,00
4.00.04.4.00.04.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Kegiatan	19.163.700,00
4.00.04.4.00.04.07.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Laporan	16.124.600,00
4.00.04.4.00.04.07.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Laporan	524.600,00
4.00.04.4.00.04.07.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Laporan	1.043.000,00
4.00.04.4.00.04.07.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	1.471.500,00
4.00.04.4.00.04.07.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	93.047.500,00
4.00.04.4.00.04.07.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	1 Tahun	93.047.500,00
4.00.04.4.00.04.07.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	104.210.000,00
4.00.04.4.00.04.07.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah	1 Kali	104.210.000,00
4.00.04.4.00.04.07.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	3 Kegiatan	113.286.810,00
4.00.04.4.00.04.07.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa, 1 Kelurahan	16.069.410,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.07.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Terwujudnya Koordinasi Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	20 Desa, 1 Kelurahan	60.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pdan Pendataa Obyek Pendapatan Daerah	20 Desa, 1 Kelurahan	37.217.400,00
4.00.04.4.00.04.07.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	5 Kegiatan	243.492.212,00
4.00.04.4.00.04.07.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terlaksananya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	21 Orang	13.794.812,00
4.00.04.4.00.04.07.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	20 Desa	22.657.000,00
4.00.04.4.00.04.07.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	20 Desa	192.438.700,00
4.00.04.4.00.04.07.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pembinaan Inventarisasi kekayaan Pemerintah Desa	21 Desa/Kelurahan	7.375.400,00
4.00.04.4.00.04.07.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Inventarisasi kekayaan Pemerintah Desa	20 Desa, 1 Kelurahan	7.226.300,00
4.00.04.4.00.04.07.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	5 Kegiatan	208.032.700,00
4.00.04.4.00.04.07.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Terlaksananya Administrasi Desa/Kelurahan Yang Baik dan Benar	21 Desa/Kelurahan	21.444.100,00
4.00.04.4.00.04.07.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Jumlah Usulan Musrenbang yang Terakomodir	21 Desa/Kelurahan	64.444.800,00
4.00.04.4.00.04.07.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	56.769.850,00
4.00.04.4.00.04.07.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	20 Desa	48.747.500,00
4.00.04.4.00.04.07.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya Profil Kecamatan	21 Buku	16.626.450,00
4.00.04.4.00.04.07.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	3 Kegiatan	172.902.107,00
4.00.04.4.00.04.07.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	21 Desa/Kelurahan	96.201.000,00
4.00.04.4.00.04.07.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Linmas/Hansip Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	29.942.407,00
4.00.04.4.00.04.07.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Terlaksananya Sinkronisasi Pelaksanaan Pennaggulangan Bencana Alam	21 Desa/Kelurahan	46.758.700,00
4.00.04.4.00.04.07.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4 Kegiatan	483.821.768,00
4.00.04.4.00.04.07.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	20 Desa 1 Kelurahan	344.471.143,00
4.00.04.4.00.04.07.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	20 Desa,1 Kelurahan	100.350.625,00
4.00.04.4.00.04.07.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	6 Kali	25.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.07.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pelqayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	20 Desa, 1 Kelurahan	14.000.000,00
4.00.04.08.	KECAMATAN GEROKGAK			2.127.601.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	13 Kegiatan	666.503.500,00
4.00.04.4.00.04.08.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	20.751.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1 tahun	91.296.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	121.360.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	3.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	161.385.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	100.019.300,00
4.00.04.4.00.04.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor	1 tahun	18.170.300,00
4.00.04.4.00.04.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	1 tahun	24.497.500,00
4.00.04.4.00.04.08.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	8.015.400,00
4.00.04.4.00.04.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	7.000.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	1 tahun	3.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	36.744.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 tahun	70.265.000,00
4.00.04.4.00.04.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9 Kegiatan	352.504.706,00
4.00.04.4.00.04.08.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	18.198.500,00
4.00.04.4.00.04.08.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 tahun	1.000.000,00
4.00.04.4.00.04.08.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terlaksananya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	1 tahun	103.961.400,00
4.00.04.4.00.04.08.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Terlaksananya penyelenggaraan upacara/hari-hari nasional	1 tahun	166.406.400,00
4.00.04.4.00.04.08.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 tahun	-
4.00.04.4.00.04.08.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	6.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.08.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	43.598.406,00
4.00.04.4.00.04.08.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	7.840.000,00
4.00.04.4.00.04.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya program peningkatan disiplin aparatur	2 Kegiatan	23.900.000,00
4.00.04.4.00.04.08.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 tahun	13.950.000,00
4.00.04.4.00.04.08.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 tahun	9.950.000,00
4.00.04.4.00.04.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	2.200.000,00
4.00.04.4.00.04.08.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	2.200.000,00
4.00.04.4.00.04.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Kegiatan	5.780.000,00
4.00.04.4.00.04.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	36 laporan	3.150.000,00
4.00.04.4.00.04.08.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan, 12 buku	2.630.000,00
4.00.04.4.00.04.08.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tercapainya Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Kegiatan	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD	4 dokumen	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Program Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	23.250.500,00
4.00.04.4.00.04.08.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terwujudnyanya pameran / pawai pembangunan	1 tahun	23.250.500,00
4.00.04.4.00.04.08.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan peningkatan pelayanan umum	3 kegiatan	122.734.544,00
4.00.04.4.00.04.08.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	14 desa	45.439.600,00
4.00.04.4.00.04.08.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Terlaksananya pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan	14 desa	72.294.944,00
4.00.04.4.00.04.08.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Terwujudnya pembinaan dan pendapatan objek pendapatan daerah	14 desa	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.08.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terwujudnya program koordinasi penyelenggraan desa / kelurahan	5 kegiatan	88.799.000,00
4.00.04.4.00.04.08.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi tugas - tugas perbekel	14 desa	65.815.800,00
4.00.04.4.00.04.08.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Terlaksanannya bintek penyusunan peraturan desa	42 orang	5.016.600,00
4.00.04.4.00.04.08.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Terlaksananya bintek pelaksanaan administrasi pemerintah desa / kelurahan	42 orang	5.016.600,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.08.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Terlaksananya pembinaan inventaris kekayaan pemerintah desa	14 desa	2.950.000,00
4.00.04.4.00.04.08.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya pelaksanaan pemilu, idiologi dan kesatuan bangsa	11 desa	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.08.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terwujudnya program koordinasi penyelenggaraan peningkatan pembangunan desa	5 kegiatan	120.308.900,00
4.00.04.4.00.04.08.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Terlaksananya pembinaan lomba desa	14 desa	56.485.100,00
4.00.04.4.00.04.08.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	15 kali	46.533.700,00
4.00.04.4.00.04.08.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat	6 desa	5.550.600,00
4.00.04.4.00.04.08.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Terwujudnya pembinaan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa	14 desa	7.138.100,00
4.00.04.4.00.04.08.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan	Terwujudnya penyusunan profil kecamatan	kecamatan	4.601.400,00
4.00.04.4.00.04.08.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya program koordinasi penyelenggaraan peningkatan trantib & PoIPP	3 Kegiatan	231.510.600,00
4.00.04.4.00.04.08.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Terwujudnya pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	14 desa	117.100.000,00
4.00.04.4.00.04.08.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Terwujudnya pembinaan linmas hansip desa / kelurahan	14 desa	41.198.600,00
4.00.04.4.00.04.08.18.006.	Pemantauna Ketentraman, Ketertiban Wilayah, dan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya pemantauan ketentraman, ketertiban wilayah dan penanggulangan bencana	14 desa	73.212.000,00
4.00.04.4.00.04.08.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terwujudnya koordinasi penyelenggraan peningkatan kesejahtraan sosial	4 kegiatan	484.609.250,00
4.00.04.4.00.04.08.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Terwujudnya pembinaan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	14 desa, 3 pembinaan dan lembaga, 2 sekaa	400.666.850,00
4.00.04.4.00.04.08.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Terwujudnya pembinaan pemuda dan olagraa dan lembaga sosial kemasyarakatan	14 desa	33.942.400,00
4.00.04.4.00.04.08.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terwujudnya pembinaan pelaksanaan lomba kesejahtraan sosial	14 desa	45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.08.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Terwujudnya pembinaan penyandang masalah kesejahtraan sosial	14 desa	5.000.000,00
4.00.04.09.	KECAMATAN BUSUNGBIU			1.936.529.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan dengan Baik	14 Kegiatan	723.983.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	1.250 eksemplar	87.750.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, air, listrik dan internet siap pakai	12 bulan	56.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kendaraan operasional siap pakai	12 bulan	78.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan dinas yang terbayar	14 unit	3.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 bulan	235.600.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan siap pakai	12 bulan	88.830.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja siap pakai	20 unit	6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor siap pakai	18 jenis	31.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan fotocopy	7 jenis	9.377.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang siap pakai	126 buah	5.326.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai	4 jenis	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	2.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat/ tamu yang tersedia	1.650 kotak	34.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	233 kali	80.500.100,00
4.00.04.4.00.04.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Siap dan Layak Digunakan	10 Kegiatan	349.070.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor siap pakai	1 unit	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional siap pakai	2 unit	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Sarana dan prasarana upacara siap pakai	382 kali	110.570.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah upacara/ hari besar nasional	6 kali	97.300.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Bangunan rumah jabatan yang terpelihara	1 unit	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor yang terpelihara	1 unit	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	49.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Laporan inventarisasi aset barang milik daerah	12 bulan	22.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Halaman gedung/ lingkungan kantor yang tertata	1 kegiatan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.049.	Pemeliharaan Fasilitas Umum	Fasilitas umum yang terpelihara	1 kegiatan	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Pegawai yang Bekerja dengan Disiplin	2 Kegiatan	32.250.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas aparaturnya siap pakai	35 stel	12.250.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.09.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	1 kali	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pelayanan Penilaian dan Pengembangan Pegawai	1 Kegiatan	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen kepegawaian yang disampaikan tepat waktu	50 dokumen	10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disajikan dengan Baik	1 Kegiatan	17.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	17.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	1 Kegiatan	23.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disajikan dengan baik	5 dokumen	23.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Informasi Pembangunan yang Dilaksanakan dengan Baik	1 Kegiatan	87.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Pawai pembangunan dan budaya yang terlaksana dengan baik	2 kali	87.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	3 Kegiatan	132.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan kepada bank sampah atau pengelola sampah sejenis	15 kali	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jumlah perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	150 lembar	102.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.003.	Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan obyek pendapatan daerah	2 kali	5.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	5 Kegiatan	61.600.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah pelaksanaan pembinaan tugas-tugas perbekel	15 kali	12.100.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah perdes yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 perdes	26.850.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan administrasi desa	15 kali	9.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa			5.250.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa			8.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	6 Kegiatan	124.750.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu			69.650.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan			29.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan			5.500.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
4.00.04.4.00.04.09.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang Ditindaklanjuti	3 Kegiatan	6.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa			7.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.008.	Penyusunan Profil Kecamatan			6.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib			144.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah			91.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan			9.650.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.006.	Pemantauna Ketentraman, Ketertiban Wilayah, dan Penanggulangan Bencana	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	4 Kegiatan	43.350.000,00
4.00.04.4.00.04.09.19.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan			230.176.000,00
4.00.04.4.00.04.09.19.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan			193.676.000,00
4.00.04.4.00.04.09.19.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan			10.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.19.003.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan			20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.19.005.	Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan			6.500.000,00
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.725.900.000,00
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.725.900.000,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			3.275.900.000,00
5.00.01.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase terkendalnya potensi konflik di kabupaten buleleng	75 %	1.258.900.000,00
5.00.01.1.01.05.01.15.001.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang dikerahkan dalam rangka hari-hari besar nasional dan daerah	433 orang	203.900.000,00
5.00.01.1.01.05.01.15.003.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas pemula yang terlatih dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	588 orang	260.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peningkatan kualitas pemberdayaan satlinmas guna kelancaran pelaksanaan tugas	9 Kecamatan	95.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.15.007.	Pengamanan/Pengawasan Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah pengamanan Pejabat Pemerintah Kab Buleleng dan tamu VVIP	12 bulan	700.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	75 %	1.509.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terciptanya ketertiban umum di masyarakat	12 Bulan	450.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
5.00.01.1.01.05.01.16.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan dan penegakan perda oleh PPNS yang dimonitor , optimalisasi dan dievaluasi kegiatannya	12 Bulan	156.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.006.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pengawasan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	70 Kali	508.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.007.	Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Prosentase penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	75 %	270.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.008.	Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah pelaksanaan peningkatan kemampuan kualitas sumber daya apartur SatPolPP Kab Buleleng	28 Kali	125.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terwujudnya masyarakat yang terbebas dan terhindar dari penyakit masyarakat	9 Kecamatan	-
5.00.01.1.01.05.01.20.001.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	-	-
5.00.01.1.01.05.01.23.	Program koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Persentase layanan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di masyarakat	80 %	508.000.000,00
5.00.01.1.01.05.01.23.002.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase terciptanya ketertiban umum dan rasa aman di masyarakat	80 %	508.000.000,00
5.00.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.450.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng	100%	1.034.447.404,00
5.00.01.5.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim 1 tahun	4000 lembar	96.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya rekening biaya Air,Listrik dan Telpo	36 Rekening	90.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terbayarnya sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris	12 Bulan	211.600.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan dinas/operasional yang pajaknya terbayarkan	36 Unit	20.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan disusun	120 Dokumen	350.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	391 buah, 480 botol,100 kaleng,30 kotak,29 bungkus	50.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	54 Rim, 378 Buah, 15 Botol, 23 Kotak	7.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	174 Buku, 1 LS, 30,011 Lembar	14.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	105 Buah, 3 Pcs	5.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 Unit	26.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	1.098 Eksemplar	22.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
5.00.01.5.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu yang tersedia	200 dus,368 kg,658 kotak,125 kaleng,500 pcs,350 bungkus	35.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Rapat dan konsultasi ke luar atau dalam daerah yang terlaksana	70 Kali	107.847.404,00
5.00.01.5.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng	100%	303.880.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang tersedia	0	-
5.00.01.5.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah upacara keagamaan yang terlaksana	60 Kali	160.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	0	-
5.00.01.5.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	30 Unit	15.880.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	13 Unit	3.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah unit alat-alat kantor yang terpelihara	51 Unit	10.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset barang milik daerah yang tersusun	7 Dokumen	115.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya capaian peningkatan disiplin aparatur	100%	100.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya yang tersedia	27 pcs	18.500.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yeng tersedia	63 Stel	31.500.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang terlaksananya	1 Kali	50.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	39.900.000,00
5.00.01.5.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	18 Dokumen	34.900.000,00
5.00.01.5.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	5.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan disusun tepat waktu	65 Buku	213.572.596,00
5.00.01.5.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah buku/dokumen anggaran SKPD yang tersusun dan Jumlah Rapat koordinasi gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng yang terlaksana	65 Buku, 4 Rakor	213.572.596,00
5.00.01.5.00.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurunnya Persentase jumlah daerah-daerah rawan konflik	50%	805.000.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
5.00.01.5.00.01.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara, menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah dan laporan pemantauan kantrantibmas di daerah Kab. Buleleng yang tersusun	4 Rakor, 300 Laporan	205.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.010.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi FKDM di 9 kecamatan dan tersusunnya laporan FKDM	9 Kecamatan	200.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.013.	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi pencegahan konflik sosial dan tersusunnya laporan pencegahan konflik sosial	4 Buku, 5 Rakor	200.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.014.	Pemantauan Orang Asing	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi pemantauan orang asing di Kab. Buleleng dan tersusunnya laporan hasil pemantauan asing	7 Laporan, 7 Rakor	200.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertemakan wawasan kebangsaan	70%	353.089.400,00
5.00.01.5.00.01.01.17.002.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah terlaksananya kunker, seminar, sosialisasi, pentas seni dan rakor bertemakan wawasan kebangsaan	2 sosialisasi ke Sekolah, 2 sosialisasi ke Desa, dan 1 kali pentas seni	353.089.400,00
5.00.01.5.00.01.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertemakan keberagaman umat beragama	60 %	269.810.600,00
5.00.01.5.00.01.01.18.004.	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah terlaksananya kunker, seminar, sosialisasi dan rakor forum kerukunan umat beragama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	10 sosialisasi ke Desa	269.810.600,00
5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Persentase Pendidikan Politik Masyarakat Kab. Buleleng	80 %	330.300.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.003.	koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah Terlaksananya Forum Komunikasi dan konsultasi Diskusi Politik terkait Pemilu	100 Orang	82.575.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Terbentuknya Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan PILEG dan PILPRES 2019	2 Laporan	82.575.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.010.	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah laporan terlaksananya verifikasi/penelitian bantuan keuangan kepada patai politik yang tersusun	3 Laporan	82.575.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.011.	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terverifikasi dan dapat diterbitnya surat keterangan terdaftar ormas	6 Ormas	82.575.000,00

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
			TOTAL	992.221.545.316,00